



SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2019



DEWANPERS

DAFTAR ISI

	Hal
1. Provinsi Aceh	1
Tabel 1. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	1
Tabel 1. 2. Kebebasan dari Intervensi	1
Tabel 1. 3. Kebebasan dari Kekerasan	1
Tabel 1. 4. Kebebasan Media Alternatif	2
Tabel 1. 5. Keragaman Pandangan	2
Tabel 1. 6. Akurat dan Berimbang	2
Tabel 1. 7. Akses atas Informasi Publik.....	2
Tabel 1. 8. Pendidikan Insan Pers	2
Tabel 1. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	3
Tabel 1.10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	3
Tabel 1. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	4
Tabel 1. 12. Keragaman Kepemilikan	4
Tabel 1. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	4
Tabel 1. 14. Lembaga Penyiaran Publik.....	5
Tabel 1. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	5
Tabel 1. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	5
Tabel 1. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	5
Tabel 1. 18 Etika Pers	6
Tabel 1. 19. Mekanisme Pemulihan	6
Tabel 1. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	6
2. Provinsi Sumatera Utara	7
Tabel 2. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	7
Tabel 2. 2. Kebebasan dari Intervensi	7
Tabel 2. 3. Kebebasan dari Kekerasan	7
Tabel 2. 4. Kebebasan Media Alternatif	8
Tabel 2. 5. Keragaman Pandangan	8
Tabel 2. 6. Akurat dan Berimbang	8

Tabel 2. 7. Akses atas Informasi Publik.....	8
Tabel 2. 8. Pendidikan Insan Pers	8
Tabel 2. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	9
Tabel 2. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	9
Tabel 2. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	10
Tabel 2. 12. Keragaman Kepemilikan	10
Tabel 2. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	10
Tabel 2. 14. Lembaga Penyiaran Publik.....	11
Tabel 2. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	11
Tabel 2. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	11
Tabel 2. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	12
Tabel 2. 18. Etika Pers	12
Tabel 2. 19. Mekanisme Pemulihan	12
Tabel 2. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	12
3. Provinsi Sumatera Barat.....	13
Tabel 3. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	13
Tabel 3. 2. Kebebasan dari Intervensi	13
Tabel 3. 3. Kebebasan dari Kekerasan	13
Tabel 3. 4. Kebebasan Media Alternatif	14
Tabel 3. 5. Keragaman Pandangan	14
Tabel 3. 6. Akurat dan Berimbang	14
Tabel 3. 7. Akses atas Informasi Publik.....	15
Tabel 3. 8. Pendidikan Insan Pers.....	15
Tabel 3. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	15
Tabel 3. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	15
Tabel 3. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	16
Tabel 3. 12. Keragaman Kepemilikan	16
Tabel 3. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	17
Tabel 3. 14. Lembaga Penyiaran Publik.....	17
Tabel 3. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	18

Tabel 3. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	18
Tabel 3. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	18
Tabel 3. 18. Etika Pers	18
Tabel 3. 19. Mekanisme Pemulihan	19
Tabel 3. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	19
4. Provinsi Riau	19
Tabel 4. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	19
Tabel 4. 2. Kebebasan dari Intervensi	20
Tabel 4. 3. Kebebasan dari Kekerasan	20
Tabel 4. 4. Kebebasan Media Alternatif	20
Tabel 4. 5. Keragaman Pandangan	21
Tabel 4. 6. Akurat dan Berimbang	21
Tabel 4. 7. Akses atas Informasi Publik.....	21
Tabel 4. 8. Pendidikan Insan Pers	21
Tabel 4. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	22
Tabel 4. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	22
Tabel 4. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	23
Tabel 4. 12. Keragaman Kepemilikan	23
Tabel 4. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	23
Tabel 4. 14. Lembaga Penyiaran Publik.....	24
Tabel 4. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	24
Tabel 4. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	24
Tabel 4. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	24
Tabel 4. 18. Etika Pers	25
Tabel 4. 19. Mekanisme Pemulihan	25
Tabel 4. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	25
5. Provinsi Riau Kepulauan.....	26
Tabel 5. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	26
Tabel 5. 2. Kebebasan dari Intervensi	26
Tabel 5. 3. Kebebasan dari Kekerasan	26

Tabel 5. 4. Kebebasan Media Alternatif	27
Tabel 5. 5. Keragaman Pandangan	27
Tabel 5. 6. Akurat dan Berimbang	27
Tabel 5. 7. Akses atas Informasi Publik.....	27
Tabel 5. 8. Pendidikan Insan Pers.....	27
Tabel 5. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	28
Tabel 5. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	28
Tabel 5. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	29
Tabel 5. 12. Keragaman Kepemilikan	29
Tabel 5. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	29
Tabel 5. 14. Lembaga Penyiaran Publik.....	30
Tabel 5. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	30
Tabel 5. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	30
Tabel 5. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	31
Tabel 5. 18. Etika Pers	31
Tabel 5. 19. Mekanisme Pemulihan	31
Tabel 5. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	31
6. Provinsi Jambi	32
Tabel 6. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	32
Tabel 6. 2. Kebebasan dari Intervensi	32
Tabel 6. 3. Kebebasan dari Kekerasan	32
Tabel 6. 4. Kebebasan Media Alternatif	33
Tabel 6. 5. Keragaman Pandangan	33
Tabel 6. 6. Akurat dan Berimbang	33
Tabel 6. 7. Akses atas Informasi Publik.....	34
Tabel 6. 8. Pendidikan Insan Pers.....	34
Tabel 6. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	34
Tabel 6. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	34
Tabel 6. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	35
Tabel 6. 12. Keragaman Kepemilikan	35

Tabel 6. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	36
Tabel 6. 14. Lembaga Penyiaran Publik.....	36
Tabel 6. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	37
Tabel 6. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	37
Tabel 6. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	37
Tabel 6. 18. Etika Pers	37
Tabel 6. 19. Mekanisme Pemulihan	38
Tabel 6. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	38
7. Provinsi Sumatera Selatan.....	38
Tabel 7. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	38
Tabel 7. 2. Kebebasan dari Intervensi	39
Tabel 7. 3. Kebebasan dari Kekerasan	39
Tabel 7. 4. Kebebasan Media Alternatif	39
Tabel 7. 5. Keragaman Pandangan	40
Tabel 7. 6. Akurat dan Berimbang	40
Tabel 7. 7. Akses atas Informasi Publik.....	40
Tabel 7. 8. Pendidikan Insan Pers.....	40
Tabel 7. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	41
Tabel 7. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	41
Tabel 7. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	42
Tabel 7. 12. Keragaman Kepemilikan	42
Tabel 7. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	42
Tabel 7. 14. Lembaga Penyiaran Publik.....	43
Tabel 7. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	43
Tabel 7. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	43
Tabel 7. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	43
Tabel 7. 18. Etika Pers	44
Tabel 7. 19. Mekanisme Pemulihan	44
Tabel 7. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	44
8. Provinsi Bengkulu.....	45

Tabel 8. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	45
Tabel 8. 2. Kebebasan dari Intervensi	45
Tabel 8. 3. Kebebasan dari Kekerasan	45
Tabel 8. 4. Kebebasan Media Alternatif	46
Tabel 8. 5. Keragaman Pandangan	46
Tabel 8. 6. Akurat dan Berimbang	46
Tabel 8. 7. Akses atas Informasi Publik.....	46
Tabel 8. 8. Pendidikan Insan Pers.....	46
Tabel 8. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	47
Tabel 8. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	47
Tabel 8. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	48
Tabel 8. 12. Keragaman Kepemilikan	48
Tabel 8. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	48
Tabel 8. 14. Lembaga Penyiaran Publik.....	49
Tabel 8. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	49
Tabel 8. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	49
Tabel 8. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	50
Tabel 8. 18. Etika Pers	50
Tabel 8. 19. Mekanisme Pemulihan	50
Tabel 8. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	50
9. Provinsi Lampung.....	51
Tabel 9. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	51
Tabel 9. 2. Kebebasan dari Intervensi	51
Tabel 9. 3. Kebebasan dari Kekerasan	51
Tabel 9. 4. Kebebasan Media Alternatif	52
Tabel 9. 5. Keragaman Pandangan	52
Tabel 9. 6. Akurat dan Berimbang	52
Tabel 9. 7. Akses atas Informasi Publik.....	53
Tabel 9. 8. Pendidikan Insan Pers.....	53
Tabel 9. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	53

Tabel 9. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	53
Tabel 9. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	54
Tabel 9. 12. Keragaman Kepemilikan	54
Tabel 9. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	55
Tabel 9. 14. Lembaga Penyiaran Publik.....	55
Tabel 9. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	56
Tabel 9. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	56
Tabel 9. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	56
Tabel 9. 18. Etika Pers	56
Tabel 9. 19. Mekanisme Pemulihan	57
Tabel 9. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	57
10. Provinsi Bangka Belitung.....	57
Tabel 10. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	57
Tabel 10. 2. Kebebasan dari Intervensi.....	58
Tabel 10. 3. Kebebasan dari Kekerasan	58
Tabel 10. 4. Kebebasan Media Alternatif	58
Tabel 10. 5. Keragaman Pandangan	59
Tabel 10. 6. Akurat dan Berimbang.....	59
Tabel 10. 7. Akses atas Informasi Publik.....	59
Tabel 10. 8. Pendidikan Insan Pers.....	59
Tabel 10. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	60
Tabel 10. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	60
Tabel 10. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	61
Tabel 10. 12. Keragaman Kepemilikan	61
Tabel 10. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	61
Tabel 10. 14. Lembaga Penyiaran Publik	62
Tabel 10. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	62
Tabel 10. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	62
Tabel 10. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	63
Tabel 10. 18. Etika Pers	63

Tabel 10. 19. Mekanisme Pemulihan	63
Tabel 10. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	63
11. Provinsi Banten.....	64
Tabel 11. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	64
Tabel 11. 2. Kebebasan dari Intervensi.....	64
Tabel 11. 3. Kebebasan dari Kekerasan	64
Tabel 11. 4. Kebebasan Media Alternatif	65
Tabel 11. 5. Keragaman Pandangan	65
Tabel 11. 6. Akurat dan Berimbang	65
Tabel 11. 7. Akses atas Informasi Publik.....	66
Tabel 11. 8. Pendidikan Insan Pers.....	66
Tabel 11. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	66
Tabel 11. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	66
Tabel 11. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	67
Tabel 11. 12. Keragaman Kepemilikan	67
Tabel 11. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	68
Tabel 11. 14. Lembaga Penyiaran Publik.....	68
Tabel 11. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	69
Tabel 11. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	69
Tabel 11. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	69
Tabel 11. 18. Etika Pers	69
Tabel 11. 19. Mekanisme Pemulihan	70
Tabel 11. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	70
12. Provinsi DKI Jakarta	70
Tabel 12. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	70
Tabel 12. 2. Kebebasan dari Intervensi.....	71
Tabel 12. 3. Kebebasan dari Kekerasan	71
Tabel 12. 4. Kebebasan Media Alternatif	71
Tabel 12. 5. Keragaman Pandangan	72
Tabel 12. 6. Akurat dan Berimbang	72

Tabel 12. 7. Akses atas Informasi Publik.....	72
Tabel 12. 8. Pendidikan Insan Pers.....	72
Tabel 12. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	73
Tabel 12. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	73
Tabel 12. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	74
Tabel 12. 12. Keragaman Kepemilikan	74
Tabel 12. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	74
Tabel 12. 14. Lembaga Penyiaran Publik.....	75
Tabel 12. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	75
Tabel 12. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	75
Tabel 12. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	75
Tabel 12. 18. Etika Pers	76
Tabel 12. 19. Mekanisme Pemulihan	76
Tabel 12. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	76
13. Provinsi Jawa Barat.....	77
Tabel 13. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	77
Tabel 13. 2. Kebebasan dari Intervensi.....	77
Tabel 13. 3. Kebebasan dari Kekerasan	77
Tabel 13. 4. Kebebasan Media Alternatif	78
Tabel 13. 5. Keragaman Pandangan	78
Tabel 13. 6. Akurat dan Berimbang.....	78
Tabel 13. 7. Akses atas Informasi Publik.....	78
Tabel 13. 8. Pendidikan Insan Pers.....	78
Tabel 13. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	79
Tabel 13. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	79
Tabel 13. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	80
Tabel 13. 12. Keragaman Kepemilikan	80
Tabel 13. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	80
Tabel 13. 14. Lembaga Penyiaran Publik.....	81
Tabel 13. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	81

Tabel 13. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	81
Tabel 13. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	81
Tabel 13. 18. Etika Pers	82
Tabel 13. 19. Mekanisme Pemulihan	82
Tabel 13. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	82
14. Provinsi Jawa Tengah.....	83
Tabel 14. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	83
Tabel 14. 2. Kebebasan dari Intervensi.....	83
Tabel 14. 3. Kebebasan dari Kekerasan	83
Tabel 14. 4. Kebebasan Media Alternatif	84
Tabel 14. 5. Keragaman Pandangan	84
Tabel 14. 6. Akurat dan Berimbang.....	84
Tabel 14. 7. Akses atas Informasi Publik.....	84
Tabel 14. 8. Pendidikan Insan Pers.....	84
Tabel 14. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	85
Tabel 14. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	85
Tabel 14.11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	86
Tabel 14. 12. Keragaman Kepemilikan	86
Tabel 14. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	86
Tabel 14. 14. Lembaga Penyiaran Publik.....	87
Tabel 14. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	87
Tabel 14. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	87
Tabel 14. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	87
Tabel 14. 18. Etika Pers	88
Tabel 14. 19. Mekanisme Pemulihan	88
Tabel 14. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	88
15. Provinsi Jawa Timur	89
Tabel 15. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	89
Tabel 15. 2. Kebebasan dari Intervensi.....	89
Tabel 15. 3. Kebebasan dari Kekerasan	89

Tabel 15. 4. Kebebasan Media Alternatif	90
Tabel 15. 5. Keragaman Pandangan	90
Tabel 15. 6. Akurat dan Berimbang	90
Tabel 15. 7. Akses atas Informasi Publik.....	90
Tabel 15. 8. Pendidikan Insan Pers.....	90
Tabel 15. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	91
Tabel 15. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	91
Tabel 15. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	92
Tabel 15. 12. Keragaman Kepemilikan	92
Tabel 15. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	92
Tabel 15. 14. Lembaga Penyiaran Publik	93
Tabel 15. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	93
Tabel 15. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	93
Tabel 15. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	93
Tabel 15. 18. Etika Pers	94
Tabel 15. 19. Mekanisme Pemulihan	94
Tabel 15. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	94
16. Provinsi DI Yogyakarta	95
Tabel 16. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	95
Tabel 16. 2. Kebebasan dari Intervensi.....	95
Tabel 16. 3. Kebebasan dari Kekerasan	95
Tabel 16. 4. Kebebasan Media Alternatif	96
Tabel 16. 5. Keragaman Pandangan	96
Tabel 16. 6. Akurat dan Berimbang	96
Tabel 16. 7. Akses atas Informasi Publik.....	96
Tabel 16. 8. Pendidikan Insan Pers.....	96
Tabel 16. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	97
Tabel 16. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	97
Tabel 16. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	98
Tabel 16. 12. Keragaman Kepemilikan	98

Tabel 16. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	98
Tabel 16. 14. Lembaga Penyiaran Publik.....	99
Tabel 16. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	99
Tabel 16. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	99
Tabel 16. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	99
Tabel 16. 18. Etika Pers	100
Tabel 16. 19. Mekanisme Pemulihan	100
Tabel 16. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	100
17. Provinsi Bali	101
Tabel 17. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	101
Tabel 17. 2. Kebebasan dari Intervensi.....	101
Tabel 17. 3. Kebebasan dari Kekerasan	101
Tabel 17. 4. Kebebasan Media Alternatif	102
Tabel 17. 5. Keragaman Pandangan	102
Tabel 17. 6. Akurat dan Berimbang	102
Tabel 17. 7. Akses atas Informasi Publik.....	102
Tabel 17. 8. Pendidikan Insan Pers.....	102
Tabel 17. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	103
Tabel 17. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	103
Tabel 17. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	104
Tabel 17. 12. Keragaman Kepemilikan	104
Tabel 17. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	104
Tabel 17. 14. Lembaga Penyiaran Publik.....	105
Tabel 17. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	105
Tabel 17. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	105
Tabel 17. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	106
Tabel 17. 18. Etika Pers	106
Tabel 17. 19. Mekanisme Pemulihan	106
Tabel 17. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	106
18. Provinsi Nusa Tenggara Barat	107

Tabel 18. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	107
Tabel 18. 2. Kebebasan dari Intervensi.....	107
Tabel 18. 3. Kebebasan dari Kekerasan	107
Tabel 18. 4. Kebebasan Media Alternatif	108
Tabel 18. 5. Keragaman Pandangan	108
Tabel 18. 6. Akurat dan Berimbang	108
Tabel 18. 7. Akses atas Informasi Publik.....	108
Tabel 18. 8. Pendidikan Insan Pers.....	109
Tabel 18. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	109
Tabel 18. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	109
Tabel 18. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	110
Tabel 18. 12. Keragaman Kepemilikan	110
Tabel 18. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	111
Tabel 18. 14. Lembaga Penyiaran Publik.....	111
Tabel 18. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	112
Tabel 18. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	112
Tabel 18. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	112
Tabel 18. 18. Etika Pers	112
Tabel 18. 19. Mekanisme Pemulihan	113
Tabel 18. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	113
19. Provinsi Nusa Tenggara Timur	113
Tabel 19. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	113
Tabel 19. 2. Kebebasan dari Intervensi.....	114
Tabel 19. 3. Kebebasan dari Kekerasan	114
Tabel 19. 4. Kebebasan Media Alternatif	114
Tabel 19. 5. Keragaman Pandangan	115
Tabel 19. 6. Akurat dan Berimbang	115
Tabel 19. 7. Akses atas Informasi Publik.....	115
Tabel 19. 8. Pendidikan Insan Pers.....	115
Tabel 19. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	115

Tabel 19. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	116
Tabel 19. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	116
Tabel 19. 12. Keragaman Kepemilikan	117
Tabel 19. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	117
Tabel 19. 14. Lembaga Penyiaran Publik.....	118
Tabel 19. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	118
Tabel 19. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	118
Tabel 19. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	118
Tabel 19. 18. Etika Pers	119
Tabel 19. 19. Mekanisme Pemulihan	119
Tabel 19. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	119
20. Provinsi Kalimantan Barat.....	120
Tabel 20. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	120
Tabel 20. 2. Kebebasan dari Intervensi.....	120
Tabel 20. 3. Kebebasan dari Kekerasan	120
Tabel 20. 4. Kebebasan Media Alternatif	121
Tabel 20. 5. Keragaman Pandangan	121
Tabel 20. 6. Akurat dan Berimbang.....	121
Tabel 20. 7. Akses atas Informasi Publik.....	121
Tabel 20. 8. Pendidikan Insan Pers.....	121
Tabel 20. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	122
Tabel 20. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	122
Tabel 20. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	123
Tabel 20. 12. Keragaman Kepemilikan	123
Tabel 20. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	123
Tabel 20. 14. Lembaga Penyiaran Publik	124
Tabel 20. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	124
Tabel 20. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	124
Tabel 20. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	124
Tabel 20. 18. Etika Pers	125

Tabel 20. 19. Mekanisme Pemulihan	125
Tabel 20. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	125
21. Provinsi Kalimantan Selatan	126
Tabel 21. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	126
Tabel 21. 2. Kebebasan dari Intervensi.....	126
Tabel 21. 3. Kebebasan dari Kekerasan	126
Tabel 21. 4. Kebebasan Media Alternatif	127
Tabel 21. 5. Keragaman Pandangan	127
Tabel 21. 6. Akurat dan Berimbang	127
Tabel 21. 7. Akses atas Informasi Publik.....	127
Tabel 21. 8. Pendidikan Insan Pers.....	127
Tabel 21. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	128
Tabel 21. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	128
Tabel 21. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	129
Tabel 21. 12. Keragaman Kepemilikan	129
Tabel 21. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	129
Tabel 21. 14. Lembaga Penyiaran Publik.....	130
Tabel 21. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	130
Tabel 21. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	130
Tabel 21. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	130
Tabel 21. 18. Etika Pers	131
Tabel 21. 19. Mekanisme Pemulihan	131
Tabel 21. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	131
22. Provinsi Kalimantan Tengah.....	132
Tabel 22. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	132
Tabel 22. 2. Kebebasan dari Intervensi.....	132
Tabel 22. 3. Kebebasan dari Kekerasan	132
Tabel 22. 4. Kebebasan Media Alternatif	133
Tabel 22. 5. Keragaman Pandangan	133
Tabel 22. 6. Akurat dan Berimbang	133

Tabel 22. 7. Akses atas Informasi Publik.....	133
Tabel 22. 8. Pendidikan Insan Pers.....	133
Tabel 22. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	134
Tabel 22. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	134
Tabel 22. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	135
Tabel 22. 12. Keragaman Kepemilikan	135
Tabel 22. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	135
Tabel 22. 14. Lembaga Penyiaran Publik.....	136
Tabel 22. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	136
Tabel 22. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	136
Tabel 22. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	136
Tabel 22. 18. Etika Pers	137
Tabel 22. 19. Mekanisme Pemulihan	137
Tabel 22. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	137
23. Provinsi Kalimantan Timur.....	138
Tabel 23. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	138
Tabel 23. 2. Kebebasan dari Intervensi.....	138
Tabel 23. 3. Kebebasan dari Kekerasan	138
Tabel 23. 4. Kebebasan Media Alternatif	139
Tabel 23. 5. Keragaman Pandangan	139
Tabel 23. 6. Akurat dan Berimbang.....	139
Tabel 23.7. Akses atas Informasi Publik.....	139
Tabel 23. 8. Pendidikan Insan Pers.....	139
Tabel 23. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	140
Tabel 23. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	140
Tabel 23. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	141
Tabel 23. 12. Keragaman Kepemilikan	141
Tabel 23. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	141
Tabel 23. 14. Lembaga Penyiaran Publik.....	142
Tabel 23. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	142

Tabel 23. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	142
Tabel 23. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	142
Tabel 23. 18. Etika Pers	143
Tabel 23. 19. Mekanisme Pemulihan	143
Tabel 23. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	143
24. Provinsi Kalimantan Utara	144
Tabel 24. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	144
Tabel 24. 2. Kebebasan dari Intervensi.....	144
Tabel 24. 3. Kebebasan dari Kekerasan	144
Tabel 24. 4. Kebebasan Media Alternatif	145
Tabel 24. 5. Keragaman Pandangan	145
Tabel 24. 6. Akurat dan Berimbang.....	145
Tabel 24. 7. Akses atas Informasi Publik.....	145
Tabel 24. 8. Pendidikan Insan Pers.....	145
Tabel 24. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	146
Tabel 24. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	146
Tabel 24. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	147
Tabel 24. 12. Keragaman Kepemilikan	147
Tabel 24. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	147
Tabel 24. 14. Lembaga Penyiaran Publik.....	148
Tabel 24. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	148
Tabel 24. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	148
Tabel 24. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	148
Tabel 24. 18. Etika Pers	149
Tabel 24. 19. Mekanisme Pemulihan	149
Tabel 24. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	149
25. Provinsi Sulawesi Selatan.....	150
Tabel 25. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	150
Tabel 25. 2. Kebebasan dari Intervensi.....	150
Tabel 25. 3. Kebebasan dari Kekerasan	150

Tabel 25. 4. Kebebasan Media Alternatif	151
Tabel 25. 5. Keragaman Pandangan	151
Tabel 25. 6. Akurat dan Berimbang	151
Tabel 25. 7. Akses atas Informasi Publik.....	151
Tabel 25. 8. Pendidikan Insan Pers.....	151
Tabel 25. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	152
Tabel 25. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	152
Tabel 25. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	153
Tabel 25. 12. Keragaman Kepemilikan	153
Tabel 25. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	153
Tabel 25. 14. Lembaga Penyiaran Publik	154
Tabel 25. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	154
Tabel 25. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	154
Tabel 25. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	154
Tabel 25. 18. Etika Pers	155
Tabel 25. 19. Mekanisme Pemulihan	155
Tabel 25. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	155
26. Provinsi Sulawesi Barat.....	156
Tabel 26. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	156
Tabel 26. 2. Kebebasan dari Intervensi.....	156
Tabel 26. 3. Kebebasan dari Kekerasan	156
Tabel 26. 4. Kebebasan Media Alternatif	157
Tabel 26. 5. Keragaman Pandangan	157
Tabel 26. 6. Akurat dan Berimbang	157
Tabel 26. 7. Akses atas Informasi Publik.....	157
Tabel 26. 8. Pendidikan Insan Pers.....	157
Tabel 26. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	158
Tabel 26. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	158
Tabel 26. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	159
Tabel 26. 12. Keragaman Kepemilikan	159

Tabel 26. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	159
Tabel 26. 14. Lembaga Penyiaran Publik.....	160
Tabel 26. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	160
Tabel 26. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	160
Tabel 26. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	160
Tabel 26. 18. Etika Pers	161
Tabel 26. 19. Mekanisme Pemulihan	161
Tabel 26. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	161
27. Provinsi Sulawesi Tengah.....	162
Tabel 27. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	162
Tabel 27. 2. Kebebasan dari Intervensi.....	162
Tabel 27. 3. Kebebasan dari Kekerasan	162
Tabel 27. 4. Kebebasan Media Alternatif	163
Tabel 27. 5. Keragaman Pandangan	163
Tabel 27. 6. Akurat dan Berimbang	163
Tabel 27. 7. Akses atas Informasi Publik.....	163
Tabel 27. 8. Pendidikan Insan Pers.....	163
Tabel 27. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	164
Tabel 27. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	164
Tabel 27. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	165
Tabel 27. 12. Keragaman Kepemilikan	165
Tabel 27. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	165
Tabel 27. 14. Lembaga Penyiaran Publik.....	166
Tabel 27. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	166
Tabel 27. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	166
Tabel 27. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	166
Tabel 27. 18. Etika Pers	167
Tabel 27. 19. Mekanisme Pemulihan	167
Tabel 27. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	167
28. Provinsi Sulawesi Tenggara.....	168

Tabel 28. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	168
Tabel 28. 2. Kebebasan dari Intervensi.....	168
Tabel 28. 3. Kebebasan dari Kekerasan	168
Tabel 28. 4. Kebebasan Media Alternatif	169
Tabel 28. 5. Keragaman Pandangan	169
Tabel 28. 6. Akurat dan Berimbang	169
Tabel 28. 7. Akses atas Informasi Publik.....	169
Tabel 28. 8. Pendidikan Insan Pers.....	169
Tabel 28. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	170
Tabel 28. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	170
Tabel 28. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	171
Tabel 28. 12. Keragaman Kepemilikan	171
Tabel 28. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	171
Tabel 28. 14. Lembaga Penyiaran Publik.....	172
Tabel 28. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	172
Tabel 28. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	172
Tabel 28. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	172
Tabel 28. 18. Etika Pers	173
Tabel 28. 19. Mekanisme Pemulihan	173
Tabel 28. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	173
29. Provinsi Sulawesi Utara	174
Tabel 29. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	174
Tabel 29. 2. Kebebasan dari Intervensi.....	174
Tabel 29. 3. Kebebasan dari Kekerasan	174
Tabel 29. 4. Kebebasan Media Alternatif	175
Tabel 29. 5. Keragaman Pandangan	175
Tabel 29. 6. Akurat dan Berimbang	175
Tabel 29. 7. Akses atas Informasi Publik.....	175
Tabel 29. 8. Pendidikan Insan Pers.....	175
Tabel 29. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	176

Tabel 29. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	176
Tabel 29. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	177
Tabel 29. 12. Keragaman Kepemilikan	177
Tabel 29. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	177
Tabel 29. 14. Lembaga Penyiaran Publik.....	178
Tabel 29. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	178
Tabel 29. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	178
Tabel 29. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	178
Tabel 29. 18. Etika Pers	179
Tabel 29. 19. Mekanisme Pemulihan	179
Tabel 29. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	179
30. Provinsi Gorontalo.....	180
Tabel 30. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	180
Tabel 30. 2. Kebebasan dari Intervensi.....	180
Tabel 30. 3. Kebebasan dari Kekerasan	180
Tabel 30. 4. Kebebasan Media Alternatif	181
Tabel 30. 5. Keragaman Pandangan	181
Tabel 30. 6. Akurat dan Berimbang.....	181
Tabel 30. 7. Akses atas Informasi Publik.....	181
Tabel 30. 8. Pendidikan Insan Pers.....	181
Tabel 30. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	182
Tabel 30. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	182
Tabel 30. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	183
Tabel 30. 12. Keragaman Kepemilikan	183
Tabel 30. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	183
Tabel 30. 14. Lembaga Penyiaran Publik	184
Tabel 30. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	184
Tabel 30. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	184
Tabel 30. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	184
Tabel 30. 18. Etika Pers	185

Tabel 30. 19. Mekanisme Pemulihan	185
Tabel 30. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	185
31. Provinsi Maluku	186
Tabel 31. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	186
Tabel 31. 2. Kebebasan dari Intervensi.....	186
Tabel 31. 3. Kebebasan dari Kekerasan	186
Tabel 31. 4. Kebebasan Media Alternatif	187
Tabel 31. 5. Keragaman Pandangan	187
Tabel 31. 6. Akurat dan Berimbang	187
Tabel 31. 7 Akses atas Informasi Publik.....	187
Tabel 31. 8. Pendidikan Insan Pers.....	187
Tabel 31. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	188
Tabel 31. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	188
Tabel 31. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	189
Tabel 31. 12. Keragaman Kepemilikan	189
Tabel 31. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	189
Tabel 31. 14. Lembaga Penyiaran Publik.....	190
Tabel 31. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	190
Tabel 31. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	190
Tabel 31. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	190
Tabel 31. 18. Etika Pers	191
Tabel 31. 19. Mekanisme Pemulihan	191
Tabel 31. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	191
32. Provinsi Maluku Utara	192
Tabel 32. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	192
Tabel 32. 2. Kebebasan dari Intervensi.....	192
Tabel 32. 3. Kebebasan dari Kekerasan	192
Tabel 32. 4. Kebebasan Media Alternatif	193
Tabel 32. 5. Keragaman Pandangan	193
Tabel 32. 6. Akurat dan Berimbang	193

Tabel 32. 7. Akses atas Informasi Publik.....	193
Tabel 32. 8. Pendidikan Insan Pers.....	193
Tabel 32. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	194
Tabel 32. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	194
Tabel 32. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	195
Tabel 32. 12. Keragaman Kepemilikan	195
Tabel 32. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	195
Tabel 32. 14. Lembaga Penyiaran Publik.....	196
Tabel 32. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	196
Tabel 32. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	196
Tabel 32. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	196
Tabel 32. 18. Etika Pers	197
Tabel 32. 19. Mekanisme Pemulihan	197
Tabel 32. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	197
33. Provinsi Papua	198
Tabel 33. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	198
Tabel 33. 2. Kebebasan dari Intervensi.....	198
Tabel 33. 3. Kebebasan dari Kekerasan	198
Tabel 33. 4. Kebebasan Media Alternatif	199
Tabel 33. 5. Keragaman Pandangan	199
Tabel 33. 6. Akurat dan Berimbang.....	199
Tabel 33. 7. Akses atas Informasi Publik.....	199
Tabel 33. 8. Pendidikan Insan Pers.....	199
Tabel 33. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	200
Tabel 33. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	200
Tabel 33. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	201
Tabel 33. 12. Keragaman Kepemilikan	201
Tabel 33. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	201
Tabel 33. 14. Lembaga Penyiaran Publik.....	202
Tabel 33. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	202

Tabel 33. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	202
Tabel 33. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	203
Tabel 33. 18. Etika Pers	203
Tabel 33. 19. Mekanisme Pemulihan	203
Tabel 33. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	203
34. Provinsi Papua Barat.....	204
Tabel 34. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	204
Tabel 34. 2. Kebebasan dari Intervensi.....	204
Tabel 34. 3. Kebebasan dari Kekerasan	204
Tabel 34. 4. Kebebasan Media Alternatif	205
Tabel 34. 5. Keragaman Pandangan	205
Tabel 34. 6. Akurat dan Berimbang.....	205
Tabel 34. 7. Akses atas Informasi Publik.....	206
Tabel 34. 8. Pendidikan Insan Pers.....	206
Tabel 34. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	206
Tabel 34. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	206
Tabel 34. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	207
Tabel 34. 12. Keragaman Kepemilikan	207
Tabel 34. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	208
Tabel 34. 14. Lembaga Penyiaran Publik.....	208
Tabel 34. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	209
Tabel 34. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	209
Tabel 34. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	209
Tabel 34. 18. Etika Pers	209
Tabel 34. 19. Mekanisme Pemulihan	210
Tabel 34. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	210

PRAKATA

KATA “CUKUP” YANG PATUT DISYUKURI

**MURDAN ALFA SATIAWAN
KETUA TIM PELAKSANA IKP 2019**

Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat Allah SWT. Itulah kalimat yang pantas kami ucapkan. Bukan sekedar karena atas karunia-NYA, kami telah menyelesaikan kegiatan pengukuran IKP 2019 ini, namun juga karena hasil dari IKP 2019 ini yang telah memotret peningkatan kelas IKP Indonesia dari kondisi “agak bebas” menjadi “cukup bebas”. Sebuah kata “cukup” yang patut disyukuri.

Bermula dari adanya kepercayaan dari Dewan Pers kepada kami, PT Multi Utama Risetindo, anggota dari MUC Consulting Group, untuk melaksanakan pekerjaan IKP 2019 ini. Sebuah kehormatan yang besar bagi kami. Untuk itu, kami telah berusaha menjawab kehormatan tersebut dengan usaha yang sungguh-sungguh dan profesional agar mampu menjawab harapan Dewan Pers dan stakeholders dalam mengukur dan memotret IKP 2019 secara objektif. Perjuangan lelah selama kurang lebih 4 (empat) bulan ini, akhirnya terbayar dengan hasil yang sangat menggembirakan ini. Proses yang tentu tidak selalu mulus. Tapi berkat dukungan dari semua pihak, terutama dari Dewan Pers, akhirnya kami mampu menuntaskan tanggungjawab pekerjaan ini.

Apa yang tersajikan dalam buku ini, merupakan IKP dari kondisi kemerdekaan pers pada periode Januari hingga Desember 2018. Dilaksanakan di 34 provinsi dan melibatkan 12 orang informan ahli di setiap provinsi. Ke-12 informan ahli mewakili 3 (tiga) segmen pemangku kepentingan yaitu mewakili kepentingan negara, kepentingan masyarakat dan mewakili kepentingan pengelola pers. Mereka dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh Dewan Pers untuk menjamin pendapat dan penilaian yang mereka berikan mampu menggambarkan kondisi kemerdekaan pers yang terjadi.

Hasil IKP 2019 yang disampaikan pada buku ini semoga menjadi pemacu semua pihak untuk minimal mempertahankan kemerdekaan pers yang sudah “cukup bebas” ini dan tentu akan lebih disyukuri jika mampu meningkatkan kondisi kemerdekaan pers yang telah diraih ini.

Pada kesempatan yang baik ini, kami ingin menghaturkan terima kasih yang tiada terhingga kepada Dewan Pers, Kementerian Informatika, dan semua pihak yang telah membantu kami sehingga mampu menyelesaikan tugas yang mulia ini. Kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam melaksanakan pekerjaan ini banyak ditemui kesalahan dan kekhilafan. Kami berharap apa yang kami kerjakan dan hasilnya tersaji dalam buku ini, menjadi sumbangsih kami bagi terwujudnya kemerdekaan pers yang lebih baik di Indonesia.

Sekali lagi, dari hasil IKP ini kita telah beranjak dari “agak bebas” menjadi “cukup bebas”. Sebuah kata “cukup” yang patut disyukuri. Merdeka.

Jakarta, November 2019

1. Provinsi Aceh

Tabel 1. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini?	12	70,00	95,00	89,42
2.	Sejauh mana wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	12	80,00	95,00	90,17
3.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya?	12	69,00	95,00	84,33
4.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kemerdekaan pers? Dapat dijelaskan dengan memberikan contoh kongkret program yang dijalankan dalam pemajuan kemerdekaan pers. (Meliputi freedom from dan freedom for)	12	60,00	97,00	83,92

Tabel 1. 2. Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini?	12	35,00	95,00	85,83
6.	Sejauh mana pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers?	12	80,00	95,00	89,83
7.	Sejauh mana independensi redaksi dari campur tangan pemilik media	12	69,00	89,00	77,83
8.	Sejauh mana pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan terganggu oleh kepentingan politik, ekonomi, kepentingan pemilik?	12	69,00	95,00	78,92

Tabel 1. 3. Kebebasan dari Kekerasan

Kebebasan dari Kekerasan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
9.	Sejauh mana tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan ?	12	56,00	95,00	85,25
10.	Sejauh mana wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan?	12	35,00	95,00	77,08
11.	Sejauh mana aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan?	12	60,00	95,00	83,75

Tabel 1. 4. Kebebasan Media Alternatif

Kebebasan Media Alternatif		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga?	12	35,00	95,00	80,58
13.	Sejauh mana jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers?	12	60,00	95,00	83,00

Tabel 1. 5. Keragaman Pandangan

Keragaman Pandangan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
14.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini?	12	60,00	90,00	73,83
15.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media?	12	65,00	95,00	79,00
16.	Sejauh mana pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya?	12	89,00	100,00	91,50

Tabel 1. 6. Akurat dan Berimbang

Akurat dan Berimbang		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	12	65,00	90,00	83,58
18.	Sejauh mana wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	11	75,00	95,00	86,36
19.	Seberapa seringkah pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan?	11	35,00	95,00	81,27

Tabel 1. 7. Akses atas Informasi Publik

Akses atas Informasi Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
20.	Sejauh mana terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini?	12	80,00	95,00	88,50
21.	Sejauh mana pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya?	12	60,00	90,00	84,42
22.	Sejauh mana hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers?	11	80,00	93,00	86,82
23.	Sejauh mana wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di	12	69,00	90,00	86,42

Tabel 1. 8. Pendidikan Insan Pers

Pendidikan Insan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
24.	Sejauh mana di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi?	12	35,00	92,00	82,00

Tabel 1. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
25.	Sejauh mana media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas?	12	55,00	95,00	83,00
26.	Sejauh mana pers menyediakan informasi ramah dan layak anak,	12	60,00	90,00	82,42
27.	Sejauhmana pers menyediakan informasi berperspektif gender,	12	60,00	90,00	79,92
28.	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	11	50,00	90,00	75,18
29.	Sejauh mana pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	12	35,00	89,00	72,08
30.	Sejauh mana media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)?	12	30,00	89,00	64,50

Tabel 1.10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers?	12	50,00	96,00	85,08
2.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran?	12	60,00	95,00	83,75
3.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak?	11	70,00	95,00	89,00
4.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak?	11	70,00	95,00	89,18
5.	Sejauh mana alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi?	12	60,00	90,00	80,67
6.	Seberapa besar pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui "berita berbayar"?	12	50,00	90,00	81,75
7.	Sejauh mana alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi?	12	60,00	95,00	80,83
8.	Sejauh mana kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata?	12	60,00	89,00	77,83
9.	Sejauh mana kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu?	11	55,00	90,00	78,55
10.	Sejauh mana konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan?	12	55,00	90,00	81,25

Tabel 1. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
11.	Sejauh mana perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya?	12	85,00	95,00	89,58
12.	Sejauh mana wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media?	12	65,00	95,00	83,00
13.	Sejauh mana pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media?	12	75,00	95,00	86,50
14.	Sejauh mana pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers?	12	69,00	100,00	87,58
15.	Sejauh mana situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan?	12	69,00	90,00	79,83
16.	Sejauh mana terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)?	10	69,00	90,00	81,40

Tabel 1. 12. Keragaman Kepemilikan

Keragaman Kepemilikan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)?	12	69,00	95,00	85,67

Tabel 1. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik. Yang dimaksud sebagai perusahaan pers adalah, badan usaha yang dikelola sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.	12	75,00	90,00	84,58
19.	Sejauh mana publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	11	65,00	90,00	78,64
20.	Sejauh mana wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar	11	55,00	90,00	69,18

Tabel 1. 14. Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
21.	Sejauh mana lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik?	12	65,00	95,00	86,75
22.	Sejauh mana pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik?	12	40,00	90,00	77,08
23.	Sejauh mana perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan?	12	65,00	95,00	85,00
24.	Sejauh mana fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini?	12	55,00	90,00	83,33
25.	Sejauh mana Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini?	11	60,00	90,00	82,18
26.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat?	12	55,00	90,00	85,17
27.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik?	12	75,00	90,00	85,92

Tabel 1. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)?	12	60,00	90,00	86,17
2.	Sejauh mana lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers?	12	60,00	90,00	79,58
3.	Sejauh mana peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	12	55,00	95,00	80,83
4.	Sejauh mana aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	12	60,00	95,00	85,42

Tabel 1. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya?	11	69,00	95,00	85,55

Tabel 1. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
6.	Sejauh mana peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya?	11	85,00	95,00	89,55
7.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas	12	65,00	95,00	88,08
8.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers? Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum	12	60,00	95,00	87,33
9.	Sejauh mana pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers?	12	60,00	95,00	85,67

Tabel 1. 18 Etika Pers

Etika Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
10	Sejauh mana pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers?	11	60,00	92,00	83,82
11	Sejauh mana wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik?	12	65,00	95,00	85,25

Tabel 1. 19. Mekanisme Pemulihan

Mekanisme Pemulihan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12	Sejauh mana kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen?	10	85,00	90,00	88,40
13	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen?	12	65,00	92,00	86,75
14	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen?	12	75,00	92,00	87,08
15	Sejauh mana aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan?	12	75,00	92,00	87,08
16	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum?	12	65,00	90,00	82,83
17	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana?	10	65,00	90,00	82,00

Tabel 1. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18	Sejauh mana peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra?	12	30,00	89,00	65,00

2. Provinsi Sumatera Utara

Tabel 2. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini?	12	70,00	100,00	84,58
2.	Sejauh mana wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	11	65,00	90,00	76,27
3.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya?	12	60,00	90,00	78,25
4.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kemerdekaan pers? Dapat dijelaskan dengan memberikan contoh kongkret program yang dijalankan dalam pemajuan kemerdekaan pers. (Meliputi freedom from dan freedom for)	12	60,00	90,00	77,42

Tabel 2. 2. Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini?	10	60,00	90,00	73,90
6.	Sejauh mana pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers?	11	60,00	90,00	74,82
7.	Sejauh mana independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa?	9	40,00	75,00	61,00
8.	Sejauh mana pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan terganggu oleh kepentingan politik, ekonomi, kepentingan pemilik?	12	55,00	80,00	71,58

Tabel 2. 3. Kebebasan dari Kekerasan

Kebebasan dari Kekerasan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
9.	Sejauh mana tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan ?	12	25,00	89,00	60,33
10.	Sejauh mana wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan?	12	25,00	89,00	66,67
11.	Sejauh mana aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan?	11	25,00	90,00	69,45

Tabel 2. 4. Kebebasan Media Alternatif

Kebebasan Media Alternatif		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga?	12	25,00	80,00	62,58
13.	Sejauh mana jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers?	12	56,00	100,00	78,42

Tabel 2. 5. Keragaman Pandangan

Keragaman Pandangan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
14.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini?	11	60,00	80,00	68,18
15.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media?	9	50,00	85,00	68,78
16.	Sejauh mana pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya?	12	31,00	91,00	69,25

Tabel 2. 6. Akurat dan Berimbang

Akurat dan Berimbang		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	11	56,00	100,00	80,82
18.	Sejauh mana wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	12	60,00	90,00	74,58
19.	Seberapa seringkah pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan?	12	40,00	88,00	66,67

Tabel 2. 7. Akses atas Informasi Publik

Akses atas Informasi Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
20.	Sejauh mana terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini?	11	65,00	90,00	80,36
21.	Sejauh mana pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya?	12	30,00	90,00	69,75
22.	Sejauh mana hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers?	8	50,00	100,00	79,38
23.	Sejauh mana wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di	10	70,00	100,00	78,70

Tabel 2. 8. Pendidikan Insan Pers

Pendidikan Insan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
24.	Sejauh mana di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi?	12	50,00	90,00	75,08

Tabel 2. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
25.	Sejauh mana media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas?	11	60,00	100,00	73,64
26.	Sejauh mana pers menyediakan informasi ramah dan layak anak,	12	25,00	89,00	62,42
27.	Sejauhmana pers menyediakan informasi berperspektif gender,	11	20,00	95,00	66,64
28.	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	12	20,00	100,00	67,92
29.	Sejauh mana pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	11	35,00	95,00	62,82
30.	Sejauh mana media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)?	12	55,00	100,00	75,67

Tabel 2. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers?	10	40,00	90,00	72,60
2.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran?	9	60,00	100,00	76,00
3.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak?	8	50,00	90,00	71,88
4.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak?	8	50,00	90,00	70,75
5.	Sejauh mana alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi?	10	50,00	75,00	63,60
6.	Seberapa besar pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui "berita berbayar"?	10	50,00	80,00	61,90
7.	Sejauh mana alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi?	8	20,00	80,00	58,00
8.	Sejauh mana kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata?	12	50,00	80,00	65,83
9.	Sejauh mana kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu?	11	50,00	80,00	66,82
10.	Sejauh mana konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan?	11	60,00	90,00	70,09

Tabel 2. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
11.	Sejauh mana perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya?	11	60,00	100,00	73,64
12.	Sejauh mana wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi media?	10	10,00	89,00	55,90
13.	Sejauh mana pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media?	10	10,00	70,00	54,00
14.	Sejauh mana pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers?	11	60,00	90,00	75,27
15.	Sejauh mana situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan?	10	20,00	70,00	55,80
16.	Sejauh mana terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)?	10	30,00	89,00	58,30

Tabel 2. 12. Keragaman Kepemilikan

Keragaman Kepemilikan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)?	12	60,00	100,00	77,33

Tabel 2. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik. Yang dimaksud sebagai perusahaan pers adalah, badan usaha yang dikelola sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.	12	40,00	90,00	70,08
19.	Sejauh mana publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	9	20,00	75,00	58,33
20.	Sejauh mana wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar	10	5,00	100,00	61,50

Tabel 2. 14. Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
21.	Sejauh mana lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik?	11	50,00	100,00	73,64
22.	Sejauh mana pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik?	11	40,00	100,00	67,73
23.	Sejauh mana perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan?	7	15,00	95,00	61,00
24.	Sejauh mana fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini?	11	35,00	100,00	66,73
25.	Sejauh mana Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini?	12	56,00	90,00	72,92
26.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat?	11	50,00	95,00	69,09
27.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik?	11	56,00	90,00	70,18

Tabel 2. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)?	12	35,00	80,00	63,67
2.	Sejauh mana lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers?	9	20,00	85,00	58,44
3.	Sejauh mana peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	11	20,00	80,00	56,91
4.	Sejauh mana aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	12	50,00	85,00	66,42

Tabel 2. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya?	10	10,00	90,00	66,50

Tabel 2. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
6.	Sejauh mana peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya?	11	60,00	80,00	72,18
7.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas	11	56,00	80,00	69,09
8.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers? Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum	9	60,00	80,00	70,00
9.	Sejauh mana pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers?	11	60,00	80,00	70,00

Tabel 2. 18. Etika Pers

Etika Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
10	Sejauh mana pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers?	12	40,00	90,00	74,92
11.	Sejauh mana wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik?	11	50,00	80,00	70,09

Tabel 2. 19. Mekanisme Pemulihan

Mekanisme Pemulihan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen?	11	50,00	90,00	73,82
13.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen?	9	56,00	100,00	74,44
14.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen?	10	50,00	95,00	73,60
15.	Sejauh mana aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan?	11	35,00	90,00	62,27
16.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan umum?	10	50,00	85,00	65,80
17.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana?	9	10,00	80,00	58,78

Tabel 2. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra?	10	31,00	90,00	62,30

3. Provinsi Sumatera Barat

Tabel 3. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini?	12	65,00	98,00	88,08
2.	Sejauh mana wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	12	50,00	98,00	74,42
3.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya?	12	55,00	98,00	82,75
4.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kemerdekaan pers? Dapat dijelaskan dengan memberikan contoh kongkret program yang dijalankan dalam pemajuan kemerdekaan pers. (Meliputi freedom from dan freedom for)	12	65,00	95,00	80,00

Tabel 3. 2. Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini?	11	55,00	100,00	80,00
6.	Sejauh mana pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers?	11	50,00	95,00	69,64
7.	Sejauh mana independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa?	12	50,00	95,00	72,08
8.	Sejauh mana pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan terganggu oleh kepentingan politik, ekonomi, kepentingan pemilik?	12	56,00	100,00	68,75

Tabel 3. 3. Kebebasan dari Kekerasan

Kebebasan dari Kekerasan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
9.	Sejauh mana tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan ?	12	35,00	100,00	75,25
10.	Sejauh mana wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan?	12	25,00	100,00	74,75
11.	Sejauh mana aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan?	12	60,00	100,00	80,00

Tabel 3. 4. Kebebasan Media Alternatif

Kebebasan Media Alternatif		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga?	11	30,00	94,00	71,73
13.	Sejauh mana jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers?	12	65,00	95,00	79,08

Tabel 3. 5. Keragaman Pandangan

Keragaman Pandangan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
14.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini?	12	50,00	95,00	68,08
15.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media?	11	31,00	80,00	57,64
16.	Sejauh mana pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya?	10	60,00	95,00	80,90

Tabel 3. 6. Akurat dan Berimbang

Akurat dan Berimbang		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	12	50,00	95,00	76,25
18.	Sejauh mana wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	11	60,00	95,00	72,55
19.	Seberapa seringkah pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan?	10	30,00	95,00	67,00

Tabel 3. 7. Akses atas Informasi Publik

Akses atas Informasi Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
20.	Sejauh mana terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini?	11	69,00	100,00	85,36
21.	Sejauh mana pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya?	12	56,00	100,00	77,75
22.	Sejauh mana hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers?	10	56,00	95,00	77,20
23.	Sejauh mana wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini?	10	40,00	100,00	79,90

Tabel 3. 8. Pendidikan Insan Pers

Pendidikan Insan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
24.	Sejauh mana di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi?	12	60,00	95,00	78,75

Tabel 3. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
25.	Sejauh mana media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok	12	60,00	98,00	81,92
26.	Sejauh mana pers menyediakan informasi ramah dan layak anak,	12	50,00	90,00	68,08
27.	Sejauhmana pers menyediakan informasi berperspektif gender,	11	60,00	90,00	70,91
28.	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	11	55,00	95,00	71,45
29.	Sejauh mana pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	10	56,00	75,00	64,50
30.	Sejauh mana media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)?	12	30,00	80,00	54,17

Tabel 3. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers?	12	40,00	100,00	79,17
2.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran?	10	55,00	100,00	79,70
3.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak?	11	50,00	100,00	78,18
4.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak?	11	60,00	100,00	79,09
5.	Sejauh mana alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi?	12	25,00	95,00	63,50
6.	Seberapa besar pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui "berita berbayar"?	11	25,00	80,00	58,09
7.	Sejauh mana alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi?	9	25,00	100,00	63,78
8.	Sejauh mana kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata?	11	20,00	100,00	66,82
9.	Sejauh mana kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu?	11	55,00	95,00	77,00
10.	Sejauh mana konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan?	12	58,00	95,00	77,33

Tabel 3. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
11.	Sejauh mana perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya?	12	50,00	95,00	72,92
12.	Sejauh mana wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi	10	50,00	80,00	65,00
13.	Sejauh mana pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media?	11	50,00	78,00	63,82
14.	Sejauh mana pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers?	12	55,00	95,00	75,00
15.	Sejauh mana situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan?	12	40,00	94,00	68,17
16.	Sejauh mana terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)?	12	35,00	100,00	69,17

Tabel 3. 12. Keragaman Kepemilikan

Keragaman Kepemilikan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)?	12	60,00	95,00	77,92

Tabel 3. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik. Yang dimaksud sebagai perusahaan pers adalah, badan usaha yang dikelola sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.	12	45,00	80,00	66,58
19.	Sejauh mana publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	11	31,00	80,00	60,73
20.	Sejauh mana wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers?	12	25,00	100,00	60,42

Tabel 3. 14. Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
21.	Sejauh mana lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik?	12	50,00	95,00	71,75
22.	Sejauh mana pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik?	11	60,00	95,00	74,18
23.	Sejauh mana perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan?	7	65,00	95,00	79,71
24.	Sejauh mana fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini?	12	40,00	95,00	72,17
25.	Sejauh mana Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini?	11	60,00	95,00	73,91
26.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat?	11	50,00	95,00	73,91
27.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik?	11	50,00	95,00	72,82

Tabel 3. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)?	10	50,00	100,00	75,30
2.	Sejauh mana lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers?	10	45,00	100,00	70,80
3.	Sejauh mana peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	11	55,00	92,00	73,36
4.	Sejauh mana aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	12	50,00	92,00	74,33

Tabel 3. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya?	11	55,00	95,00	80,45

Tabel 3. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
6.	Sejauh mana peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya?	10	61,00	90,00	77,60
7.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik?	8	70,00	100,00	82,75
8.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers? Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan.	9	35,00	100,00	76,67
9.	Sejauh mana pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers?	12	30,00	100,00	74,25

Tabel 3. 18. Etika Pers

Etika Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
10.	Sejauh mana pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers?	12	70,00	95,00	79,25
11.	Sejauh mana wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik?	12	50,00	100,00	73,83

Tabel 3. 19. Mekanisme Pemulihan

Mekanisme Pemulihan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen?	12	70,00	95,00	81,25
13.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen?	12	60,00	95,00	81,33
14.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen?	12	60,00	95,00	80,92
15.	Sejauh mana aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan?	12	50,00	90,00	71,42
16.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan	11	40,00	91,00	74,64
17.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana?	9	50,00	100,00	71,00

Tabel 3. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra?	9	15,00	80,00	54,44

4. Provinsi Riau

Tabel 4. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini?	12	60,00	100,00	90,83
2.	Sejauh mana wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	12	50,00	90,00	83,75
3.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya?	11	35,00	100,00	88,18
4.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kemerdekaan pers? Dapat dijelaskan dengan memberikan contoh kongkret program yang dijalankan dalam pemajuan kemerdekaan pers. (Meliputi freedom from dan freedom for)	11	70,00	100,00	92,73

Tabel 4. 2. Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini?	11	30,00	100,00	86,27
6.	Sejauh mana pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers?	12	30,00	90,00	77,83
7.	Sejauh mana independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa?	12	50,00	80,00	70,42
8.	Sejauh mana pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan terganggu oleh kepentingan politik, ekonomi, kepentingan pemilik?	12	70,00	95,00	75,00

Tabel 4. 3. Kebebasan dari Kekerasan

Kebebasan dari Kekerasan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
9.	Sejauh mana tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan ?	12	15,00	85,00	72,92
10.	Sejauh mana wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan?	12	35,00	80,00	74,17
11.	Sejauh mana aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan?	11	75,00	100,00	92,27

Tabel 4. 4 Kebebasan Media Alternatif

Kebebasan Media Alternatif		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga?	12	70,00	80,00	75,00
13.	Sejauh mana jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers?	12	70,00	100,00	90,42

Tabel 4. 5. Keragaman Pandangan

Keragaman Pandangan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
14.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini?	11	50,00	95,00	84,09
15.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media?	11	70,00	85,00	81,73
16.	Sejauh mana pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya?	11	30,00	90,00	70,45

Tabel 4. 6. Akurat dan Berimbang

Akurat dan Berimbang		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	12	40,00	85,00	79,17
18.	Sejauh mana wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	11	40,00	90,00	79,09
19.	Seberapa seringkah pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan?	12	25,00	90,00	79,58

Tabel 4. 7. Akses atas Informasi Publik

Akses atas Informasi Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
20.	Sejauh mana terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini?	11	70,00	95,00	89,09
21.	Sejauh mana pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya?	11	35,00	90,00	79,09
22.	Sejauh mana hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers?	11	70,00	100,00	90,91
23.	Sejauh mana wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini?	11	75,00	100,00	90,91

Tabel 4. 8. Pendidikan Insan Pers

Pendidikan Insan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
24.	Sejauh mana di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi?	11	65,00	90,00	84,36

Tabel 4. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
25.	Sejauh mana media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok	11	70,00	85,00	75,91
26.	Sejauh mana pers menyediakan informasi ramah dan layak anak,	11	45,00	85,00	73,18
27.	Sejauhmana pers menyediakan informasi berperspektif gender,	11	50,00	80,00	73,64
28.	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	12	70,00	85,00	81,25
29.	Sejauh mana pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	11	55,00	80,00	71,82
30.	Sejauh mana media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)?	11	25,00	75,00	45,45

Tabel 4. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers?	12	75,00	100,00	92,08
2.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran?	11	70,00	100,00	88,18
3.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak?	11	75,00	100,00	90,45
4.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak?	11	50,00	100,00	87,27
5.	Sejauh mana alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi?	11	40,00	85,00	73,64
6.	Seberapa besar pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui "berita berbayar"?	10	65,00	80,00	74,00
7.	Sejauh mana alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi?	10	65,00	75,00	73,50
8.	Sejauh mana kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata?	12	30,00	90,00	79,17
9.	Sejauh mana kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu?	11	70,00	85,00	76,36
10.	Sejauh mana konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan?	12	50,00	90,00	82,92

Tabel 4. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
11.	Sejauh mana perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya?	12	60,00	90,00	83,33
12.	Sejauh mana wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi	11	50,00	95,00	82,73
13.	Sejauh mana pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media?	11	50,00	95,00	84,09
14.	Sejauh mana pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers?	11	65,00	90,00	83,18
15.	Sejauh mana situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan?	11	40,00	90,00	79,09
16.	Sejauh mana terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)?	11	40,00	90,00	78,64

Tabel 4. 12. Keragaman Kepemilikan

Keragaman Kepemilikan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)?	11	65,00	100,00	89,55

Tabel 4. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik. Yang dimaksud sebagai perusahaan pers adalah, badan usaha yang dikelola sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.	11	50,00	75,00	60,45
19.	Sejauh mana publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	11	50,00	90,00	80,00
20.	Sejauh mana wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers?	11	35,00	70,00	46,36

Tabel 4. 14. Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
21.	Sejauh mana lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik?	11	65,00	100,00	87,27
22.	Sejauh mana pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik?	11	30,00	85,00	72,73
23.	Sejauh mana perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan?	11	50,00	100,00	87,27
24.	Sejauh mana fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini?	11	50,00	90,00	81,82
25.	Sejauh mana Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini?	11	40,00	95,00	83,64
26.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat?	11	60,00	95,00	86,36
27.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik?	11	35,00	95,00	83,18

Tabel 4. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)?	11	60,00	100,00	85,45
2.	Sejauh mana lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers?	11	50,00	90,00	79,55
3.	Sejauh mana peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	11	40,00	80,00	73,18
4.	Sejauh mana aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	11	60,00	80,00	74,09

Tabel 4. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya?	11	50,00	80,00	75,00

Tabel 4. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
6.	Sejauh mana peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya?	11	60,00	80,00	77,27
7.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik?	11	65,00	80,00	77,27
8.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memperlakukan sensor terhadap pers? Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan.	11	60,00	80,00	77,27
9.	Sejauh mana pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers?	11	40,00	85,00	76,36

Tabel 4. 18. Etika Pers

Etika Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
10.	Sejauh mana pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers?	12	70,00	90,00	81,25
11.	Sejauh mana wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik?	11	65,00	90,00	80,91

Tabel 4. 19. Mekanisme Pemulihan

Mekanisme Pemulihan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen?	11	70,00	90,00	84,55
13.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen?	12	70,00	100,00	87,92
14.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen?	11	70,00	100,00	90,00
15.	Sejauh mana aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan?	11	25,00	90,00	75,45
16.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan	11	60,00	90,00	80,45
17.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana?	11	50,00	90,00	80,00

Tabel 4. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra?	11	70,00	90,00	84,09

5. Provinsi Riau Kepulauan

Tabel 5. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini?	12	75,00	100,00	87,17
2.	Sejauh mana wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	11	55,00	100,00	85,18
3.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya?	12	56,00	90,00	77,75
4.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kemerdekaan pers? Dapat dijelaskan dengan memberikan contoh kongkret program yang dijalankan dalam pemajuan kemerdekaan pers. (Meliputi freedom from dan freedom for)	12	56,00	90,00	81,75

Tabel 5. 2. Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini?	12	75,00	100,00	86,67
6.	Sejauh mana pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers?	12	80,00	95,00	88,42
7.	Sejauh mana independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa?	11	55,00	95,00	78,36
8.	Sejauh mana pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan terganggu oleh kepentingan politik, ekonomi, kepentingan pemilik?	12	55,00	90,00	74,75

Tabel 5. 3. Kebebasan dari Kekerasan

Kebebasan dari Kekerasan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
9.	Sejauh mana tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan ?	12	69,00	95,00	80,92
10.	Sejauh mana wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan?	12	60,00	90,00	77,33
11.	Sejauh mana aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan?	12	60,00	90,00	78,58

Tabel 5. 4. Kebebasan Media Alternatif

Kebebasan Media Alternatif		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga?	11	60,00	92,00	76,91
13.	Sejauh mana jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers?	12	57,00	95,00	81,75

Tabel 5. 5. Keragaman Pandangan

Keragaman Pandangan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
14.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini?	12	40,00	85,00	69,67
15.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media?	12	40,00	90,00	73,75
16.	Sejauh mana pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya?	12	70,00	95,00	84,83

Tabel 5. 6. Akurat dan Berimbang

Akurat dan Berimbang		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	11	50,00	90,00	78,18
18.	Sejauh mana wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	11	50,00	95,00	79,73
19.	Seberapa seringkah pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan?	11	60,00	100,00	84,45

Tabel 5. 7. Akses atas Informasi Publik

Akses atas Informasi Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
20.	Sejauh mana terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini?	12	60,00	95,00	80,00
21.	Sejauh mana pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya?	12	68,00	90,00	82,25
22.	Sejauh mana hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers?	10	55,00	89,00	78,40
23.	Sejauh mana wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini?	9	80,00	90,00	85,44

Tabel 5. 8. Pendidikan Insan Pers

Pendidikan Insan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
24.	Sejauh mana di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi?	11	40,00	90,00	74,45

Tabel 5. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
25.	Sejauh mana media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok	12	50,00	95,00	82,83
26.	Sejauh mana pers menyediakan informasi ramah dan layak anak,	12	50,00	95,00	77,00
27.	Sejauhmana pers menyediakan informasi berperspektif gender,	12	50,00	95,00	75,42
28.	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	12	50,00	95,00	76,67
29.	Sejauh mana pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	11	45,00	95,00	67,73
30.	Sejauh mana media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)?	11	30,00	85,00	55,09

Tabel 5. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers?	11	40,00	100,00	85,36
2.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran?	12	55,00	100,00	77,58
3.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak?	12	40,00	100,00	81,58
4.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak?	11	70,00	100,00	84,09
5.	Sejauh mana alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi?	12	35,00	90,00	70,75
6.	Seberapa besar pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui "berita berbayar"?	12	55,00	90,00	74,92
7.	Sejauh mana alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi?	7	55,00	90,00	74,29
8.	Sejauh mana kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata?	12	40,00	96,00	71,83
9.	Sejauh mana kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu?	12	50,00	100,00	82,83
10.	Sejauh mana konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan?	12	50,00	99,00	76,08

Tabel 5. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
11.	Sejauh mana perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya?	12	55,00	95,00	80,42
12.	Sejauh mana wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi	12	40,00	95,00	73,75
13.	Sejauh mana pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media?	11	35,00	97,00	67,45
14.	Sejauh mana pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers?	12	55,00	90,00	76,67
15.	Sejauh mana situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan?	11	55,00	85,00	71,00
16.	Sejauh mana terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)?	11	55,00	99,00	78,91

Tabel 5. 12. Keragaman Kepemilikan

Keragaman Kepemilikan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)?	12	70,00	100,00	84,92

Tabel 5. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik. Yang dimaksud sebagai perusahaan pers adalah, badan usaha yang dikelola sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.	12	66,00	85,00	78,00
19.	Sejauh mana publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	12	55,00	85,00	69,92
20.	Sejauh mana wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers?	11	30,00	90,00	66,18

Tabel 5. 14. Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
21.	Sejauh mana lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik?	11	56,00	90,00	81,27
22.	Sejauh mana pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik?	12	30,00	90,00	71,08
23.	Sejauh mana perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan?	10	15,00	90,00	73,00
24.	Sejauh mana fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini?	12	15,00	90,00	71,33
25.	Sejauh mana Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini?	12	40,00	90,00	70,67
26.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat?	11	35,00	90,00	71,09
27.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik?	11	55,00	85,00	70,73

Tabel 5. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)?	10	60,00	90,00	76,60
2.	Sejauh mana lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers?	8	75,00	90,00	83,25
3.	Sejauh mana peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	8	30,00	87,00	66,75
4.	Sejauh mana aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	11	70,00	90,00	81,18

Tabel 5. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya?	6	30,00	90,00	66,83

Tabel 5. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
6.	Sejauh mana peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya?	6	30,00	90,00	76,67
7.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik?	5	75,00	90,00	87,00
8.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memperlakukan sensor terhadap pers? Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan.	5	75,00	90,00	86,80
9.	Sejauh mana pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers?	11	40,00	94,00	80,09

Tabel 5. 18. Etika Pers

Etika Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
10.	Sejauh mana pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers?	11	55,00	85,00	74,73
11.	Sejauh mana wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik?	12	56,00	90,00	78,50

Tabel 5. 19. Mekanisme Pemulihan

Mekanisme Pemulihan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen?	6	80,00	90,00	83,33
13.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen?	8	70,00	95,00	78,75
14.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen?	8	69,00	95,00	79,25
15.	Sejauh mana aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan?	9	40,00	98,00	75,33
16.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan	8	40,00	98,00	80,00
17.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana?	6	35,00	90,00	77,33

Tabel 5. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra?	6	30,00	70,00	52,17

6. Provinsi Jambi

Tabel 6. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini?	12	65,00	100,00	86,17
2.	Sejauh mana wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	11	40,00	100,00	81,73
3.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya?	12	56,00	100,00	76,33
4.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kemerdekaan pers? Dapat dijelaskan dengan memberikan contoh kongkret program yang dijalankan dalam pemajuan kemerdekaan pers. (Meliputi freedom from dan freedom for)	12	55,00	95,00	77,42

Tabel 6. 2. Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini?	12	31,00	100,00	77,42
6.	Sejauh mana pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers?	12	56,00	100,00	82,42
7.	Sejauh mana independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa?	12	30,00	100,00	69,92
8.	Sejauh mana pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan terganggu oleh kepentingan politik, ekonomi, kepentingan pemilik?	12	30,00	100,00	72,00

Tabel 6. 3. Kebebasan dari Kekerasan

Kebebasan dari Kekerasan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
9.	Sejauh mana tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan ?	12	30,00	90,00	68,75
10.	Sejauh mana wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan?	12	50,00	100,00	74,33
11.	Sejauh mana aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan?	11	30,00	95,00	71,82

Tabel 6. 4. Kebebasan Media Alternatif

Kebebasan Media Alternatif		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga?	11	30,00	100,00	69,18
13.	Sejauh mana jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers?	11	50,00	100,00	75,82

Tabel 6. 5. Keragaman Pandangan

Keragaman Pandangan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
14.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini?	11	35,00	89,00	66,27
15.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media?	11	56,00	100,00	75,00
16.	Sejauh mana pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya?	10	56,00	90,00	80,50

Tabel 6. 6. Akurat dan Berimbang

Akurat dan Berimbang		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	12	65,00	100,00	78,67
18.	Sejauh mana wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	12	69,00	100,00	80,25
19.	Seberapa seringkah pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan?	12	55,00	100,00	76,25

Tabel 6. 7. Akses atas Informasi Publik

Akses atas Informasi Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
20.	Sejauh mana terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini?	12	55,00	100,00	77,75
21.	Sejauh mana pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya?	12	50,00	100,00	75,17
22.	Sejauh mana hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers?	9	56,00	95,00	76,67
23.	Sejauh mana wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini?	10	69,00	100,00	79,90

Tabel 6. 8. Pendidikan Insan Pers

Pendidikan Insan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
24.	Sejauh mana di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi?	11	55,00	100,00	74,91

Tabel 6. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
25.	Sejauh mana media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok	12	30,00	100,00	70,00
26.	Sejauh mana pers menyediakan informasi ramah dan layak anak,	12	30,00	100,00	68,75
27.	Sejauhmana pers menyediakan informasi berperspektif gender,	11	30,00	95,00	65,91
28.	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	12	30,00	100,00	69,58
29.	Sejauh mana pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	10	30,00	100,00	67,20
30.	Sejauh mana media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)?	10	30,00	95,00	59,10

Tabel 6. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers?	12	56,00	100,00	84,08
2.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran?	12	56,00	100,00	80,00
3.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak?	12	60,00	100,00	81,50
4.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak?	11	60,00	100,00	80,36
5.	Sejauh mana alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi?	12	30,00	100,00	65,00
6.	Seberapa besar pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui "berita berbayar"?	12	50,00	100,00	67,17
7.	Sejauh mana alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi?	9	30,00	80,00	63,56
8.	Sejauh mana kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata?	10	50,00	80,00	67,40
9.	Sejauh mana kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu?	10	30,00	85,00	68,30
10.	Sejauh mana konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan?	11	65,00	100,00	79,45

Tabel 6. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
11.	Sejauh mana perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya?	12	65,00	100,00	79,33
12.	Sejauh mana wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi	11	40,00	80,00	60,55
13.	Sejauh mana pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media?	11	30,00	80,00	60,45
14.	Sejauh mana pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers?	12	30,00	100,00	69,58
15.	Sejauh mana situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan?	11	30,00	80,00	59,00
16.	Sejauh mana terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)?	11	50,00	100,00	67,45

Tabel 6. 12. Keragaman Kepemilikan

Keragaman Kepemilikan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)?	12	60,00	100,00	74,08

Tabel 6. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik. Yang dimaksud sebagai perusahaan pers adalah, badan usaha yang dikelola sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.	12	50,00	100,00	71,67
19.	Sejauh mana publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	11	30,00	100,00	64,18
20.	Sejauh mana wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers?	11	30,00	100,00	70,91

Tabel 6. 14. Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
21.	Sejauh mana lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik?	12	55,00	100,00	75,17
22.	Sejauh mana pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik?	10	50,00	90,00	66,20
23.	Sejauh mana perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan?	10	60,00	90,00	74,40
24.	Sejauh mana fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini?	12	35,00	100,00	70,75
25.	Sejauh mana Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini?	10	50,00	100,00	74,90
26.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat?	11	50,00	90,00	74,09
27.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik?	11	50,00	90,00	67,82

Tabel 6. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)?	8	55,00	80,00	70,75
2.	Sejauh mana lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers?	10	50,00	100,00	71,60
3.	Sejauh mana peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	11	30,00	80,00	63,64
4.	Sejauh mana aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	12	35,00	100,00	67,50

Tabel 6. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya?	12	30,00	100,00	69,17

Tabel 6. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
6.	Sejauh mana peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya?	10	55,00	90,00	69,20
7.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik?	8	60,00	90,00	74,13
8.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers? Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan.	9	50,00	90,00	68,56
9.	Sejauh mana pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers?	9	50,00	80,00	66,44

Tabel 6. 18. Etika Pers

Etika Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
10.	Sejauh mana pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers?	12	55,00	100,00	76,08
11.	Sejauh mana wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik?	12	50,00	100,00	73,67

Tabel 6. 19. Mekanisme Pemulihan

Mekanisme Pemulihan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen?	7	40,00	90,00	71,43
13.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen?	10	55,00	90,00	71,90
14.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen?	10	56,00	95,00	76,50
15.	Sejauh mana aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan?	10	50,00	80,00	66,50
16.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan	8	55,00	80,00	66,25
17.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana?	8	60,00	80,00	69,25

Tabel 6. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra?	10	30,00	90,00	59,00

7. Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 7. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini?	12	70,00	90,00	79,58
2.	Sejauh mana wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	11	70,00	90,00	79,91
3.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya?	12	50,00	90,00	69,92
4.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kemerdekaan pers? Dapat dijelaskan dengan memberikan contoh kongkret program yang dijalankan dalam pemajuan kemerdekaan pers. (Meliputi freedom from dan freedom for)	11	50,00	100,00	76,82

Tabel 7. 2. Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini?	12	56,00	95,00	82,17
6.	Sejauh mana pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers?	12	56,00	90,00	79,17
7.	Sejauh mana independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa?	12	31,00	90,00	67,17
8.	Sejauh mana pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan terganggu oleh kepentingan politik, ekonomi, kepentingan pemilik?	12	31,00	90,00	67,17

Tabel 7. 3. Kebebasan dari Kekerasan

Kebebasan dari Kekerasan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
9.	Sejauh mana tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan ?	12	50,00	90,00	77,08
10.	Sejauh mana wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan?	10	56,00	90,00	76,50
11.	Sejauh mana aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan?	11	55,00	90,00	79,09

Tabel 7. 4. Kebebasan Media Alternatif

Kebebasan Media Alternatif		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga?	12	55,00	90,00	75,33
13.	Sejauh mana jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers?	12	50,00	95,00	75,75

Tabel 7. 5. Keragaman Pandangan

Keragaman Pandangan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
14.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini?	12	50,00	95,00	77,83
15.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media?	11	55,00	90,00	74,18
16.	Sejauh mana pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya?	12	30,00	90,00	75,83

Tabel 7. 6. Akurat dan Berimbang

Akurat dan Berimbang		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	12	60,00	90,00	77,00
18.	Sejauh mana wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	11	30,00	90,00	69,45
19.	Seberapa seringkah pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan?	10	30,00	90,00	71,20

Tabel 7. 7. Akses atas Informasi Publik

Akses atas Informasi Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
20.	Sejauh mana terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini?	12	56,00	95,00	81,58
21.	Sejauh mana pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya?	12	55,00	95,00	77,75
22.	Sejauh mana hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers?	8	50,00	95,00	75,50
23.	Sejauh mana wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini?	10	60,00	95,00	85,40

Tabel 7. 8. Pendidikan Insan Pers

Pendidikan Insan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
24.	Sejauh mana di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi?	11	55,00	95,00	79,91

Tabel 7. 9. Kestaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Kestaraan Akses bagi Kelompok Rentan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
25.	Sejauh mana media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok	12	50,00	91,00	73,67
26.	Sejauh mana pers menyediakan informasi ramah dan layak anak,	12	56,00	89,00	75,75
27.	Sejauhmana pers menyediakan informasi berperspektif gender,	10	60,00	90,00	76,40
28.	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	11	56,00	85,00	70,55
29.	Sejauh mana pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	10	60,00	89,00	72,90
30.	Sejauh mana media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)?	11	40,00	90,00	58,73

Tabel 7. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers?	11	56,00	90,00	76,36
2.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran?	11	50,00	92,00	73,00
3.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak?	10	69,00	90,00	80,60
4.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak?	10	56,00	90,00	79,30
5.	Sejauh mana alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi?	10	30,00	90,00	67,40
6.	Seberapa besar pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui "berita berbayar"?	10	30,00	90,00	66,40
7.	Sejauh mana alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi?	11	30,00	85,00	64,27
8.	Sejauh mana kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata?	11	30,00	85,00	66,36
9.	Sejauh mana kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu?	10	30,00	85,00	68,00
10.	Sejauh mana konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan?	11	50,00	95,00	78,09

Tabel 7. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
11.	Sejauh mana perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya?	11	30,00	90,00	72,73
12.	Sejauh mana wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi	11	30,00	90,00	58,82
13.	Sejauh mana pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media?	11	30,00	85,00	61,18
14.	Sejauh mana pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers?	12	50,00	95,00	78,17
15.	Sejauh mana situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan?	11	20,00	85,00	64,27
16.	Sejauh mana terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)?	9	30,00	85,00	69,44

Tabel 7. 12. Keragaman Kepemilikan

Keragaman Kepemilikan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)?	12	70,00	92,00	80,08

Tabel 7. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik. Yang dimaksud sebagai perusahaan pers adalah, badan usaha yang dikelola sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.	11	20,00	93,00	72,55
19.	Sejauh mana publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	9	55,00	90,00	72,67
20.	Sejauh mana wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers?	9	50,00	89,00	67,22

Tabel 7. 14. Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
21.	Sejauh mana lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik?	12	20,00	90,00	73,67
22.	Sejauh mana pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik?	11	50,00	94,00	76,64
23.	Sejauh mana perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan?	10	69,00	90,00	79,30
24.	Sejauh mana fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini?	12	56,00	94,00	73,58
25.	Sejauh mana Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini?	10	30,00	95,00	70,90
26.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat?	10	56,00	90,00	72,50
27.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik?	7	60,00	100,00	77,71

Tabel 7. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)?	11	69,00	96,00	79,00
2.	Sejauh mana lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers?	9	56,00	80,00	71,00
3.	Sejauh mana peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	10	70,00	89,00	78,80
4.	Sejauh mana aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	11	56,00	85,00	73,73

Tabel 7. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya?	11	70,00	90,00	79,55

Tabel 7. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
6.	Sejauh mana peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya?	10	56,00	90,00	75,50
7.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik?	11	40,00	90,00	70,55
8.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers? Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan.	11	56,00	90,00	73,45
9.	Sejauh mana pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers?	11	50,00	89,00	73,00

Tabel 7. 18. Etika Pers

Etika Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
10.	Sejauh mana pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers?	11	50,00	90,00	76,73
11.	Sejauh mana wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik?	12	65,00	90,00	78,92

Tabel 7. 19. Mekanisme Pemulihan

Mekanisme Pemulihan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen?	10	55,00	90,00	76,00
13.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen?	10	56,00	90,00	75,20
14.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen?	10	56,00	100,00	74,00
15.	Sejauh mana aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan?	10	70,00	95,00	80,40
16.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan	9	56,00	92,00	77,33
17.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana?	8	69,00	90,00	75,50

Tabel 7. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra?	11	30,00	90,00	64,64

8. Provinsi Bengkulu

Tabel 8. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini?	12	31,00	100,00	81,00
2.	Sejauh mana wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	11	69,00	90,00	81,73
3.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya?	12	70,00	90,00	80,83
4.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kemerdekaan pers? Dapat dijelaskan dengan memberikan contoh kongkret program yang dijalankan dalam pemajuan kemerdekaan pers. (Meliputi freedom from dan freedom for)	12	70,00	93,00	81,08

Tabel 8. 2. Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini?	11	69,00	100,00	83,36
6.	Sejauh mana pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers?	11	69,00	100,00	81,27
7.	Sejauh mana independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa?	12	31,00	85,00	67,50
8.	Sejauh mana pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan terganggu oleh kepentingan politik, ekonomi, kepentingan pemilik?	12	31,00	80,00	65,50

Tabel 8. 3. Kebebasan dari Kekerasan

Kebebasan dari Kekerasan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
9.	Sejauh mana tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan ?	10	60,00	95,00	79,50
10.	Sejauh mana wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan?	10	65,00	90,00	75,50
11.	Sejauh mana aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan?	10	69,00	100,00	79,40

Tabel 8. 4. Kebebasan Media Alternatif

Kebebasan Media Alternatif		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga?	10	35,00	100,00	76,00
13.	Sejauh mana jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers?	11	35,00	100,00	73,55

Tabel 8. 5. Keragaman Pandangan

Keragaman Pandangan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
14.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini?	12	20,00	100,00	71,58
15.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media?	12	56,00	100,00	78,33
16.	Sejauh mana pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya?	10	70,00	100,00	81,80

Tabel 8. 6. Akurat dan Berimbang

Akurat dan Berimbang		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	12	50,00	100,00	70,08
18.	Sejauh mana wartawan (jajaran redaksi) memperlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	11	40,00	85,00	67,73
19.	Seberapa seringkah pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan?	10	50,00	80,00	68,40

Tabel 8. 7. Akses atas Informasi Publik

Akses atas Informasi Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
20.	Sejauh mana terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini?	12	35,00	100,00	80,33
21.	Sejauh mana pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya?	11	50,00	100,00	78,73
22.	Sejauh mana hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers?	7	60,00	90,00	77,86
23.	Sejauh mana wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini?	11	70,00	90,00	82,09

Tabel 8. 8. Pendidikan Insan Pers

Pendidikan Insan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
24.	Sejauh mana di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi?	12	56,00	100,00	76,67

Tabel 8. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
25.	Sejauh mana media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok	12	35,00	100,00	71,00
26.	Sejauh mana pers menyediakan informasi ramah dan layak anak,	12	20,00	100,00	66,42
27.	Sejauhmana pers menyediakan informasi berperspektif gender,	12	28,00	100,00	70,08
28.	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	11	28,00	100,00	69,00
29.	Sejauh mana pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	12	15,00	100,00	69,75
30.	Sejauh mana media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)?	12	10,00	80,00	56,33

Tabel 8. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers?	12	70,00	100,00	82,08
2.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran?	12	35,00	100,00	77,33
3.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak?	11	60,00	100,00	80,45
4.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak?	11	70,00	100,00	80,91
5.	Sejauh mana alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi?	11	55,00	100,00	78,73
6.	Seberapa besar pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui "berita berbayar"?	11	40,00	92,00	77,36
7.	Sejauh mana alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi?	8	65,00	91,00	76,38
8.	Sejauh mana kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata?	12	55,00	100,00	71,08
9.	Sejauh mana kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu?	11	50,00	100,00	73,09
10.	Sejauh mana konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan?	10	35,00	100,00	69,10

Tabel 8. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
11.	Sejauh mana perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya?	11	30,00	100,00	66,82
12.	Sejauh mana wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi	10	33,00	100,00	66,20
13.	Sejauh mana pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media?	10	33,00	100,00	68,40
14.	Sejauh mana pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers?	11	55,00	100,00	76,64
15.	Sejauh mana situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan?	11	55,00	90,00	71,55
16.	Sejauh mana terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)?	10	55,00	90,00	73,40

Tabel 8. 12. Keragaman Kepemilikan

Keragaman Kepemilikan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)?	11	65,00	100,00	78,55

Tabel 8. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik. Yang dimaksud sebagai perusahaan pers adalah, badan usaha yang dikelola sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.	12	60,00	100,00	74,25
19.	Sejauh mana publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	10	30,00	100,00	70,10
20.	Sejauh mana wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers?	10	31,00	100,00	68,10

Tabel 8. 14. Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
21.	Sejauh mana lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik?	12	56,00	100,00	75,83
22.	Sejauh mana pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik?	12	55,00	100,00	76,33
23.	Sejauh mana perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan?	11	65,00	100,00	79,64
24.	Sejauh mana fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini?	12	30,00	100,00	73,33
25.	Sejauh mana Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini?	11	60,00	100,00	77,82
26.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat?	11	60,00	100,00	76,82
27.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik?	9	56,00	100,00	76,56

Tabel 8. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)?	10	69,00	100,00	78,90
2.	Sejauh mana lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers?	7	70,00	100,00	80,00
3.	Sejauh mana peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	10	30,00	100,00	72,10
4.	Sejauh mana aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	11	40,00	100,00	72,45

Tabel 8. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya?	11	30,00	100,00	74,09

Tabel 8. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
6.	Sejauh mana peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya?	10	65,00	100,00	81,10
7.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik?	10	65,00	100,00	81,80
8.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memperlakukan sensor terhadap pers? Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan.	10	55,00	100,00	75,50
9.	Sejauh mana pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers?	8	55,00	100,00	78,63

Tabel 8. 18. Etika Pers

Etika Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
10.	Sejauh mana pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers?	12	56,00	100,00	76,50
11.	Sejauh mana wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik?	12	65,00	100,00	77,00

Tabel 8. 19. Mekanisme Pemulihan

Mekanisme Pemulihan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen?	8	70,00	100,00	84,38
13.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen?	10	56,00	99,00	78,20
14.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen?	9	60,00	100,00	77,56
15.	Sejauh mana aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan?	8	60,00	100,00	79,75
16.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan	6	65,00	100,00	82,83
17.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana?	7	70,00	96,00	81,57

Tabel 8. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra?	10	20,00	100,00	64,90

9. Provinsi Lampung

Tabel 9. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini?	12	60,00	95,00	79,92
2.	Sejauh mana wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	10	50,00	95,00	70,50
3.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya?	12	50,00	95,00	71,00
4.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kemerdekaan pers? Dapat dijelaskan dengan memberikan contoh kongkret program yang dijalankan dalam pemajuan kemerdekaan pers. (Meliputi freedom from dan freedom for)	11	30,00	90,00	68,64

Tabel 9. 2. Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini?	8	75,00	90,00	83,13
6.	Sejauh mana pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers?	10	30,00	80,00	67,00
7.	Sejauh mana independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa?	11	30,00	90,00	65,91
8.	Sejauh mana pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan terganggu oleh kepentingan politik, ekonomi, kepentingan pemilik?	12	50,00	90,00	71,75

Tabel 9. 3. Kebebasan dari Kekerasan

Kebebasan dari Kekerasan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
9.	Sejauh mana tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan ?	12	31,00	90,00	71,42
10.	Sejauh mana wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan?	11	56,00	90,00	72,36
11.	Sejauh mana aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan?	10	50,00	90,00	73,50

Tabel 9. 4. Kebebasan Media Alternatif

Kebebasan Media Alternatif		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga?	10	31,00	90,00	64,70
13.	Sejauh mana jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers?	10	56,00	85,00	70,60

Tabel 9. 5. Keragaman Pandangan

Keragaman Pandangan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
14.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini?	11	30,00	85,00	57,91
15.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media?	10	31,00	90,00	64,70
16.	Sejauh mana pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya?	10	15,00	95,00	71,10

Tabel 9. 6. Akurat dan Berimbang

Akurat dan Berimbang		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	11	40,00	90,00	67,45
18.	Sejauh mana wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	10	56,00	100,00	74,60
19.	Seberapa seringkah pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan?	12	56,00	90,00	71,92

Tabel 9. 7. Akses atas Informasi Publik

Akses atas Informasi Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
20.	Sejauh mana terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini?	12	55,00	90,00	76,75
21.	Sejauh mana pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya?	12	31,00	90,00	69,75
22.	Sejauh mana hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers?	7	31,00	80,00	67,29
23.	Sejauh mana wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini?	5	70,00	90,00	86,00

Tabel 9. 8. Pendidikan Insan Pers

Pendidikan Insan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
24.	Sejauh mana di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi?	12	10,00	90,00	63,50

Tabel 9. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
25.	Sejauh mana media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok	11	31,00	90,00	66,00
26.	Sejauh mana pers menyediakan informasi ramah dan layak anak,	11	31,00	90,00	63,45
27.	Sejauhmana pers menyediakan informasi berperspektif gender,	12	31,00	90,00	57,00
28.	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	12	31,00	90,00	69,33
29.	Sejauh mana pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	11	31,00	80,00	58,82
30.	Sejauh mana media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)?	11	31,00	90,00	48,09

Tabel 9. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers?	10	70,00	100,00	82,50
2.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran?	9	50,00	95,00	76,11
3.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak?	6	56,00	80,00	72,67
4.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak?	10	56,00	95,00	75,10
5.	Sejauh mana alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi?	12	31,00	90,00	68,92
6.	Seberapa besar pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui "berita berbayar"?	10	65,00	100,00	84,00
7.	Sejauh mana alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi?	7	31,00	90,00	75,86
8.	Sejauh mana kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata?	12	25,00	90,00	61,50
9.	Sejauh mana kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu?	11	40,00	90,00	62,45
10.	Sejauh mana konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan?	12	56,00	86,00	70,67

Tabel 9. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
11.	Sejauh mana perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya?	12	50,00	90,00	71,42
12.	Sejauh mana wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi	12	31,00	90,00	61,83
13.	Sejauh mana pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media?	11	31,00	90,00	63,73
14.	Sejauh mana pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers?	12	31,00	100,00	73,00
15.	Sejauh mana situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan?	12	31,00	90,00	63,58
16.	Sejauh mana terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)?	12	31,00	100,00	73,92

Tabel 9. 12. Keragaman Kepemilikan

Keragaman Kepemilikan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)?	11	56,00	90,00	78,27

Tabel 9. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik. Yang dimaksud sebagai perusahaan pers adalah, badan usaha yang dikelola sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.	12	30,00	90,00	66,42
19.	Sejauh mana publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	12	31,00	85,00	61,00
20.	Sejauh mana wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers?	11	10,00	75,00	42,64

Tabel 9. 14. Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
21.	Sejauh mana lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik?	12	60,00	95,00	76,67
22.	Sejauh mana pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik?	11	31,00	90,00	62,45
23.	Sejauh mana perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan?	10	50,00	90,00	72,10
24.	Sejauh mana fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini?	12	31,00	90,00	62,58
25.	Sejauh mana Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini?	10	56,00	90,00	72,50
26.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat?	11	31,00	75,00	58,91
27.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik?	7	31,00	70,00	62,86

Tabel 9. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)?	6	50,00	80,00	64,50
2.	Sejauh mana lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers?	8	31,00	80,00	58,38
3.	Sejauh mana peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	12	30,00	75,00	54,67
4.	Sejauh mana aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	12	31,00	90,00	67,25

Tabel 9. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya?	10	31,00	80,00	62,80

Tabel 9. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
6.	Sejauh mana peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya?	11	70,00	90,00	76,82
7.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik?	10	70,00	95,00	79,50
8.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers? Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan.	11	50,00	100,00	78,18
9.	Sejauh mana pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers?	10	56,00	95,00	77,10

Tabel 9. 18. Etika Pers

Etika Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
10.	Sejauh mana pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers?	10	31,00	90,00	70,10
11.	Sejauh mana wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik?	11	31,00	90,00	64,18

Tabel 9. 19. Mekanisme Pemulihan

Mekanisme Pemulihan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen?	7	30,00	90,00	76,43
13.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen?	9	56,00	90,00	72,89
14.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen?	7	50,00	80,00	64,57
15.	Sejauh mana aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan?	10	30,00	90,00	59,10
16.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan	8	60,00	80,00	71,25
17.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana?	6	60,00	80,00	69,17

Tabel 9. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra?	12	10,00	90,00	44,75

10. Provinsi Bangka Belitung

Tabel 10. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini?	12	60,00	100,00	85,42
2.	Sejauh mana wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	12	70,00	100,00	85,08
3.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya?	12	55,00	92,00	77,50
4.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kemerdekaan pers? Dapat dijelaskan dengan memberikan contoh kongkret program yang dijalankan dalam pemajuan kemerdekaan pers. (Meliputi freedom from dan freedom for)	11	50,00	100,00	78,45

Tabel 10. 2. Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini?	10	35,00	100,00	80,30
6.	Sejauh mana pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers?	10	39,00	92,00	76,70
7.	Sejauh mana independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa?	12	55,00	90,00	74,58
8.	Sejauh mana pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan terganggu oleh kepentingan politik, ekonomi, kepentingan pemilik?	12	50,00	90,00	73,83

Tabel 10. 3. Kebebasan dari Kekerasan

Kebebasan dari Kekerasan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
9.	Sejauh mana tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan ?	10	33,00	95,00	72,80
10.	Sejauh mana wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan?	9	40,00	95,00	72,67
11.	Sejauh mana aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan?	12	56,00	90,00	79,33

Tabel 10. 4. Kebebasan Media Alternatif

Kebebasan Media Alternatif		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga?	12	50,00	95,00	71,33
13.	Sejauh mana jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers?	12	50,00	94,00	76,25

Tabel 10. 5. Keragaman Pandangan

Keragaman Pandangan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
14.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini?	12	56,00	95,00	72,75
15.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media?	12	50,00	89,00	70,83
16.	Sejauh mana pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya?	9	70,00	95,00	82,78

Tabel 10. 6. Akurat dan Berimbang

Akurat dan Berimbang		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	12	56,00	90,00	77,42
18.	Sejauh mana wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	10	56,00	85,00	73,20
19.	Seberapa seringkah pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan?	12	56,00	95,00	75,92

Tabel 10. 7. Akses atas Informasi Publik

Akses atas Informasi Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
20.	Sejauh mana terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini?	12	56,00	95,00	79,50
21.	Sejauh mana pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya?	12	58,00	92,00	78,33
22.	Sejauh mana hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers?	8	50,00	90,00	70,50
23.	Sejauh mana wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini?	11	56,00	100,00	77,55

Tabel 10. 8. Pendidikan Insan Pers

Pendidikan Insan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
24.	Sejauh mana di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi?	12	56,00	100,00	78,50

Tabel 10. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
25.	Sejauh mana media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok	12	30,00	90,00	75,75
26.	Sejauh mana pers menyediakan informasi ramah dan layak anak,	12	60,00	90,00	77,67
27.	Sejauhmana pers menyediakan informasi berperspektif gender,	12	56,00	90,00	71,50
28.	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	11	31,00	90,00	66,64
29.	Sejauh mana pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	11	57,00	90,00	71,27
30.	Sejauh mana media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)?	12	35,00	80,00	59,58

Tabel 10. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers?	12	65,00	100,00	83,58
2.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran?	11	65,00	100,00	83,00
3.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak?	10	50,00	90,00	77,50
4.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak?	11	50,00	95,00	77,27
5.	Sejauh mana alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi?	12	31,00	90,00	68,42
6.	Seberapa besar pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui "berita berbayar"?	11	56,00	90,00	76,09
7.	Sejauh mana alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi?	12	20,00	92,00	74,75
8.	Sejauh mana kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata?	12	56,00	92,00	75,42
9.	Sejauh mana kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu?	12	56,00	90,00	76,17
10.	Sejauh mana konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan?	11	50,00	90,00	75,18

Tabel 10. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
11.	Sejauh mana perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya?	12	50,00	90,00	74,25
12.	Sejauh mana wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi	10	50,00	93,00	73,10
13.	Sejauh mana pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media?	10	59,00	93,00	74,10
14.	Sejauh mana pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers?	12	57,00	100,00	77,75
15.	Sejauh mana situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan?	11	35,00	90,00	66,73
16.	Sejauh mana terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)?	12	56,00	90,00	74,42

Tabel 10. 12. Keragaman Kepemilikan

Keragaman Kepemilikan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)?	12	59,00	90,00	78,17

Tabel 10. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik. Yang dimaksud sebagai perusahaan pers adalah, badan usaha yang dikelola sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.	10	58,00	90,00	77,90
19.	Sejauh mana publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	12	10,00	90,00	69,58
20.	Sejauh mana wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers?	10	50,00	85,00	69,30

Tabel 10. 14. Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
21.	Sejauh mana lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik?	12	30,00	95,00	76,58
22.	Sejauh mana pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik?	12	60,00	90,00	75,42
23.	Sejauh mana perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan?	12	58,00	90,00	75,92
24.	Sejauh mana fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini?	12	56,00	95,00	75,00
25.	Sejauh mana Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini?	9	65,00	90,00	78,11
26.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat?	12	50,00	95,00	69,67
27.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik?	10	50,00	90,00	70,50

Tabel 10. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)?	8	55,00	90,00	75,75
2.	Sejauh mana lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers?	10	56,00	90,00	76,20
3.	Sejauh mana peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	12	55,00	92,00	74,50
4.	Sejauh mana aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	12	60,00	95,00	81,50

Tabel 10. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya?	10	40,00	100,00	77,60

Tabel 10. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
6.	Sejauh mana peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya?	8	40,00	90,00	76,88
7.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik?	7	40,00	90,00	77,86
8.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers? Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan.	8	60,00	90,00	79,00
9.	Sejauh mana pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers?	8	60,00	90,00	78,75

Tabel 10. 18. Etika Pers

Etika Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
10.	Sejauh mana pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers?	11	56,00	95,00	74,36
11.	Sejauh mana wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik?	12	60,00	90,00	77,83

Tabel 10. 19. Mekanisme Pemulihan

Mekanisme Pemulihan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen?	8	70,00	90,00	80,88
13.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen?	11	50,00	98,00	74,27
14.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen?	9	50,00	92,00	74,22
15.	Sejauh mana aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan?	7	56,00	92,00	74,43
16.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan	6	60,00	90,00	76,33
17.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana?	6	60,00	90,00	78,00

Tabel 10. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra?	9	31,00	89,00	59,56

11. Provinsi Banten

Tabel 11. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini?	12	60,00	95,00	80,83
2.	Sejauh mana wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	12	50,00	95,00	73,00
3.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya?	12	62,00	93,00	75,25
4.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kemerdekaan pers? Dapat dijelaskan dengan memberikan contoh kongkret program yang dijalankan dalam pemajuan kemerdekaan pers. (Meliputi freedom from dan freedom for)	12	61,00	95,00	77,00

Tabel 11. 2. Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini?	12	60,00	98,00	76,75
6.	Sejauh mana pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers?	12	58,00	90,00	75,58
7.	Sejauh mana independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa?	12	53,00	90,00	69,17
8.	Sejauh mana pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan terganggu oleh kepentingan politik, ekonomi, kepentingan pemilik?	12	30,00	85,00	64,75

Tabel 11. 3. Kebebasan dari Kekerasan

Kebebasan dari Kekerasan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
9.	Sejauh mana tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan ?	12	60,00	90,00	75,42
10.	Sejauh mana wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan?	12	56,00	90,00	75,33
11.	Sejauh mana aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan?	12	57,00	90,00	74,25

Tabel 11. 4. Kebebasan Media Alternatif

Kebebasan Media Alternatif		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisisme warga?	12	55,00	95,00	72,17
13.	Sejauh mana jurnalisisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers?	12	50,00	90,00	70,67

Tabel 11. 5. Keragaman Pandangan

Keragaman Pandangan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
14.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini?	12	31,00	95,00	70,83
15.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media?	12	31,00	90,00	68,67
16.	Sejauh mana pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya?	12	50,00	90,00	75,25

Tabel 11. 6. Akurat dan Berimbang

Akurat dan Berimbang		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	12	65,00	90,00	75,75
18.	Sejauh mana wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	12	56,00	90,00	75,75
19.	Seberapa seringkah pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan?	12	56,00	90,00	74,25

Tabel 11. 7. Akses atas Informasi Publik

Akses atas Informasi Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
20.	Sejauh mana terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini?	12	70,00	95,00	82,08
21.	Sejauh mana pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya?	12	53,00	95,00	77,33
22.	Sejauh mana hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers?	12	56,00	98,00	77,25
23.	Sejauh mana wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini?	12	56,00	95,00	71,75

Tabel 11. 8. Pendidikan Insan Pers

Pendidikan Insan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
24.	Sejauh mana di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi?	12	56,00	95,00	81,33

Tabel 11. 9. Kestaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Kestaraan Akses bagi Kelompok Rentan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
25.	Sejauh mana media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok	12	60,00	97,00	76,50
26.	Sejauh mana pers menyediakan informasi ramah dan layak anak,	12	31,00	80,00	64,75
27.	Sejauhmana pers menyediakan informasi berperspektif gender,	12	50,00	90,00	70,17
28.	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	12	60,00	90,00	74,17
29.	Sejauh mana pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	12	40,00	90,00	71,75
30.	Sejauh mana media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)?	12	30,00	75,00	55,08

Tabel 11. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers?	12	60,00	95,00	77,08
2.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran?	12	60,00	95,00	74,17
3.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak?	12	65,00	90,00	77,92
4.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak?	12	65,00	90,00	77,92
5.	Sejauh mana alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi?	12	30,00	95,00	69,58
6.	Seberapa besar pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui "berita berbayar"?	12	30,00	95,00	70,33
7.	Sejauh mana alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi?	12	30,00	95,00	68,33
8.	Sejauh mana kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata?	12	35,00	90,00	70,00
9.	Sejauh mana kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu?	12	50,00	85,00	71,25
10.	Sejauh mana konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan?	12	60,00	85,00	72,08

Tabel 11. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
11.	Sejauh mana perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya?	12	60,00	90,00	77,50
12.	Sejauh mana wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi	12	56,00	80,00	67,25
13.	Sejauh mana pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media?	12	31,00	80,00	66,00
14.	Sejauh mana pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers?	12	50,00	95,00	77,83
15.	Sejauh mana situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan?	12	30,00	70,00	62,33
16.	Sejauh mana terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)?	12	60,00	90,00	73,67

Tabel 11. 12. Keragaman Kepemilikan

Keragaman Kepemilikan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)?	12	60,00	90,00	80,00

Tabel 11. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik. Yang dimaksud sebagai perusahaan pers adalah, badan usaha yang dikelola sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.	12	56,00	85,00	70,08
19.	Sejauh mana publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	12	50,00	95,00	68,33
20.	Sejauh mana wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers?	12	50,00	100,00	69,08

Tabel 11. 14. Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
21.	Sejauh mana lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik?	12	60,00	95,00	75,42
22.	Sejauh mana pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik?	12	56,00	95,00	69,42
23.	Sejauh mana perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan?	12	31,00	95,00	72,58
24.	Sejauh mana fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini?	12	50,00	95,00	73,25
25.	Sejauh mana Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini?	12	35,00	95,00	68,25
26.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat?	12	35,00	95,00	75,00
27.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik?	12	35,00	99,00	69,83

Tabel 11. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)?	12	55,00	90,00	74,17
2.	Sejauh mana lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers?	12	55,00	90,00	75,00
3.	Sejauh mana peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	12	60,00	95,00	74,58
4.	Sejauh mana aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	12	60,00	90,00	73,33

Tabel 11. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya?	12	60,00	90,00	75,00

Tabel 11. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
6.	Sejauh mana peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya?	12	65,00	95,00	78,75
7.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik?	12	56,00	95,00	73,00
8.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers? Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan.	12	60,00	95,00	76,25
9.	Sejauh mana pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers?	12	65,00	95,00	74,58

Tabel 11. 18. Etika Pers

Etika Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
10.	Sejauh mana pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers?	12	65,00	95,00	78,67
11.	Sejauh mana wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik?	12	60,00	90,00	74,17

Tabel 11. 19. Mekanisme Pemulihan

Mekanisme Pemulihan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen?	12	65,00	100,00	83,75
13.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen?	12	60,00	95,00	78,25
14.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen?	12	60,00	95,00	75,75
15.	Sejauh mana aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan?	12	50,00	95,00	75,67
16.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan	12	31,00	100,00	74,58
17.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana?	12	65,00	95,00	74,50

Tabel 11. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra?	12	31,00	80,00	58,42

12. Provinsi DKI Jakarta

Tabel 12. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini?	12	70,00	100,00	88,67
2.	Sejauh mana wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	12	35,00	95,00	77,75
3.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya?	12	60,00	95,00	79,42
4.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kemerdekaan pers? Dapat dijelaskan dengan memberikan contoh kongkret program yang dijalankan dalam pemajuan kemerdekaan pers. (Meliputi freedom from dan freedom for)	12	75,00	97,00	82,58

Tabel 12. 2. Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini?	12	30,00	100,00	76,92
6.	Sejauh mana pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers?	10	50,00	100,00	77,50
7.	Sejauh mana independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa?	12	50,00	90,00	66,58
8.	Sejauh mana pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan terganggu oleh kepentingan politik, ekonomi, kepentingan pemilik?	12	55,00	90,00	71,42

Tabel 12. 3. Kebebasan dari Kekerasan

Kebebasan dari Kekerasan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
9.	Sejauh mana tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan ?	12	30,00	98,00	72,58
10.	Sejauh mana wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan?	12	30,00	95,00	73,00
11.	Sejauh mana aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan?	12	50,00	95,00	76,75

Tabel 12. 4. Kebebasan Media Alternatif

Kebebasan Media Alternatif		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga?	12	40,00	90,00	70,92
13.	Sejauh mana jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers?	12	50,00	90,00	77,83

Tabel 12. 5. Keragaman Pandangan

Keragaman Pandangan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
14.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini?	12	30,00	95,00	67,00
15.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media?	10	1,00	90,00	58,50
16.	Sejauh mana pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya?	11	50,00	95,00	79,91

Tabel 12. 6. Akurat dan Berimbang

Akurat dan Berimbang		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	12	56,00	95,00	80,50
18.	Sejauh mana wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	11	50,00	95,00	76,55
19.	Seberapa seringkah pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan?	10	35,00	90,00	64,10

Tabel 12. 7. Akses atas Informasi Publik

Akses atas Informasi Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
20.	Sejauh mana terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini?	12	50,00	98,00	82,00
21.	Sejauh mana pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya?	10	65,00	95,00	83,80
22.	Sejauh mana hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers?	11	55,00	95,00	80,00
23.	Sejauh mana wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini?	11	70,00	96,00	84,45

Tabel 12. 8. Pendidikan Insan Pers

Pendidikan Insan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
24.	Sejauh mana di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi?	11	65,00	98,00	87,73

Tabel 12. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
25.	Sejauh mana media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok	12	50,00	95,00	74,67
26.	Sejauh mana pers menyediakan informasi ramah dan layak anak,	12	50,00	90,00	72,58
27.	Sejauhmana pers menyediakan informasi berperspektif gender,	11	40,00	95,00	70,55
28.	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	12	30,00	98,00	66,42
29.	Sejauh mana pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	12	30,00	78,00	60,25
30.	Sejauh mana media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)?	12	50,00	75,00	63,50

Tabel 12. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers?	10	75,00	100,00	88,50
2.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran?	10	60,00	100,00	79,00
3.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak?	4	80,00	95,00	88,75
4.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak?	5	70,00	95,00	84,00
5.	Sejauh mana alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi?	7	40,00	90,00	74,29
6.	Seberapa besar pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui "berita berbayar"?	10	40,00	90,00	74,90
7.	Sejauh mana alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi?	7	40,00	90,00	71,86
8.	Sejauh mana kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata?	9	1,00	90,00	65,00
9.	Sejauh mana kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu?	11	30,00	90,00	63,45
10.	Sejauh mana konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan?	11	40,00	90,00	71,55

Tabel 12. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
11.	Sejauh mana perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya?	11	50,00	95,00	75,45
12.	Sejauh mana wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi	11	50,00	95,00	69,64
13.	Sejauh mana pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media?	9	40,00	90,00	64,67
14.	Sejauh mana pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers?	11	50,00	90,00	77,55
15.	Sejauh mana situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan?	11	45,00	90,00	72,09
16.	Sejauh mana terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)?	10	40,00	100,00	64,40

Tabel 12. 12. Keragaman Kepemilikan

Keragaman Kepemilikan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)?	11	40,00	90,00	71,45

Tabel 12. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik. Yang dimaksud sebagai perusahaan pers adalah, badan usaha yang dikelola sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.	10	40,00	90,00	73,90
19.	Sejauh mana publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	11	55,00	90,00	74,09
20.	Sejauh mana wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers?	8	56,00	88,00	69,38

Tabel 12. 14. Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
21.	Sejauh mana lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik?	12	55,00	90,00	77,67
22.	Sejauh mana pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik?	7	69,00	90,00	75,57
23.	Sejauh mana perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan?	5	60,00	76,00	70,20
24.	Sejauh mana fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini?	10	50,00	90,00	67,30
25.	Sejauh mana Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini?	12	65,00	90,00	79,42
26.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat?	11	55,00	95,00	73,91
27.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik?	9	55,00	90,00	72,22

Tabel 12. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)?	9	57,00	90,00	74,78
2.	Sejauh mana lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers?	11	56,00	90,00	74,45
3.	Sejauh mana peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	8	40,00	90,00	70,75
4.	Sejauh mana aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	10	40,00	90,00	76,00

Tabel 12. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya?	11	40,00	90,00	74,09

Tabel 12. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
6.	Sejauh mana peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya?	11	70,00	95,00	81,91
7.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik?	11	70,00	95,00	82,45
8.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers? Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan.	11	70,00	95,00	85,09
9.	Sejauh mana pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers?	11	50,00	95,00	76,82

Tabel 12. 18. Etika Pers

Etika Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
10.	Sejauh mana pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers?	9	68,00	95,00	76,89
11.	Sejauh mana wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik?	12	65,00	90,00	74,42

Tabel 12. 19. Mekanisme Pemulihan

Mekanisme Pemulihan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen?	10	70,00	95,00	83,70
13.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen?	10	55,00	95,00	76,60
14.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen?	8	69,00	90,00	77,38
15.	Sejauh mana aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan?	11	30,00	90,00	66,64
16.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan	10	70,00	90,00	79,30
17.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana?	7	56,00	90,00	76,29

Tabel 12. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra?	11	40,00	70,00	60,73

13. Provinsi Jawa Barat

Tabel 13. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini?	12	60,00	100,00	84,42
2.	Sejauh mana wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	11	55,00	95,00	83,00
3.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya?	12	30,00	90,00	70,50
4.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kemerdekaan pers? Dapat dijelaskan dengan memberikan contoh kongkret program yang dijalankan dalam pemajuan kemerdekaan pers. (Meliputi freedom from dan freedom for)	12	55,00	90,00	77,42

Tabel 13. 2. Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini?	12	30,00	90,00	75,92
6.	Sejauh mana pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers?	11	56,00	90,00	74,55
7.	Sejauh mana independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa?	12	10,00	100,00	55,92
8.	Sejauh mana pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan terganggu oleh kepentingan politik, ekonomi, kepentingan pemilik?	12	30,00	95,00	64,75

Tabel 13. 3. Kebebasan dari Kekerasan

Kebebasan dari Kekerasan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
9.	Sejauh mana tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan ?	12	30,00	95,00	68,00
10.	Sejauh mana wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan?	12	40,00	90,00	70,42
11.	Sejauh mana aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan?	11	30,00	90,00	68,09

Tabel 13. 4. Kebebasan Media Alternatif

Kebebasan Media Alternatif		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga?	12	30,00	95,00	69,67
13.	Sejauh mana jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers?	11	40,00	95,00	71,91

Tabel 13. 5. Keragaman Pandangan

Keragaman Pandangan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
14.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini?	12	30,00	95,00	70,67
15.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media?	12	30,00	90,00	61,33
16.	Sejauh mana pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya?	12	50,00	95,00	78,67

Tabel 13. 6. Akurat dan Berimbang

Akurat dan Berimbang		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	12	20,00	95,00	72,17
18.	Sejauh mana wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	12	40,00	95,00	71,92
19.	Seberapa seringkah pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan?	12	40,00	100,00	71,83

Tabel 13. 7. Akses atas Informasi Publik

Akses atas Informasi Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
20.	Sejauh mana terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini?	12	56,00	95,00	73,25
21.	Sejauh mana pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya?	12	50,00	90,00	74,92
22.	Sejauh mana hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers?	9	45,00	90,00	78,67
23.	Sejauh mana wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini?	11	30,00	95,00	71,27

Tabel 13. 8. Pendidikan Insan Pers

Pendidikan Insan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
24.	Sejauh mana di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi?	12	65,00	95,00	80,42

Tabel 13. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
25.	Sejauh mana media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok	12	30,00	95,00	70,33
26.	Sejauh mana pers menyediakan informasi ramah dan layak anak,	12	30,00	90,00	66,08
27.	Sejauhmana pers menyediakan informasi berperspektif gender,	12	30,00	89,00	67,00
28.	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	11	30,00	90,00	67,73
29.	Sejauh mana pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	12	30,00	90,00	62,08
30.	Sejauh mana media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)?	11	30,00	80,00	56,82

Tabel 13. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers?	12	50,00	95,00	77,42
2.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran?	11	60,00	96,00	76,36
3.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak?	11	30,00	95,00	74,91
4.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak?	12	70,00	90,00	77,83
5.	Sejauh mana alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi?	12	30,00	95,00	60,17
6.	Seberapa besar pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui "berita berbayar"?	12	30,00	90,00	64,17
7.	Sejauh mana alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi?	10	30,00	90,00	62,10
8.	Sejauh mana kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata?	12	30,00	85,00	62,58
9.	Sejauh mana kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu?	10	50,00	80,00	66,90
10.	Sejauh mana konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan?	10	50,00	80,00	63,40

Tabel 13. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
11.	Sejauh mana perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya?	12	56,00	90,00	76,17
12.	Sejauh mana wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi	12	30,00	90,00	58,08
13.	Sejauh mana pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media?	12	40,00	90,00	63,00
14.	Sejauh mana pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers?	12	56,00	95,00	74,92
15.	Sejauh mana situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan?	12	30,00	89,00	61,33
16.	Sejauh mana terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)?	12	30,00	90,00	57,75

Tabel 13. 12. Keragaman Kepemilikan

Keragaman Kepemilikan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)?	11	50,00	85,00	70,82

Tabel 13. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik. Yang dimaksud sebagai perusahaan pers adalah, badan usaha yang dikelola sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.	12	40,00	85,00	70,00
19.	Sejauh mana publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	12	35,00	85,00	59,75
20.	Sejauh mana wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers?	12	30,00	90,00	61,42

Tabel 13. 14. Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
21.	Sejauh mana lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik?	12	50,00	90,00	74,50
22.	Sejauh mana pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik?	11	40,00	90,00	69,09
23.	Sejauh mana perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan?	10	40,00	90,00	73,90
24.	Sejauh mana fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini?	12	50,00	90,00	71,08
25.	Sejauh mana Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini?	12	50,00	90,00	76,75
26.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat?	11	30,00	90,00	72,64
27.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik?	12	50,00	90,00	75,67

Tabel 13. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)?	11	30,00	89,00	68,55
2.	Sejauh mana lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers?	9	40,00	85,00	66,89
3.	Sejauh mana peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	12	30,00	90,00	71,67
4.	Sejauh mana aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	12	50,00	89,00	70,67

Tabel 13. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya?	12	50,00	90,00	74,83

Tabel 13. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
6.	Sejauh mana peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya?	10	50,00	90,00	70,40
7.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik?	11	31,00	90,00	72,73
8.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers? Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan.	11	56,00	90,00	79,91
9.	Sejauh mana pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers?	12	55,00	89,00	75,75

Tabel 13. 18. Etika Pers

Etika Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
10.	Sejauh mana pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers?	12	30,00	90,00	67,67
11.	Sejauh mana wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik?	12	40,00	90,00	70,58

Tabel 13. 19. Mekanisme Pemulihan

Mekanisme Pemulihan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen?	11	70,00	92,00	82,64
13.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen?	11	50,00	90,00	73,18
14.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen?	11	65,00	90,00	79,91
15.	Sejauh mana aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan?	12	30,00	89,00	66,17
16.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan	11	30,00	90,00	70,91
17.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana?	8	40,00	90,00	72,88

Tabel 13. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra?	11	45,00	90,00	68,36

14. Provinsi Jawa Tengah

Tabel 14. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini?	12	70,00	90,00	84,17
2.	Sejauh mana wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	11	50,00	90,00	77,45
3.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya?	12	65,00	90,00	80,00
4.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kemerdekaan pers? Dapat dijelaskan dengan memberikan contoh kongkret program yang dijalankan dalam pemajuan kemerdekaan pers. (Meliputi freedom from dan freedom for)	12	56,00	100,00	81,08

Tabel 14. 2. Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini?	12	70,00	100,00	86,00
6.	Sejauh mana pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers?	11	70,00	90,00	84,09
7.	Sejauh mana independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa?	12	40,00	90,00	67,58
8.	Sejauh mana pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan terganggu oleh kepentingan politik, ekonomi, kepentingan pemilik?	12	50,00	100,00	71,67

Tabel 14. 3. Kebebasan dari Kekerasan

Kebebasan dari Kekerasan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
9.	Sejauh mana tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan ?	12	70,00	100,00	83,25
10.	Sejauh mana wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan?	12	60,00	100,00	81,25
11.	Sejauh mana aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan?	12	60,00	90,00	77,00

Tabel 14. 4. Kebebasan Media Alternatif

Kebebasan Media Alternatif		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga?	12	60,00	90,00	84,58
13.	Sejauh mana jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers?	12	75,00	95,00	84,83

Tabel 14. 5. Keragaman Pandangan

Keragaman Pandangan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
14.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini?	12	60,00	90,00	77,83
15.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media?	11	50,00	95,00	77,09
16.	Sejauh mana pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya?	11	60,00	95,00	86,09

Tabel 14. 6. Akurat dan Berimbang

Akurat dan Berimbang		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	12	65,00	95,00	79,58
18.	Sejauh mana wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	11	60,00	95,00	78,18
19.	Seberapa seringkah pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan?	11	50,00	100,00	72,73

Tabel 14. 7. Akses atas Informasi Publik

Akses atas Informasi Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
20.	Sejauh mana terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini?	12	75,00	95,00	87,00
21.	Sejauh mana pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya?	12	70,00	90,00	86,67
22.	Sejauh mana hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers?	11	50,00	100,00	79,09
23.	Sejauh mana wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini?	8	75,00	100,00	87,50

Tabel 14. 8. Pendidikan Insan Pers

Pendidikan Insan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
24.	Sejauh mana di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi?	11	75,00	100,00	88,18

Tabel 14. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
25.	Sejauh mana media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok	12	60,00	95,00	81,50
26.	Sejauh mana pers menyediakan informasi ramah dan layak anak,	12	60,00	95,00	76,67
27.	Sejauhmana pers menyediakan informasi berperspektif gender,	12	50,00	90,00	74,17
28.	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	12	65,00	90,00	78,58
29.	Sejauh mana pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	12	50,00	95,00	76,17
30.	Sejauh mana media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)?	12	40,00	95,00	62,25

Tabel 14. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers?	12	50,00	100,00	81,17
2.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran?	11	60,00	90,00	78,91
3.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak?	11	60,00	90,00	80,82
4.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak?	10	65,00	95,00	80,90
5.	Sejauh mana alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi?	10	40,00	95,00	74,50
6.	Seberapa besar pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui "berita berbayar"?	10	40,00	95,00	71,00
7.	Sejauh mana alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi?	9	65,00	100,00	80,56
8.	Sejauh mana kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata?	12	55,00	90,00	72,17
9.	Sejauh mana kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu?	10	55,00	100,00	76,50
10.	Sejauh mana konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan?	11	55,00	100,00	75,00

Tabel 14.11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
11.	Sejauh mana perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya?	12	69,00	100,00	79,08
12.	Sejauh mana wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi	11	50,00	100,00	70,91
13.	Sejauh mana pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media?	9	50,00	100,00	64,67
14.	Sejauh mana pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers?	12	70,00	95,00	83,67
15.	Sejauh mana situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan?	11	55,00	100,00	70,00
16.	Sejauh mana terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)?	11	50,00	100,00	67,36

Tabel 14. 12. Keragaman Kepemilikan

Keragaman Kepemilikan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)?	12	56,00	90,00	76,75

Tabel 14. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik. Yang dimaksud sebagai perusahaan pers adalah, badan usaha yang dikelola sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.	12	65,00	100,00	77,50
19.	Sejauh mana publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	12	50,00	100,00	74,75
20.	Sejauh mana wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers?	11	30,00	90,00	53,55

Tabel 14. 14. Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
21.	Sejauh mana lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik?	12	70,00	100,00	80,00
22.	Sejauh mana pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik?	11	56,00	100,00	83,64
23.	Sejauh mana perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan?	12	70,00	100,00	82,58
24.	Sejauh mana fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini?	12	60,00	100,00	79,17
25.	Sejauh mana Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini?	11	56,00	100,00	77,36
26.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat?	12	50,00	100,00	79,67
27.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik?	10	50,00	100,00	78,50

Tabel 14. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)?	10	60,00	95,00	76,00
2.	Sejauh mana lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers?	10	55,00	95,00	72,50
3.	Sejauh mana peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	12	40,00	100,00	74,75
4.	Sejauh mana aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	11	60,00	100,00	77,73

Tabel 14. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya?	12	60,00	100,00	78,33

Tabel 14. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
6.	Sejauh mana peraturan di daerah ini dapat mempidanakan wartawan karena pemberitaannya?	11	65,00	100,00	83,09
7.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik?	12	70,00	100,00	83,42
8.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers? Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan.	11	70,00	100,00	82,27
9.	Sejauh mana pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers?	11	65,00	100,00	81,82

Tabel 14. 18. Etika Pers

Etika Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
10.	Sejauh mana pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers?	12	50,00	100,00	80,42
11.	Sejauh mana wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik?	12	55,00	100,00	75,17

Tabel 14. 19. Mekanisme Pemulihan

Mekanisme Pemulihan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen?	8	50,00	90,00	81,88
13.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen?	12	70,00	100,00	80,83
14.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen?	11	70,00	100,00	81,36
15.	Sejauh mana aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan?	10	60,00	90,00	77,50
16.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan	10	50,00	100,00	73,50
17.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana?	8	50,00	100,00	76,25

Tabel 14. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra?	9	40,00	90,00	61,67

15. Provinsi Jawa Timur

Tabel 15. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini?	12	60,00	100,00	83,17
2.	Sejauh mana wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	9	60,00	95,00	80,33
3.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya?	10	30,00	97,00	71,10
4.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kemerdekaan pers? Dapat dijelaskan dengan memberikan contoh kongkret program yang dijalankan dalam pemajuan kemerdekaan pers. (Meliputi freedom from dan freedom for)	10	55,00	98,00	79,80

Tabel 15. 2. Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini?	6	60,00	90,00	78,83
6.	Sejauh mana pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers?	8	56,00	90,00	77,75
7.	Sejauh mana independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa?	8	50,00	70,00	58,88
8.	Sejauh mana pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan terganggu oleh kepentingan politik, ekonomi, kepentingan pemilik?	10	50,00	90,00	68,30

Tabel 15. 3. Kebebasan dari Kekerasan

Kebebasan dari Kekerasan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
9.	Sejauh mana tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan ?	10	50,00	100,00	71,20
10.	Sejauh mana wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan?	10	50,00	95,00	70,10
11.	Sejauh mana aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan?	12	56,00	100,00	76,50

Tabel 15. 4. Kebebasan Media Alternatif

Kebebasan Media Alternatif		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga?	11	60,00	100,00	78,64
13.	Sejauh mana jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers?	10	56,00	100,00	79,00

Tabel 15. 5. Keragaman Pandangan

Keragaman Pandangan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
14.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini?	8	40,00	95,00	69,63
15.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media?	9	40,00	100,00	60,67
16.	Sejauh mana pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya?	7	60,00	95,00	71,43

Tabel 15. 6. Akurat dan Berimbang

Akurat dan Berimbang		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	11	50,00	90,00	71,09
18.	Sejauh mana wartawan (jajaran redaksi) memperlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	10	50,00	90,00	69,80
19.	Seberapa seringkah pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan?	7	55,00	75,00	65,14

Tabel 15. 7. Akses atas Informasi Publik

Akses atas Informasi Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
20.	Sejauh mana terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini?	12	60,00	95,00	78,00
21.	Sejauh mana pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya?	11	56,00	95,00	76,00
22.	Sejauh mana hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers?	7	55,00	95,00	70,71
23.	Sejauh mana wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini?	9	69,00	90,00	76,33

Tabel 15. 8. Pendidikan Insan Pers

Pendidikan Insan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
24.	Sejauh mana di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi?	9	55,00	95,00	77,22

Tabel 15. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
25.	Sejauh mana media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok	11	31,00	98,00	70,82
26.	Sejauh mana pers menyediakan informasi ramah dan layak anak,	10	31,00	95,00	64,70
27.	Sejauhmana pers menyediakan informasi berperspektif gender,	11	31,00	96,00	70,18
28.	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	11	31,00	97,00	68,09
29.	Sejauh mana pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	8	31,00	85,00	61,25
30.	Sejauh mana media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)?	10	31,00	80,00	54,70

Tabel 15. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers?	9	50,00	90,00	77,00
2.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran?	10	55,00	90,00	73,90
3.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak?	5	60,00	85,00	76,00
4.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak?	7	60,00	95,00	73,57
5.	Sejauh mana alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi?	11	40,00	90,00	66,09
6.	Seberapa besar pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui "berita berbayar"?	10	35,00	90,00	64,50
7.	Sejauh mana alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi?	7	30,00	80,00	62,86
8.	Sejauh mana kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata?	10	50,00	80,00	64,70
9.	Sejauh mana kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu?	9	40,00	90,00	64,22
10.	Sejauh mana konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan?	10	40,00	95,00	62,20

Tabel 15. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
11.	Sejauh mana perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya?	12	50,00	90,00	69,42
12.	Sejauh mana wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi	11	30,00	98,00	64,09
13.	Sejauh mana pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media?	10	30,00	90,00	65,60
14.	Sejauh mana pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers?	11	50,00	100,00	72,18
15.	Sejauh mana situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan?	11	55,00	90,00	69,73
16.	Sejauh mana terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)?	8	40,00	65,00	53,63

Tabel 15. 12. Keragaman Kepemilikan

Keragaman Kepemilikan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)?	10	40,00	95,00	69,60

Tabel 15. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik. Yang dimaksud sebagai perusahaan pers adalah, badan usaha yang dikelola sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.	10	56,00	80,00	69,20
19.	Sejauh mana publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	10	31,00	90,00	56,30
20.	Sejauh mana wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers?	10	30,00	90,00	56,10

Tabel 15. 14. Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
21.	Sejauh mana lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik?	12	56,00	95,00	74,08
22.	Sejauh mana pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik?	10	31,00	100,00	65,10
23.	Sejauh mana perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan?	5	55,00	90,00	71,00
24.	Sejauh mana fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini?	10	40,00	90,00	63,30
25.	Sejauh mana Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini?	10	40,00	98,00	63,40
26.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat?	8	31,00	98,00	63,25
27.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik?	6	31,00	98,00	51,83

Tabel 15. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)?	9	30,00	90,00	62,33
2.	Sejauh mana lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers?	9	31,00	100,00	72,89
3.	Sejauh mana peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	9	40,00	100,00	69,44
4.	Sejauh mana aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	12	55,00	100,00	73,25

Tabel 15. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya?	7	60,00	90,00	72,86

Tabel 15. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
6.	Sejauh mana peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya?	8	56,00	100,00	77,00
7.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik?	8	50,00	100,00	75,13
8.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers? Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan.	9	70,00	100,00	80,00
9.	Sejauh mana pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers?	12	56,00	100,00	76,83

Tabel 15. 18. Etika Pers

Etika Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
10	Sejauh mana pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers?	10	50,00	100,00	72,00
11	Sejauh mana wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik?	12	50,00	100,00	64,92

Tabel 15. 19. Mekanisme Pemulihan

Mekanisme Pemulihan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12	Sejauh mana kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen?	10	50,00	90,00	70,60
13	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen?	7	57,00	90,00	75,29
14	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen?	7	40,00	100,00	68,57
15	Sejauh mana aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan?	9	40,00	100,00	66,44
16	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan	10	30,00	100,00	69,50
17	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana?	4	55,00	70,00	60,00

Tabel 15. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18	Sejauh mana peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra?	8	30,00	80,00	54,38

16. Provinsi DI Yogyakarta

Tabel 16. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini?	12	65,00	95,00	81,58
2.	Sejauh mana wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	12	65,00	95,00	81,00
3.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya?	12	31,00	90,00	68,92
4.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kemerdekaan pers? Dapat dijelaskan dengan memberikan contoh kongkret program yang dijalankan dalam pemajuan kemerdekaan pers. (Meliputi freedom from dan freedom for)	12	50,00	95,00	73,33

Tabel 16. 2. Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini?	12	31,00	100,00	73,67
6.	Sejauh mana pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers?	11	30,00	100,00	75,91
7.	Sejauh mana independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa?	12	30,00	100,00	65,08
8.	Sejauh mana pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan terganggu oleh kepentingan politik, ekonomi, kepentingan pemilik?	12	30,00	90,00	62,00

Tabel 16. 3. Kebebasan dari Kekerasan

Kebebasan dari Kekerasan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
9.	Sejauh mana tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan ?	12	32,00	100,00	64,58
10.	Sejauh mana wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan?	12	30,00	100,00	63,25
11.	Sejauh mana aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan?	12	40,00	90,00	66,75

Tabel 16. 4. Kebebasan Media Alternatif

Kebebasan Media Alternatif		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga?	12	55,00	90,00	70,42
13.	Sejauh mana jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers?	11	60,00	90,00	72,82

Tabel 16. 5. Keragaman Pandangan

Keragaman Pandangan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
14.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini?	12	50,00	86,00	63,83
15.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media?	12	50,00	90,00	66,92
16.	Sejauh mana pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya?	12	65,00	100,00	82,42

Tabel 16. 6. Akurat dan Berimbang

Akurat dan Berimbang		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	12	50,00	95,00	77,58
18.	Sejauh mana wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	12	56,00	90,00	73,33
19.	Seberapa seringkah pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan?	12	30,00	95,00	63,25

Tabel 16. 7. Akses atas Informasi Publik

Akses atas Informasi Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
20.	Sejauh mana terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini?	12	55,00	93,00	79,83
21.	Sejauh mana pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya?	12	56,00	92,00	80,67
22.	Sejauh mana hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers?	10	55,00	90,00	69,60
23.	Sejauh mana wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini?	12	69,00	90,00	77,42

Tabel 16. 8. Pendidikan Insan Pers

Pendidikan Insan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
24.	Sejauh mana di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi?	12	56,00	90,00	75,92

Tabel 16. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
25.	Sejauh mana media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok	12	30,00	90,00	69,83
26.	Sejauh mana pers menyediakan informasi ramah dan layak anak,	12	55,00	85,00	67,50
27.	Sejauhmana pers menyediakan informasi berperspektif gender,	12	30,00	80,00	63,42
28.	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	12	35,00	91,00	68,83
29.	Sejauh mana pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	12	30,00	80,00	61,83
30.	Sejauh mana media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)?	12	40,00	90,00	60,50

Tabel 16. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers?	12	70,00	100,00	79,08
2.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran?	11	55,00	90,00	74,82
3.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak?	8	65,00	90,00	75,13
4.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak?	8	55,00	90,00	73,13
5.	Sejauh mana alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi?	11	50,00	85,00	65,27
6.	Seberapa besar pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui "berita berbayar"?	12	50,00	80,00	63,67
7.	Sejauh mana alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi?	7	56,00	86,00	68,14
8.	Sejauh mana kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata?	12	35,00	80,00	62,08
9.	Sejauh mana kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu?	12	50,00	90,00	71,00
10.	Sejauh mana konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan?	12	50,00	90,00	70,42

Tabel 16. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
11.	Sejauh mana perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya?	12	30,00	90,00	69,75
12.	Sejauh mana wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi	11	20,00	100,00	66,73
13.	Sejauh mana pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media?	11	20,00	90,00	60,36
14.	Sejauh mana pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers?	12	30,00	89,00	66,42
15.	Sejauh mana situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan?	12	31,00	89,00	66,00
16.	Sejauh mana terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)?	12	30,00	90,00	66,42

Tabel 16. 12. Keragaman Kepemilikan

Keragaman Kepemilikan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)?	12	56,00	90,00	75,75

Tabel 16. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik. Yang dimaksud sebagai perusahaan pers adalah, badan usaha yang dikelola sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.	12	31,00	90,00	71,92
19.	Sejauh mana publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	12	50,00	90,00	67,50
20.	Sejauh mana wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers?	8	45,00	90,00	62,88

Tabel 16. 14. Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
21.	Sejauh mana lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik?	12	50,00	90,00	70,00
22.	Sejauh mana pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik?	11	55,00	95,00	76,09
23.	Sejauh mana perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan?	9	55,00	95,00	74,33
24.	Sejauh mana fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini?	12	55,00	89,00	72,17
25.	Sejauh mana Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini?	10	56,00	100,00	69,60
26.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat?	11	55,00	80,00	68,91
27.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik?	11	31,00	80,00	64,91

Tabel 16. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)?	9	30,00	90,00	62,33
2.	Sejauh mana lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers?	9	31,00	100,00	72,89
3.	Sejauh mana peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	9	40,00	100,00	69,44
4.	Sejauh mana aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	12	55,00	100,00	73,25

Tabel 16. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya?	11	31,00	85,00	68,27

Tabel 16. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
6.	Sejauh mana peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya?	10	55,00	100,00	75,40
7.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik?	11	56,00	100,00	80,36
8.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers? Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan.	11	56,00	100,00	78,27
9.	Sejauh mana pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers?	12	20,00	90,00	70,67

Tabel 16. 18. Etika Pers

Etika Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
10	Sejauh mana pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers?	12	20,00	89,00	62,08
11.	Sejauh mana wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik?	12	20,00	92,00	70,67

Tabel 16. 19. Mekanisme Pemulihan

Mekanisme Pemulihan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen?	9	56,00	100,00	72,00
13.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen?	9	56,00	95,00	74,67
14.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen?	10	56,00	100,00	76,40
15.	Sejauh mana aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan?	12	55,00	90,00	74,58
16.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan	10	56,00	90,00	74,70
17.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana?	7	56,00	80,00	69,57

Tabel 16. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra?	12	35,00	90,00	60,33

17. Provinsi Bali

Tabel 17. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini?	12	65,00	91,00	85,92
2.	Sejauh mana wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	12	60,00	90,00	79,58
3.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya?	12	68,00	95,00	84,75
4.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kemerdekaan pers? Dapat dijelaskan dengan memberikan contoh kongkret program yang dijalankan dalam pemajuan kemerdekaan pers. (Meliputi freedom from dan freedom for)	11	70,00	100,00	81,09

Tabel 17. 2. Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini?	11	57,00	100,00	86,64
6.	Sejauh mana pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers?	11	56,00	100,00	85,27
7.	Sejauh mana independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa?	11	55,00	90,00	73,64
8.	Sejauh mana pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan terganggu oleh kepentingan politik, ekonomi, kepentingan pemilik?	12	60,00	92,00	74,75

Tabel 17. 3. Kebebasan dari Kekerasan

Kebebasan dari Kekerasan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
9.	Sejauh mana tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan ?	11	70,00	100,00	86,55
10.	Sejauh mana wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan?	11	70,00	95,00	83,64
11.	Sejauh mana aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan?	11	68,00	98,00	81,45

Tabel 17. 4. Kebebasan Media Alternatif

Kebebasan Media Alternatif		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga?	11	50,00	95,00	82,36
13.	Sejauh mana jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers?	11	70,00	90,00	81,36

Tabel 17. 5. Keragaman Pandangan

Keragaman Pandangan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
14.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini?	11	60,00	100,00	79,18
15.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media?	11	50,00	90,00	74,09
16.	Sejauh mana pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya?	9	70,00	95,00	83,44

Tabel 17. 6. Akurat dan Berimbang

Akurat dan Berimbang		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	11	50,00	96,00	75,55
18.	Sejauh mana wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	11	60,00	98,00	77,09
19.	Seberapa seringkah pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan?	8	55,00	95,00	73,13

Tabel 17. 7. Akses atas Informasi Publik

Akses atas Informasi Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
20.	Sejauh mana terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini?	11	65,00	100,00	83,73
21.	Sejauh mana pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya?	11	70,00	95,00	83,36
22.	Sejauh mana hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers?	8	68,00	97,00	83,75
23.	Sejauh mana wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini?	11	70,00	100,00	84,09

Tabel 17. 8. Pendidikan Insan Pers

Pendidikan Insan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
24.	Sejauh mana di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi?	12	55,00	92,00	78,50

Tabel 17. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
25.	Sejauh mana media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok	11	65,00	95,00	76,82
26.	Sejauh mana pers menyediakan informasi ramah dan layak anak,	10	60,00	92,00	74,60
27.	Sejauhmana pers menyediakan informasi berperspektif gender,	12	50,00	95,00	73,42
28.	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	12	60,00	100,00	75,42
29.	Sejauh mana pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	11	40,00	91,00	68,64
30.	Sejauh mana media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)?	10	20,00	80,00	57,90

Tabel 17. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers?	10	60,00	96,00	80,60
2.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran?	9	60,00	96,00	78,44
3.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak?	8	8,00	90,00	71,00
4.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak?	7	70,00	90,00	80,00
5.	Sejauh mana alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi?	10	40,00	90,00	67,50
6.	Seberapa besar pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui "berita berbaya"?	7	50,00	95,00	67,86
7.	Sejauh mana alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi?	6	60,00	90,00	73,33
8.	Sejauh mana kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata?	8	50,00	97,00	67,13
9.	Sejauh mana kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu?	8	50,00	95,00	71,25
10.	Sejauh mana konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan?	7	55,00	95,00	70,00

Tabel 17. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
11.	Sejauh mana perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya?	11	60,00	100,00	76,82
12.	Sejauh mana wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi	9	10,00	95,00	53,89
13.	Sejauh mana pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media?	9	10,00	96,00	54,56
14.	Sejauh mana pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers?	10	40,00	100,00	75,00
15.	Sejauh mana situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan?	10	40,00	100,00	66,60
16.	Sejauh mana terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)?	9	55,00	95,00	67,22

Tabel 17. 12. Keragaman Kepemilikan

Keragaman Kepemilikan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)?	11	65,00	95,00	79,82

Tabel 17. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik. Yang dimaksud sebagai perusahaan pers adalah, badan usaha yang dikelola sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.	9	50,00	100,00	74,44
19.	Sejauh mana publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	9	50,00	96,00	66,78
20.	Sejauh mana wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers?	7	40,00	100,00	70,71

Tabel 17. 14. Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
21.	Sejauh mana lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik?	9	55,00	97,00	78,56
22.	Sejauh mana pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik?	9	55,00	95,00	73,89
23.	Sejauh mana perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan?	8	70,00	98,00	83,25
24.	Sejauh mana fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini?	10	45,00	95,00	74,00
25.	Sejauh mana Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini?	10	65,00	98,00	78,80
26.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat?	10	60,00	91,00	75,40
27.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik?	10	60,00	90,00	75,50

Tabel 17. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)?	8	65,00	96,00	77,00
2.	Sejauh mana lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers?	7	60,00	95,00	75,00
3.	Sejauh mana peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	10	40,00	98,00	74,30
4.	Sejauh mana aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	10	45,00	95,00	75,00

Tabel 17. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya?	11	50,00	98,00	81,64

Tabel 17. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
6.	Sejauh mana peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya?	6	68,00	95,00	80,50
7.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik?	6	70,00	94,00	80,67
8.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memperlakukan sensor terhadap pers? Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan.	7	70,00	100,00	82,43
9.	Sejauh mana pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers?	5	70,00	94,00	80,80

Tabel 17. 18. Etika Pers

Etika Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
10.	Sejauh mana pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers?	11	60,00	100,00	79,55
11.	Sejauh mana wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik?	11	65,00	100,00	79,82

Tabel 17. 19. Mekanisme Pemulihan

Mekanisme Pemulihan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen?	7	70,00	100,00	82,86
13.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen?	8	75,00	92,00	82,75
14.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen?	8	75,00	90,00	81,25
15.	Sejauh mana aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan?	8	65,00	98,00	79,13
16.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan	6	65,00	95,00	77,17
17.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana?	5	65,00	80,00	73,00

Tabel 17. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra?	9	31,00	80,00	57,89

18. Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tabel 18. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini?	12	70,00	100,00	84,58
2.	Sejauh mana wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	12	30,00	100,00	76,58
3.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya?	11	50,00	90,00	74,36
4.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kemerdekaan pers? Dapat dijelaskan dengan memberikan contoh kongkret program yang dijalankan dalam pemajuan kemerdekaan pers. (Meliputi freedom from dan freedom for)	10	60,00	87,00	73,70

Tabel 18. 2. Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini?	9	56,00	95,00	78,00
6.	Sejauh mana pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers?	10	30,00	100,00	73,60
7.	Sejauh mana independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa?	12	30,00	100,00	75,50
8.	Sejauh mana pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan terganggu oleh kepentingan politik, ekonomi, kepentingan pemilik?	12	56,00	90,00	74,00

Tabel 18. 3. Kebebasan dari Kekerasan

Kebebasan dari Kekerasan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
9.	Sejauh mana tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan ?	11	55,00	95,00	81,18
10.	Sejauh mana wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan?	12	55,00	90,00	75,83
11.	Sejauh mana aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan?	10	60,00	90,00	81,80

Tabel 18. 4. Kebebasan Media Alternatif

Kebebasan Media Alternatif		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga?	12	40,00	95,00	70,75
13.	Sejauh mana jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers?	11	56,00	95,00	75,91

Tabel 18. 5. Keragaman Pandangan

Keragaman Pandangan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
14.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini?	12	30,00	95,00	73,33
15.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media?	11	50,00	95,00	71,36
16.	Sejauh mana pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya?	8	30,00	90,00	74,38

Tabel 18. 6. Akurat dan Berimbang

Akurat dan Berimbang		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	11	68,00	90,00	81,36
18.	Sejauh mana wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	10	65,00	100,00	76,50
19.	Seberapa seringkah pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan?	9	56,00	100,00	72,56

Tabel 18. 7. Akses atas Informasi Publik

Akses atas Informasi Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
20.	Sejauh mana terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini?	11	60,00	100,00	80,64
21.	Sejauh mana pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya?	11	55,00	95,00	77,09
22.	Sejauh mana hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers?	6	60,00	95,00	80,50
23.	Sejauh mana wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini?	8	70,00	90,00	80,63

Tabel 18. 8. Pendidikan Insan Pers

Pendidikan Insan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
24.	Sejauh mana di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi?	11	50,00	95,00	69,64

Tabel 18. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
25.	Sejauh mana media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas?	11	55,00	90,00	77,45
26.	Sejauh mana pers menyediakan informasi ramah dan layak anak,	11	50,00	85,00	64,18
27.	Sejauhmana pers menyediakan informasi berperspektif gender,	11	50,00	90,00	70,55
28.	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	11	50,00	95,00	72,64
29.	Sejauh mana pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	9	50,00	90,00	71,44
30.	Sejauh mana media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)?	11	30,00	95,00	49,00

Tabel 18. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers?	11	56,00	95,00	79,64
2.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran?	11	56,00	100,00	84,18
3.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak?	7	55,00	90,00	78,43
4.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak?	7	65,00	85,00	75,57
5.	Sejauh mana alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi?	8	50,00	89,00	68,75
6.	Seberapa besar pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui "berita berbayar"?	8	50,00	85,00	69,38
7.	Sejauh mana alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi?	4	50,00	80,00	72,50
8.	Sejauh mana kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata?	10	50,00	85,00	69,60
9.	Sejauh mana kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu?	9	56,00	89,00	68,89
10.	Sejauh mana konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan?	10	50,00	89,00	71,40

Tabel 18. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
11.	Sejauh mana perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya?	11	56,00	95,00	77,27
12.	Sejauh mana wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi	10	30,00	80,00	60,00
13.	Sejauh mana pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media?	10	30,00	85,00	62,00
14.	Sejauh mana pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers?	11	55,00	95,00	81,36
15.	Sejauh mana situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan?	11	50,00	95,00	72,36
16.	Sejauh mana terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)?	9	50,00	90,00	68,22

Tabel 18. 12. Keragaman Kepemilikan

Keragaman Kepemilikan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)?	11	56,00	90,00	77,36

Tabel 18. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik. Yang dimaksud sebagai perusahaan pers adalah, badan usaha yang dikelola sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.	11	56,00	90,00	72,36
19.	Sejauh mana publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	9	50,00	85,00	61,22
20.	Sejauh mana wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers?	8	31,00	90,00	61,38

Tabel 18. 14. Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
21.	Sejauh mana lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik?	11	56,00	95,00	80,09
22.	Sejauh mana pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik?	11	55,00	95,00	73,73
23.	Sejauh mana perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan?	8	56,00	95,00	77,63
24.	Sejauh mana fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini?	10	50,00	95,00	74,50
25.	Sejauh mana Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini?	10	30,00	95,00	69,00
26.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat?	10	50,00	100,00	76,90
27.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik?	10	56,00	100,00	77,70

Tabel 18. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)?	7	60,00	89,00	77,00
2.	Sejauh mana lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers?	9	50,00	90,00	74,33
3.	Sejauh mana peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	9	50,00	90,00	67,89
4.	Sejauh mana aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	11	56,00	90,00	75,55

Tabel 18. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya?	11	50,00	90,00	68,55

Tabel 18. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
6.	Sejauh mana peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya?	3	55,00	80,00	70,00
7.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik?	5	50,00	90,00	70,00
8.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers? Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan.	4	55,00	90,00	71,25
9.	Sejauh mana pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers?	7	50,00	90,00	70,86

Tabel 18. 18. Etika Pers

Etika Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
10.	Sejauh mana pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers?	11	56,00	92,00	75,73
11.	Sejauh mana wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik?	11	60,00	100,00	77,09

Tabel 18. 19. Mekanisme Pemulihan

Mekanisme Pemulihan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen?	4	68,00	80,00	75,75
13.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen?	10	55,00	95,00	78,50
14.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen?	10	65,00	95,00	81,40
15.	Sejauh mana aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan?	6	56,00	88,00	72,33
16.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan	6	60,00	90,00	75,00
17.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana?	4	56,00	70,00	64,00

Tabel 18. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra?	10	30,00	90,00	53,00

19. Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tabel 19. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini?	12	70,00	100,00	85,75
2.	Sejauh mana wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	11	70,00	100,00	84,09
3.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya?	12	69,00	100,00	85,25
4.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kemerdekaan pers? Dapat dijelaskan dengan memberikan contoh kongkret program yang dijalankan dalam pemajuan kemerdekaan pers. (Meliputi freedom from dan freedom for)	11	60,00	100,00	83,18

Tabel 19. 2. Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini?	9	50,00	100,00	87,33
6.	Sejauh mana pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers?	10	30,00	100,00	83,00
7.	Sejauh mana independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa?	12	56,00	90,00	74,83
8.	Sejauh mana pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan terganggu oleh kepentingan politik, ekonomi, kepentingan pemilik?	12	56,00	100,00	75,42

Tabel 19. 3. Kebebasan dari Kekerasan

Kebebasan dari Kekerasan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
9.	Sejauh mana tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan ?	8	70,00	100,00	81,13
10.	Sejauh mana wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan?	10	20,00	100,00	73,80
11.	Sejauh mana aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan?	9	70,00	100,00	85,89

Tabel 19. 4. Kebebasan Media Alternatif

Kebebasan Media Alternatif		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga?	9	36,00	90,00	68,11
13.	Sejauh mana jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers?	11	65,00	100,00	84,45

Tabel 19. 5. Keragaman Pandangan

Keragaman Pandangan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
14.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini?	11	50,00	90,00	72,36
15.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media?	11	31,00	100,00	73,64
16.	Sejauh mana pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya?	8	60,00	100,00	78,75

Tabel 19. 6. Akurat dan Berimbang

Akurat dan Berimbang		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	11	56,00	100,00	80,18
18.	Sejauh mana wartawan (jajaran redaksi) memperlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	10	59,00	100,00	74,80
19.	Seberapa seringkah pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan?	9	50,00	100,00	68,78

Tabel 19. 7. Akses atas Informasi Publik

Akses atas Informasi Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
20.	Sejauh mana terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini?	12	31,00	100,00	82,42
21.	Sejauh mana pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya?	10	20,00	90,00	68,10
22.	Sejauh mana hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers?	4	31,00	89,00	56,50
23.	Sejauh mana wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini?	8	50,00	95,00	77,25

Tabel 19. 8. Pendidikan Insan Pers

Pendidikan Insan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
24.	Sejauh mana di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi?	12	50,00	100,00	81,50

Tabel 19. 9. Kesenjangan Akses bagi Kelompok Rentan

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
25.	Sejauh mana media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas?	12	50,00	100,00	78,42
26.	Sejauh mana pers menyediakan informasi ramah dan layak anak,	12	50,00	96,00	73,00
27.	Sejauhmana pers menyediakan informasi berperspektif gender,	11	50,00	100,00	76,09
28.	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	11	50,00	90,00	67,91
29.	Sejauh mana pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	8	50,00	90,00	66,88
30.	Sejauh mana media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)?	9	30,00	70,00	51,22

Tabel 19. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers?	10	56,00	100,00	80,10
2.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran?	11	56,00	100,00	79,64
3.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak?	9	69,00	100,00	82,11
4.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak?	7	56,00	100,00	74,86
5.	Sejauh mana alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi?	8	40,00	75,00	64,88
6.	Seberapa besar pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui "berita berbayar"?	8	50,00	88,00	70,25
7.	Sejauh mana alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi?	7	48,00	95,00	71,71
8.	Sejauh mana kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata?	9	30,00	89,00	65,56
9.	Sejauh mana kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu?	8	25,00	90,00	62,00
10.	Sejauh mana konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan?	8	56,00	90,00	72,75

Tabel 19. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
11.	Sejauh mana perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya?	11	55,00	100,00	78,36
12.	Sejauh mana wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi	9	31,00	95,00	65,56
13.	Sejauh mana pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media?	8	30,00	80,00	56,38
14.	Sejauh mana pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers?	11	50,00	100,00	82,00
15.	Sejauh mana situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan?	8	35,00	80,00	57,63
16.	Sejauh mana terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)?	8	35,00	90,00	67,50

Tabel 19. 12. Keragaman Kepemilikan

Keragaman Kepemilikan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)?	12	35,00	100,00	77,42

Tabel 19. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik. Yang dimaksud sebagai perusahaan pers adalah, badan usaha yang dikelola sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.	11	56,00	100,00	75,45
19.	Sejauh mana publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	9	30,00	95,00	67,89
20.	Sejauh mana wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers?	9	30,00	100,00	73,56

Tabel 19. 14. Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
21.	Sejauh mana lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik?	11	31,00	100,00	72,36
22.	Sejauh mana pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik?	9	55,00	100,00	69,56
23.	Sejauh mana perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan?	7	50,00	95,00	70,86
24.	Sejauh mana fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini?	10	56,00	100,00	75,80
25.	Sejauh mana Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini?	10	56,00	100,00	77,30
26.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat?	9	31,00	100,00	65,89
27.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik?	6	30,00	90,00	63,50

Tabel 19. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)?	3	70,00	80,00	73,33
2.	Sejauh mana lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers?	3	55,00	70,00	63,33
3.	Sejauh mana peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	9	55,00	90,00	69,11
4.	Sejauh mana aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	10	55,00	100,00	74,50

Tabel 19. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya?	8	50,00	90,00	71,00

Tabel 19. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
6.	Sejauh mana peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya?	7	20,00	100,00	60,14
7.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik?	5	10,00	100,00	62,00
8.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers? Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan.	7	35,00	100,00	65,14
9.	Sejauh mana pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers?	7	70,00	100,00	80,71

Tabel 19. 18. Etika Pers

Etika Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
10	Sejauh mana pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers?	11	56,00	100,00	81,00
11.	Sejauh mana wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik?	12	31,00	100,00	73,92

Tabel 19. 19. Mekanisme Pemulihan

Mekanisme Pemulihan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen?	5	70,00	100,00	83,00
13.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen?	7	50,00	100,00	73,00
14.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen?	5	50,00	85,00	71,00
15.	Sejauh mana aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan?	6	31,00	100,00	74,33
16.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan	8	50,00	100,00	77,50
17.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana?	6	30,00	100,00	76,50

Tabel 19. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra?	5	30,00	100,00	62,40

20. Provinsi Kalimantan Barat

Tabel 20. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini?	12	78,00	98,00	87,92
2.	Sejauh mana wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	12	65,00	100,00	82,83
3.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya?	12	69,00	95,00	82,58
4.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kemerdekaan pers? Dapat dijelaskan dengan memberikan contoh kongkret program yang dijalankan dalam pemajuan kemerdekaan pers. (Meliputi freedom from dan freedom for)	11	65,00	98,00	85,82

Tabel 20. 2. Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini?	12	69,00	100,00	88,33
6.	Sejauh mana pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers?	12	69,00	99,00	87,00
7.	Sejauh mana independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa?	12	55,00	90,00	73,00
8.	Sejauh mana pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan terganggu oleh kepentingan politik, ekonomi, kepentingan pemilik?	12	60,00	96,00	77,00

Tabel 20. 3. Kebebasan dari Kekerasan

Kebebasan dari Kekerasan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
9.	Sejauh mana tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan ?	12	55,00	100,00	84,83
10.	Sejauh mana wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan?	12	55,00	100,00	79,58
11.	Sejauh mana aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan?	12	55,00	89,00	74,92

Tabel 20. 4. Kebebasan Media Alternatif

Kebebasan Media Alternatif		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga?	11	30,00	98,00	77,91
13.	Sejauh mana jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers?	10	60,00	93,00	76,20

Tabel 20. 5. Keragaman Pandangan

Keragaman Pandangan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
14.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini?	12	60,00	95,00	76,33
15.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media?	9	30,00	95,00	72,00
16.	Sejauh mana pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya?	10	40,00	90,00	72,40

Tabel 20. 6. Akurat dan Berimbang

Akurat dan Berimbang		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	12	68,00	90,00	80,83
18.	Sejauh mana wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	11	69,00	98,00	81,45
19.	Seberapa seringkah pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan?	10	50,00	90,00	74,90

Tabel 20. 7. Akses atas Informasi Publik

Akses atas Informasi Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
20.	Sejauh mana terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini?	12	50,00	98,00	82,17
21.	Sejauh mana pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya?	12	55,00	90,00	75,83
22.	Sejauh mana hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers?	10	50,00	97,00	76,60
23.	Sejauh mana wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini?	10	70,00	100,00	83,90

Tabel 20. 8. Pendidikan Insan Pers

Pendidikan Insan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
24.	Sejauh mana di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi?	12	60,00	90,00	81,17

Tabel 20. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
25.	Sejauh mana media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas?	12	55,00	95,00	75,25
26.	Sejauh mana pers menyediakan informasi ramah dan layak anak,	12	55,00	85,00	72,08
27.	Sejauhmana pers menyediakan informasi berperspektif gender,	12	55,00	95,00	73,42
28.	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	12	50,00	95,00	75,17
29.	Sejauh mana pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	11	40,00	90,00	72,00
30.	Sejauh mana media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)?	9	30,00	90,00	60,56

Tabel 20. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers?	12	40,00	100,00	80,00
2.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran?	11	40,00	98,00	80,73
3.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak?	9	50,00	100,00	76,11
4.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak?	9	30,00	100,00	70,00
5.	Sejauh mana alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi?	11	60,00	95,00	75,36
6.	Seberapa besar pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui "berita berbayar"?	12	30,00	85,00	69,75
7.	Sejauh mana alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi?	9	50,00	90,00	75,56
8.	Sejauh mana kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata?	12	60,00	95,00	75,33
9.	Sejauh mana kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu?	12	50,00	85,00	72,33
10.	Sejauh mana konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan?	11	60,00	90,00	76,64

Tabel 20. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
11.	Sejauh mana perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya?	12	70,00	95,00	83,25
12.	Sejauh mana wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi	11	55,00	90,00	74,91
13.	Sejauh mana pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media?	10	70,00	90,00	77,00
14.	Sejauh mana pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers?	12	70,00	95,00	82,58
15.	Sejauh mana situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan?	11	56,00	95,00	74,73
16.	Sejauh mana terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)?	12	59,00	90,00	77,83

Tabel 20. 12. Keragaman Kepemilikan

Keragaman Kepemilikan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)?	12	55,00	95,00	79,50

Tabel 20. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik. Yang dimaksud sebagai perusahaan pers adalah, badan usaha yang dikelola sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.	12	69,00	90,00	80,33
19.	Sejauh mana publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	11	56,00	95,00	74,73
20.	Sejauh mana wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers?	11	40,00	85,00	69,27

Tabel 20. 14. Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
21.	Sejauh mana lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik?	11	30,00	97,00	80,00
22.	Sejauh mana pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik?	10	30,00	95,00	73,30
23.	Sejauh mana perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan?	10	30,00	93,00	70,30
24.	Sejauh mana fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini?	12	10,00	90,00	69,25
25.	Sejauh mana Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini?	11	50,00	95,00	76,73
26.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat?	9	50,00	90,00	73,78
27.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik?	11	50,00	90,00	74,00

Tabel 20. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)?	9	60,00	90,00	78,67
2.	Sejauh mana lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers?	10	60,00	85,00	75,00
3.	Sejauh mana peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	11	31,00	80,00	66,82
4.	Sejauh mana aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	12	56,00	90,00	76,00

Tabel 20. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya?	10	50,00	90,00	73,90

Tabel 20. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
6.	Sejauh mana peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya?	10	70,00	90,00	77,00
7.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik?	12	70,00	90,00	79,92
8.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers? Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan.	12	50,00	95,00	78,25
9.	Sejauh mana pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers?	12	60,00	90,00	78,33

Tabel 20. 18. Etika Pers

Etika Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
10	Sejauh mana pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers?	12	50,00	90,00	70,75
11.	Sejauh mana wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik?	12	70,00	90,00	77,83

Tabel 20. 19. Mekanisme Pemulihan

Mekanisme Pemulihan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen?	9	60,00	90,00	80,44
13.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen?	9	70,00	95,00	83,33
14.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen?	9	69,00	95,00	83,22
15.	Sejauh mana aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan?	11	31,00	85,00	70,09
16.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan	9	60,00	80,00	73,33
17.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana?	9	60,00	80,00	71,11

Tabel 20. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra?	10	30,00	70,00	57,30

21. Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel 21. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini?	10	70,00	95,00	89,00
2.	Sejauh mana wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	10	56,00	95,00	81,10
3.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya?	10	40,00	95,00	79,00
4.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kemerdekaan pers? Dapat dijelaskan dengan memberikan contoh kongkret program yang dijalankan dalam pemajuan kemerdekaan pers. (Meliputi freedom from dan freedom for)	10	50,00	95,00	83,00

Tabel 21. 2. Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini?	11	60,00	95,00	83,18
6.	Sejauh mana pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers?	10	55,00	96,00	80,60
7.	Sejauh mana independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa?	10	50,00	90,00	70,00
8.	Sejauh mana pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan terganggu oleh kepentingan politik, ekonomi, kepentingan pemilik?	10	50,00	90,00	74,70

Tabel 21. 3. Kebebasan dari Kekerasan

Kebebasan dari Kekerasan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
9.	Sejauh mana tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan ?	11	55,00	95,00	79,09
10.	Sejauh mana wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan?	11	55,00	95,00	78,27
11.	Sejauh mana aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan?	11	60,00	97,00	80,27

Tabel 21. 4. Kebebasan Media Alternatif

Kebebasan Media Alternatif		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga?	11	30,00	95,00	69,91
13.	Sejauh mana jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers?	12	55,00	90,00	79,33

Tabel 21. 5. Keragaman Pandangan

Keragaman Pandangan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
14.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini?	12	30,00	95,00	74,00
15.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media?	9	55,00	95,00	75,56
16.	Sejauh mana pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya?	10	72,00	97,00	85,10

Tabel 21. 6. Akurat dan Berimbang

Akurat dan Berimbang		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	12	56,00	95,00	77,42
18.	Sejauh mana wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	11	50,00	90,00	76,82
19.	Seberapa seringkah pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan?	10	50,00	80,00	66,50

Tabel 21. 7. Akses atas Informasi Publik

Akses atas Informasi Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
20.	Sejauh mana terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini?	12	56,00	95,00	81,08
21.	Sejauh mana pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya?	12	56,00	95,00	82,83
22.	Sejauh mana hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers?	10	50,00	92,00	73,20
23.	Sejauh mana wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini?	11	70,00	95,00	85,64

Tabel 21. 8. Pendidikan Insan Pers

Pendidikan Insan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
24.	Sejauh mana di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi?	11	60,00	95,00	84,09

Tabel 21. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
25.	Sejauh mana media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas?	12	60,00	98,00	84,92
26.	Sejauh mana pers menyediakan informasi ramah dan layak anak,	11	70,00	95,00	80,64
27.	Sejauhmana pers menyediakan informasi berperspektif gender,	11	57,00	95,00	80,55
28.	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	11	30,00	95,00	77,00
29.	Sejauh mana pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	10	30,00	96,00	72,30
30.	Sejauh mana media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)?	9	38,00	95,00	66,44

Tabel 21. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers?	12	60,00	95,00	82,50
2.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran?	12	70,00	95,00	85,42
3.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak?	8	69,00	90,00	79,25
4.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak?	8	70,00	90,00	81,25
5.	Sejauh mana alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi?	11	50,00	90,00	71,82
6.	Seberapa besar pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui "berita berbayar"?	10	50,00	90,00	73,50
7.	Sejauh mana alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi?	10	50,00	95,00	71,00
8.	Sejauh mana kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata?	12	50,00	95,00	71,25
9.	Sejauh mana kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu?	10	60,00	85,00	73,50
10.	Sejauh mana konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan?	11	60,00	96,00	77,82

Tabel 21. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
11.	Sejauh mana perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya?	12	40,00	95,00	77,92
12.	Sejauh mana wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi	11	55,00	92,00	69,91
13.	Sejauh mana pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media?	10	57,00	92,00	69,90
14.	Sejauh mana pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers?	12	30,00	95,00	79,50
15.	Sejauh mana situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan?	11	55,00	95,00	74,00
16.	Sejauh mana terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)?	12	50,00	92,00	68,25

Tabel 21. 12. Keragaman Kepemilikan

Keragaman Kepemilikan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)?	12	60,00	95,00	78,83

Tabel 21. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik. Yang dimaksud sebagai perusahaan pers adalah, badan usaha yang dikelola sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.	11	60,00	90,00	75,27
19.	Sejauh mana publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	10	50,00	80,00	64,50
20.	Sejauh mana wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers?	10	30,00	90,00	58,90

Tabel 21. 14. Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
21.	Sejauh mana lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik?	12	60,00	95,00	80,58
22.	Sejauh mana pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik?	11	30,00	90,00	72,73
23.	Sejauh mana perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan?	10	50,00	92,00	77,60
24.	Sejauh mana fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini?	12	50,00	92,00	75,42
25.	Sejauh mana Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini?	11	65,00	90,00	75,45
26.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat?	12	30,00	92,00	68,50
27.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik?	11	10,00	92,00	64,73

Tabel 21. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)?	9	55,00	85,00	70,56
2.	Sejauh mana lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers?	11	55,00	85,00	70,00
3.	Sejauh mana peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	10	30,00	90,00	71,40
4.	Sejauh mana aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	12	50,00	93,00	73,08

Tabel 21. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya?	11	30,00	93,00	72,27

Tabel 21. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
6.	Sejauh mana peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya?	7	30,00	93,00	75,43
7.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik?	7	30,00	90,00	74,29
8.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers? Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan.	9	30,00	90,00	72,67
9.	Sejauh mana pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers?	12	30,00	90,00	74,33

Tabel 21. 18. Etika Pers

Etika Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
10.	Sejauh mana pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers?	12	50,00	95,00	77,00
11.	Sejauh mana wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik?	12	60,00	93,00	77,33

Tabel 21. 19. Mekanisme Pemulihan

Mekanisme Pemulihan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen?	9	60,00	90,00	73,89
13.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen?	11	40,00	93,00	70,73
14.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen?	11	10,00	92,00	70,18
15.	Sejauh mana aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan?	10	55,00	90,00	75,00
16.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan	8	55,00	90,00	72,88
17.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana?	8	50,00	80,00	65,63

Tabel 21. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra?	11	30,00	90,00	59,09

22. Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 22. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini?	12	70,00	95,00	84,92
2.	Sejauh mana wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	12	70,00	95,00	82,83
3.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya?	12	69,00	90,00	84,33
4.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kemerdekaan pers? Dapat dijelaskan dengan memberikan contoh kongkret program yang dijalankan dalam pemajuan kemerdekaan pers. (Meliputi freedom from dan freedom for)	12	69,00	95,00	86,42

Tabel 22. 2. Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini?	10	56,00	95,00	84,00
6.	Sejauh mana pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers?	11	56,00	100,00	81,64
7.	Sejauh mana independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa?	12	31,00	90,00	67,58
8.	Sejauh mana pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan terganggu oleh kepentingan politik, ekonomi, kepentingan pemilik?	12	55,00	95,00	70,33

Tabel 22. 3. Kebebasan dari Kekerasan

Kebebasan dari Kekerasan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
9.	Sejauh mana tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan ?	11	59,00	100,00	84,91
10.	Sejauh mana wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan?	11	56,00	95,00	80,27
11.	Sejauh mana aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan?	12	65,00	95,00	85,33

Tabel 22. 4. Kebebasan Media Alternatif

Kebebasan Media Alternatif		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga?	12	56,00	95,00	82,83
13.	Sejauh mana jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers?	12	70,00	100,00	84,58

Tabel 22. 5. Keragaman Pandangan

Keragaman Pandangan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
14.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini?	12	75,00	95,00	85,50
15.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media?	12	75,00	100,00	88,33
16.	Sejauh mana pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya?	11	70,00	100,00	88,09

Tabel 22. 6. Akurat dan Berimbang

Akurat dan Berimbang		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	12	65,00	95,00	83,67
18.	Sejauh mana wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	12	69,00	90,00	79,83
19.	Seberapa seringkah pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan?	12	55,00	95,00	74,17

Tabel 22. 7. Akses atas Informasi Publik

Akses atas Informasi Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
20.	Sejauh mana terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini?	12	75,00	100,00	91,58
21.	Sejauh mana pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya?	12	75,00	95,00	89,17
22.	Sejauh mana hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers?	11	69,00	95,00	83,00
23.	Sejauh mana wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini?	12	80,00	890,00	156,58

Tabel 22. 8. Pendidikan Insan Pers

Pendidikan Insan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
24.	Sejauh mana di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi?	12	56,00	95,00	86,33

Tabel 22. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
25.	Sejauh mana media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas?	12	56,00	100,00	83,67
26.	Sejauh mana pers menyediakan informasi ramah dan layak anak,	12	56,00	95,00	80,83
27.	Sejauhmana pers menyediakan informasi berperspektif gender,	12	69,00	95,00	84,82
28.	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	12	58,00	95,00	85,17
29.	Sejauh mana pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	12	65,00	95,00	84,42
30.	Sejauh mana media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)?	12	45,00	90,00	67,92

Tabel 22. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers?	12	50,00	95,00	83,58
2.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran?	12	60,00	90,00	77,42
3.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak?	11	58,00	100,00	81,18
4.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak?	10	58,00	100,00	80,30
5.	Sejauh mana alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi?	12	60,00	90,00	77,92
6.	Seberapa besar pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui "berita berbayar"?	12	55,00	90,00	74,08
7.	Sejauh mana alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi?	12	56,00	100,00	75,08
8.	Sejauh mana kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata?	12	55,00	90,00	71,92
9.	Sejauh mana kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu?	12	55,00	95,00	77,83
10.	Sejauh mana konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan?	12	56,00	95,00	80,42

Tabel 22. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
11.	Sejauh mana perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya?	12	65,00	95,00	84,00
12.	Sejauh mana wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi	12	40,00	90,00	66,67
13.	Sejauh mana pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media?	12	40,00	95,00	65,83
14.	Sejauh mana pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers?	12	65,00	95,00	81,58
15.	Sejauh mana situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan?	12	40,00	90,00	67,00
16.	Sejauh mana terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)?	12	55,00	92,00	71,00

Tabel 22. 12. Keragaman Kepemilikan

Keragaman Kepemilikan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)?	12	65,00	90,00	82,00

Tabel 22. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik. Yang dimaksud sebagai perusahaan pers adalah, badan usaha yang dikelola sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.	12	55,00	90,00	72,42
19.	Sejauh mana publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	12	55,00	90,00	73,17
20.	Sejauh mana wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers?	10	60,00	95,00	76,40

Tabel 22. 14. Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
21.	Sejauh mana lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik?	12	65,00	95,00	84,50
22.	Sejauh mana pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik?	12	45,00	100,00	78,75
23.	Sejauh mana perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan?	11	69,00	95,00	80,82
24.	Sejauh mana fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini?	12	60,00	95,00	79,42
25.	Sejauh mana Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini?	12	69,00	95,00	84,42
26.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat?	12	60,00	90,00	79,08
27.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik?	11	60,00	90,00	80,27

Tabel 22. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)?	10	70,00	90,00	79,00
2.	Sejauh mana lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers?	12	70,00	90,00	80,00
3.	Sejauh mana peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	12	65,00	90,00	78,75
4.	Sejauh mana aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	12	45,00	90,00	71,67

Tabel 22. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya?	11	40,00	90,00	74,36

Tabel 22. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
6.	Sejauh mana peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya?	10	56,00	100,00	83,10
7.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik?	11	65,00	95,00	83,45
8.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers? Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan.	11	55,00	100,00	79,64
9.	Sejauh mana pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers?	11	65,00	95,00	79,45

Tabel 22. 18. Etika Pers

Etika Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
10	Sejauh mana pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers?	12	70,00	90,00	86,17
11.	Sejauh mana wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik?	12	60,00	90,00	75,75

Tabel 22. 19. Mekanisme Pemulihan

Mekanisme Pemulihan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen?	12	70,00	100,00	86,08
13.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen?	12	65,00	90,00	81,92
14.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen?	11	65,00	100,00	86,64
15.	Sejauh mana aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan?	11	70,00	95,00	81,82
16.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan	10	70,00	100,00	84,50
17.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana?	9	40,00	100,00	80,00

Tabel 22. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra?	11	30,00	90,00	63,18

23. Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 23. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini?	12	70,00	95,00	86,17
2.	Sejauh mana wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	12	40,00	85,00	70,50
3.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya?	12	56,00	95,00	76,75
4.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kemerdekaan pers? Dapat dijelaskan dengan memberikan contoh kongkret program yang dijalankan dalam pemajuan kemerdekaan pers. (Meliputi freedom from dan freedom for)	11	70,00	100,00	79,55

Tabel 23. 2. Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini?	12	65,00	90,00	82,58
6.	Sejauh mana pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers?	12	56,00	95,00	83,00
7.	Sejauh mana independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa?	12	31,00	90,00	71,25
8.	Sejauh mana pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan terganggu oleh kepentingan politik, ekonomi, kepentingan pemilik?	12	35,00	90,00	73,58

Tabel 23. 3. Kebebasan dari Kekerasan

Kebebasan dari Kekerasan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
9.	Sejauh mana tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan ?	6	60,00	90,00	78,33
10.	Sejauh mana wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan?	12	56,00	90,00	78,42
11.	Sejauh mana aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan?	12	35,00	90,00	76,67

Tabel 23. 4. Kebebasan Media Alternatif

Kebebasan Media Alternatif		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga?	12	31,00	95,00	72,00
13.	Sejauh mana jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers?	12	55,00	95,00	79,58

Tabel 23. 5. Keragaman Pandangan

Keragaman Pandangan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
14.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini?	11	30,00	90,00	67,82
15.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media?	11	30,00	90,00	73,64
16.	Sejauh mana pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya?	10	69,00	95,00	83,60

Tabel 23. 6. Akurat dan Berimbang

Akurat dan Berimbang		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	12	40,00	100,00	78,25
18.	Sejauh mana wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	12	30,00	90,00	75,00
19.	Seberapa seringkah pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan?	11	30,00	90,00	70,82

Tabel 23.7. Akses atas Informasi Publik

Akses atas Informasi Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
20.	Sejauh mana terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini?	12	70,00	100,00	87,08
21.	Sejauh mana pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya?	12	30,00	90,00	74,67
22.	Sejauh mana hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers?	10	30,00	95,00	78,00
23.	Sejauh mana wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini?	12	70,00	95,00	82,58

Tabel 23. 8. Pendidikan Insan Pers

Pendidikan Insan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
24.	Sejauh mana di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi?	11	30,00	95,00	76,91

Tabel 23. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
25.	Sejauh mana media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas?	12	31,00	95,00	68,00
26.	Sejauh mana pers menyediakan informasi ramah dan layak anak,	12	30,00	100,00	73,42
27.	Sejauhmana pers menyediakan informasi berperspektif gender,	12	10,00	90,00	64,92
28.	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	12	30,00	90,00	68,25
29.	Sejauh mana pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	11	10,00	90,00	61,45
30.	Sejauh mana media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)?	12	35,00	85,00	60,83

Tabel 23. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers?	11	56,00	95,00	81,09
2.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran?	11	40,00	90,00	75,45
3.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak?	11	69,00	95,00	79,00
4.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak?	11	69,00	95,00	78,55
5.	Sejauh mana alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi?	11	35,00	75,00	59,18
6.	Seberapa besar pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui "berita berbayar"?	12	35,00	78,00	60,17
7.	Sejauh mana alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi?	12	35,00	90,00	71,67
8.	Sejauh mana kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata?	12	31,00	90,00	65,92
9.	Sejauh mana kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu?	11	40,00	95,00	72,82
10.	Sejauh mana konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan?	11	50,00	95,00	77,64

Tabel 23. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
11.	Sejauh mana perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya?	12	55,00	95,00	80,33
12.	Sejauh mana wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi	12	35,00	90,00	69,08
13.	Sejauh mana pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media?	12	35,00	90,00	68,42
14.	Sejauh mana pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers?	12	60,00	95,00	79,00
15.	Sejauh mana situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan?	11	31,00	90,00	63,82
16.	Sejauh mana terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)?	11	40,00	90,00	68,82

Tabel 23. 12. Keragaman Kepemilikan

Keragaman Kepemilikan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)?	12	30,00	95,00	81,25

Tabel 23. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik. Yang dimaksud sebagai perusahaan pers adalah, badan usaha yang dikelola sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.	11	50,00	90,00	76,64
19.	Sejauh mana publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	12	40,00	90,00	69,58
20.	Sejauh mana wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers?	11	50,00	95,00	73,45

Tabel 23. 14. Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
21.	Sejauh mana lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik?	12	50,00	90,00	76,58
22.	Sejauh mana pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik?	12	30,00	100,00	75,17
23.	Sejauh mana perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan?	11	30,00	90,00	79,09
24.	Sejauh mana fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini?	11	50,00	90,00	74,09
25.	Sejauh mana Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini?	11	30,00	95,00	71,18
26.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat?	11	40,00	90,00	74,91
27.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik?	11	40,00	90,00	72,55

Tabel 23. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)?	10	70,00	90,00	81,00
2.	Sejauh mana lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers?	12	56,00	90,00	78,42
3.	Sejauh mana peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	11	40,00	90,00	73,55
4.	Sejauh mana aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	12	50,00	90,00	77,50

Tabel 23. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya?	12	40,00	90,00	74,17

Tabel 23. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
6.	Sejauh mana peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya?	10	50,00	90,00	76,50
7.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik?	10	50,00	100,00	78,60
8.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers? Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan.	11	40,00	90,00	73,27
9.	Sejauh mana pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers?	10	40,00	85,00	73,10

Tabel 23. 18. Etika Pers

Etika Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
10.	Sejauh mana pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers?	11	40,00	90,00	75,91
11.	Sejauh mana wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik?	11	50,00	95,00	76,27

Tabel 23. 19. Mekanisme Pemulihan

Mekanisme Pemulihan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen?	10	56,00	95,00	79,60
13.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen?	11	40,00	95,00	75,45
14.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen?	11	80,00	100,00	86,27
15.	Sejauh mana aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan?	11	50,00	90,00	79,36
16.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan	11	50,00	95,00	78,09
17.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana?	10	50,00	90,00	73,00

Tabel 23. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra?	10	40,00	80,00	60,70

24. Provinsi Kalimantan Utara

Tabel 24. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini?	12	75,00	99,00	83,83
2.	Sejauh mana wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	10	50,00	90,00	80,30
3.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya?	11	75,00	95,00	86,18
4.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kemerdekaan pers? Dapat dijelaskan dengan memberikan contoh kongkret program yang dijalankan dalam pemajuan kemerdekaan pers. (Meliputi freedom from dan freedom for)	10	70,00	99,00	88,30

Tabel 24. 2. Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini?	11	40,00	95,00	76,45
6.	Sejauh mana pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers?	11	40,00	90,00	73,27
7.	Sejauh mana independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa?	11	40,00	92,00	75,45
8.	Sejauh mana pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan terganggu oleh kepentingan politik, ekonomi, kepentingan pemilik?	12	60,00	90,00	79,75

Tabel 24. 3. Kebebasan dari Kekerasan

Kebebasan dari Kekerasan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
9.	Sejauh mana tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan ?	11	58,00	100,00	84,45
10.	Sejauh mana wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan?	10	40,00	100,00	73,60
11.	Sejauh mana aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan?	12	80,00	100,00	86,08

Tabel 24. 4. Kebebasan Media Alternatif

Kebebasan Media Alternatif		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga?	12	68,00	100,00	85,25
13.	Sejauh mana jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers?	11	60,00	100,00	84,64

Tabel 24. 5. Keragaman Pandangan

Keragaman Pandangan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
14.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini?	11	40,00	100,00	78,64
15.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media?	10	50,00	90,00	76,90
16.	Sejauh mana pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya?	9	70,00	95,00	82,44

Tabel 24. 6. Akurat dan Berimbang

Akurat dan Berimbang		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	11	60,00	96,00	82,73
18.	Sejauh mana wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	10	40,00	93,00	78,60
19.	Seberapa seringkah pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan?	11	40,00	95,00	76,27

Tabel 24. 7. Akses atas Informasi Publik

Akses atas Informasi Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
20.	Sejauh mana terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini?	12	56,00	95,00	80,42
21.	Sejauh mana pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya?	12	70,00	95,00	82,58
22.	Sejauh mana hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers?	8	70,00	90,00	80,63
23.	Sejauh mana wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini?	11	70,00	93,00	81,36

Tabel 24. 8. Pendidikan Insan Pers

Pendidikan Insan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
24.	Sejauh mana di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi?	11	50,00	96,00	76,27

Tabel 24. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
25.	Sejauh mana media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas?	10	60,00	97,00	83,20
26.	Sejauh mana pers menyediakan informasi ramah dan layak anak,	11	60,00	97,00	78,91
27.	Sejauhmana pers menyediakan informasi berperspektif gender,	11	35,00	97,00	79,45
28.	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	11	70,00	93,00	84,18
29.	Sejauh mana pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	10	70,00	95,00	81,30
30.	Sejauh mana media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)?	11	40,00	92,00	70,36

Tabel 24. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers?	11	40,00	92,00	79,00
2.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran?	11	40,00	90,00	73,18
3.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak?	9	40,00	90,00	78,89
4.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak?	9	40,00	90,00	75,89
5.	Sejauh mana alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi?	10	30,00	89,00	64,90
6.	Seberapa besar pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui "berita berbayar"?	10	40,00	90,00	74,10
7.	Sejauh mana alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi?	10	40,00	90,00	72,70
8.	Sejauh mana kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata?	11	40,00	90,00	73,18
9.	Sejauh mana kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu?	9	40,00	95,00	74,67
10.	Sejauh mana konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan?	10	40,00	90,00	74,50

Tabel 24. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
11.	Sejauh mana perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya?	11	40,00	100,00	79,00
12.	Sejauh mana wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi	11	57,00	95,00	73,00
13.	Sejauh mana pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media?	10	40,00	95,00	71,90
14.	Sejauh mana pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers?	12	40,00	95,00	79,83
15.	Sejauh mana situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan?	11	60,00	95,00	75,27
16.	Sejauh mana terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)?	10	40,00	90,00	76,90

Tabel 24. 12. Keragaman Kepemilikan

Keragaman Kepemilikan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)?	11	40,00	90,00	73,45

Tabel 24. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik. Yang dimaksud sebagai perusahaan pers adalah, badan usaha yang dikelola sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.	11	70,00	90,00	82,00
19.	Sejauh mana publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	10	40,00	90,00	74,70
20.	Sejauh mana wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers?	11	40,00	90,00	75,73

Tabel 24. 14. Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
21.	Sejauh mana lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik?	12	75,00	95,00	85,42
22.	Sejauh mana pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik?	11	40,00	95,00	74,00
23.	Sejauh mana perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan?	10	40,00	90,00	70,80
24.	Sejauh mana fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini?	12	70,00	92,00	85,08
25.	Sejauh mana Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini?	10	70,00	95,00	84,50
26.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat?	6	69,00	90,00	77,83
27.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik?	6	65,00	88,00	78,50

Tabel 24. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)?	11	69,00	90,00	82,91
2.	Sejauh mana lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers?	10	40,00	90,00	76,10
3.	Sejauh mana peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	12	65,00	90,00	78,92
4.	Sejauh mana aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	12	70,00	90,00	82,08

Tabel 24. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya?	11	60,00	90,00	77,73

Tabel 24. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
6.	Sejauh mana peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya?	10	40,00	90,00	75,00
7.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik?	8	80,00	90,00	85,25
8.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers? Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan.	11	40,00	90,00	75,36
9.	Sejauh mana pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers?	10	60,00	90,00	78,40

Tabel 24. 18. Etika Pers

Etika Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
10	Sejauh mana pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers?	11	70,00	90,00	81,18
11	Sejauh mana wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik?	11	60,00	95,00	81,00

Tabel 24. 19. Mekanisme Pemulihan

Mekanisme Pemulihan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12	Sejauh mana kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen?	8	60,00	90,00	78,25
13	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen?	6	40,00	88,00	72,00
14	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen?	7	40,00	88,00	73,43
15	Sejauh mana aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan?	12	70,00	93,00	81,17
16	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan	11	60,00	90,00	79,00
17	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana?	10	60,00	90,00	76,10

Tabel 24. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18	Sejauh mana peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra?	11	40,00	90,00	75,91

25. Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel 25. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini?	12	65,00	100,00	85,83
2.	Sejauh mana wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	12	60,00	100,00	74,92
3.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya?	12	50,00	90,00	75,33
4.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kemerdekaan pers? Dapat dijelaskan dengan memberikan contoh kongkret program yang dijalankan dalam pemajuan kemerdekaan pers. (Meliputi freedom from dan freedom for)	12	60,00	95,00	77,50

Tabel 25. 2. Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini?	11	70,00	90,00	82,27
6.	Sejauh mana pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers?	9	60,00	95,00	78,89
7.	Sejauh mana independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa?	12	60,00	95,00	75,75
8.	Sejauh mana pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan terganggu oleh kepentingan politik, ekonomi, kepentingan pemilik?	12	60,00	100,00	74,17

Tabel 25. 3. Kebebasan dari Kekerasan

Kebebasan dari Kekerasan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
9.	Sejauh mana tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan ?	11	56,00	89,00	77,45
10.	Sejauh mana wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan?	11	65,00	90,00	77,27
11.	Sejauh mana aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan?	11	59,00	90,00	76,64

Tabel 25. 4. Kebebasan Media Alternatif

Kebebasan Media Alternatif		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga?	12	60,00	90,00	80,83
13.	Sejauh mana jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers?	12	50,00	90,00	78,67

Tabel 25. 5. Keragaman Pandangan

Keragaman Pandangan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
14.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini?	11	30,00	90,00	70,09
15.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media?	11	30,00	90,00	70,64
16.	Sejauh mana pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya?	10	59,00	90,00	81,90

Tabel 25. 6. Akurat dan Berimbang

Akurat dan Berimbang		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	12	60,00	100,00	82,42
18.	Sejauh mana wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	11	60,00	90,00	74,45
19.	Seberapa seringkah pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan?	11	50,00	90,00	75,09

Tabel 25. 7. Akses atas Informasi Publik

Akses atas Informasi Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
20.	Sejauh mana terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini?	12	55,00	100,00	85,83
21.	Sejauh mana pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya?	12	31,00	90,00	73,08
22.	Sejauh mana hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers?	10	55,00	90,00	76,40
23.	Sejauh mana wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini?	11	56,00	100,00	73,73

Tabel 25. 8. Pendidikan Insan Pers

Pendidikan Insan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
24.	Sejauh mana di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi?	11	56,00	95,00	71,55

Tabel 25. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
25.	Sejauh mana media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas?	12	50,00	90,00	77,00
26.	Sejauh mana pers menyediakan informasi ramah dan layak anak,	12	60,00	90,00	74,50
27.	Sejauhmana pers menyediakan informasi berperspektif gender,	11	60,00	100,00	77,18
28.	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	12	56,00	85,00	72,42
29.	Sejauh mana pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	11	50,00	89,00	69,82
30.	Sejauh mana media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)?	12	29,00	80,00	56,83

Tabel 25. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers?	11	60,00	100,00	81,82
2.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran?	10	57,00	100,00	80,70
3.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak?	11	65,00	100,00	82,64
4.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak?	10	70,00	89,00	79,70
5.	Sejauh mana alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi?	11	40,00	95,00	71,27
6.	Seberapa besar pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui "berita berbayar"?	11	40,00	90,00	68,91
7.	Sejauh mana alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi?	10	30,00	90,00	69,50
8.	Sejauh mana kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata?	12	30,00	90,00	68,67
9.	Sejauh mana kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu?	11	30,00	85,00	65,00
10.	Sejauh mana konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan?	12	60,00	89,00	71,42

Tabel 25. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
11.	Sejauh mana perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya?	12	60,00	85,00	72,83
12.	Sejauh mana wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi	11	30,00	75,00	59,45
13.	Sejauh mana pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media?	12	30,00	80,00	58,75
14.	Sejauh mana pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers?	12	50,00	92,00	81,33
15.	Sejauh mana situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan?	12	30,00	90,00	69,83
16.	Sejauh mana terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)?	10	30,00	90,00	67,30

Tabel 25. 12. Keragaman Kepemilikan

Keragaman Kepemilikan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)?	11	50,00	100,00	78,64

Tabel 25. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik. Yang dimaksud sebagai perusahaan pers adalah, badan usaha yang dikelola sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.	12	70,00	100,00	78,75
19.	Sejauh mana publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	10	50,00	100,00	73,50
20.	Sejauh mana wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers?	10	30,00	90,00	61,60

Tabel 25. 14. Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
21.	Sejauh mana lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik?	12	70,00	90,00	80,00
22.	Sejauh mana pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik?	12	67,00	90,00	78,42
23.	Sejauh mana perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan?	10	70,00	90,00	81,00
24.	Sejauh mana fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini?	12	60,00	100,00	81,67
25.	Sejauh mana Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini?	11	60,00	90,00	75,45
26.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat?	12	56,00	90,00	77,50
27.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik?	12	55,00	90,00	75,50

Tabel 25. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)?	9	55,00	90,00	77,22
2.	Sejauh mana lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers?	9	40,00	85,00	66,11
3.	Sejauh mana peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	11	60,00	90,00	76,82
4.	Sejauh mana aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	12	60,00	90,00	74,92

Tabel 25. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya?	12	60,00	90,00	77,92

Tabel 25. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
6.	Sejauh mana peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya?	11	20,00	90,00	66,91
7.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik?	9	20,00	90,00	68,44
8.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers? Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan.	10	20,00	85,00	69,90
9.	Sejauh mana pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers?	9	20,00	90,00	71,11

Tabel 25. 18. Etika Pers

Etika Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
10.	Sejauh mana pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers?	12	60,00	90,00	73,33
11.	Sejauh mana wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik?	12	55,00	90,00	70,83

Tabel 25. 19. Mekanisme Pemulihan

Mekanisme Pemulihan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen?	10	65,00	90,00	79,00
13.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen?	10	65,00	90,00	76,00
14.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen?	9	70,00	90,00	76,67
15.	Sejauh mana aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan?	10	56,00	90,00	71,50
16.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan	9	20,00	90,00	64,67
17.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana?	9	50,00	90,00	67,89

Tabel 25. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra?	11	20,00	80,00	55,00

26. Provinsi Sulawesi Barat

Tabel 26. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini?	12	80,00	100,00	88,17
2.	Sejauh mana wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	12	69,00	90,00	85,25
3.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya?	12	70,00	100,00	86,67
4.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kemerdekaan pers? Dapat dijelaskan dengan memberikan contoh kongkret program yang dijalankan dalam pemajuan kemerdekaan pers. (Meliputi freedom from dan freedom for)	12	60,00	100,00	80,75

Tabel 26. 2. Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini?	12	60,00	100,00	86,17
6.	Sejauh mana pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers?	12	69,00	100,00	87,33
7.	Sejauh mana independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa?	12	60,00	100,00	79,33
8.	Sejauh mana pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan terganggu oleh kepentingan politik, ekonomi, kepentingan pemilik?	12	50,00	100,00	77,75

Tabel 26. 3. Kebebasan dari Kekerasan

Kebebasan dari Kekerasan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
9.	Sejauh mana tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan ?	12	60,00	100,00	83,58
10.	Sejauh mana wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan?	12	69,00	100,00	83,58
11.	Sejauh mana aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan?	12	60,00	100,00	87,50

Tabel 26. 4. Kebebasan Media Alternatif

Kebebasan Media Alternatif		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga?	12	50,00	100,00	78,67
13.	Sejauh mana jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers?	12	50,00	100,00	79,00

Tabel 26. 5. Keragaman Pandangan

Keragaman Pandangan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
14.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini?	12	50,00	100,00	78,58
15.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media?	12	55,00	100,00	79,92
16.	Sejauh mana pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya?	12	69,00	100,00	86,50

Tabel 26. 6. Akurat dan Berimbang

Akurat dan Berimbang		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	12	60,00	100,00	81,83
18.	Sejauh mana wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	12	20,00	100,00	77,33
19.	Seberapa seringkah pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan?	11	69,00	100,00	84,82

Tabel 26. 7. Akses atas Informasi Publik

Akses atas Informasi Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
20.	Sejauh mana terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini?	12	60,00	100,00	85,25
21.	Sejauh mana pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya?	12	50,00	100,00	81,08
22.	Sejauh mana hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers?	12	69,00	100,00	86,33
23.	Sejauh mana wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini?	11	70,00	100,00	88,18

Tabel 26. 8. Pendidikan Insan Pers

Pendidikan Insan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
24.	Sejauh mana di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi?	12	50,00	100,00	77,33

Tabel 26. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
25.	Sejauh mana media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas?	12	50,00	100,00	83,25
26.	Sejauh mana pers menyediakan informasi ramah dan layak anak,	12	10,00	100,00	67,42
27.	Sejauhmana pers menyediakan informasi berperspektif gender,	12	40,00	100,00	73,25
28.	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	12	10,00	100,00	74,00
29.	Sejauh mana pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	12	30,00	100,00	70,83
30.	Sejauh mana media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)?	12	50,00	60,00	55,83

Tabel 26. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers?	12	55,00	100,00	82,42
2.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran?	11	55,00	100,00	81,82
3.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak?	12	10,00	100,00	70,00
4.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak?	12	55,00	100,00	76,58
5.	Sejauh mana alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi?	12	30,00	100,00	69,92
6.	Seberapa besar pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui "berita berbayar"?	12	20,00	100,00	70,33
7.	Sejauh mana alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi?	11	10,00	95,00	65,18
8.	Sejauh mana kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata?	12	10,00	100,00	68,42
9.	Sejauh mana kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu?	12	55,00	90,00	73,58
10.	Sejauh mana konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan?	10	50,00	90,00	69,80

Tabel 26. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
11.	Sejauh mana perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya?	12	70,00	100,00	84,08
12.	Sejauh mana wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi	12	40,00	100,00	70,33
13.	Sejauh mana pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media?	12	30,00	85,00	61,58
14.	Sejauh mana pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers?	12	40,00	100,00	80,75
15.	Sejauh mana situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan?	12	30,00	90,00	69,00
16.	Sejauh mana terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)?	12	50,00	90,00	71,92

Tabel 26. 12. Keragaman Kepemilikan

Keragaman Kepemilikan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)?	12	50,00	90,00	79,42

Tabel 26. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik. Yang dimaksud sebagai perusahaan pers adalah, badan usaha yang dikelola sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.	12	50,00	90,00	70,75
19.	Sejauh mana publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	12	10,00	90,00	65,75
20.	Sejauh mana wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers?	12	10,00	80,00	56,08

Tabel 26. 14. Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
21.	Sejauh mana lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik?	12	55,00	100,00	77,75
22.	Sejauh mana pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik?	12	30,00	100,00	65,83
23.	Sejauh mana perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan?	12	55,00	100,00	83,25
24.	Sejauh mana fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini?	12	50,00	100,00	76,25
25.	Sejauh mana Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini?	12	55,00	100,00	79,92
26.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat?	12	55,00	100,00	76,58
27.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik?	12	55,00	100,00	77,42

Tabel 26. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)?	10	30,00	100,00	74,50
2.	Sejauh mana lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers?	10	30,00	100,00	77,30
3.	Sejauh mana peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	11	50,00	89,00	68,09
4.	Sejauh mana aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	11	60,00	100,00	79,00

Tabel 26. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya?	11	30,00	89,00	64,45

Tabel 26. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
6.	Sejauh mana peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya?	10	30,00	100,00	68,80
7.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik?	11	30,00	90,00	63,91
8.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers? Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan.	11	30,00	90,00	70,27
9.	Sejauh mana pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers?	11	30,00	89,00	65,64

Tabel 26. 18. Etika Pers

Etika Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
10	Sejauh mana pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers?	11	55,00	90,00	77,09
11.	Sejauh mana wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik?	11	55,00	100,00	73,09

Tabel 26. 19. Mekanisme Pemulihan

Mekanisme Pemulihan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen?	11	30,00	100,00	73,55
13.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen?	11	50,00	100,00	76,18
14.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen?	11	55,00	100,00	77,09
15.	Sejauh mana aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan?	11	30,00	90,00	71,64
16.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan	10	30,00	100,00	62,40
17.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana?	10	30,00	100,00	65,90

Tabel 26. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra?	10	30,00	70,00	48,00

27. Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel 27. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini?	12	75,00	100,00	89,25
2.	Sejauh mana wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	11	75,00	98,00	88,55
3.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya?	12	57,00	95,00	80,67
4.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kemerdekaan pers? Dapat dijelaskan dengan memberikan contoh kongkret program yang dijalankan dalam pemajuan kemerdekaan pers. (Meliputi freedom from dan freedom for)	11	70,00	100,00	83,73

Tabel 27. 2. Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini?	10	60,00	98,00	83,00
6.	Sejauh mana pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers?	7	50,00	98,00	81,86
7.	Sejauh mana independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa?	12	32,00	100,00	70,25
8.	Sejauh mana pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan terganggu oleh kepentingan politik, ekonomi, kepentingan pemilik?	9	50,00	98,00	76,00

Tabel 27. 3. Kebebasan dari Kekerasan

Kebebasan dari Kekerasan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
9.	Sejauh mana tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan ?	11	40,00	95,00	75,00
10.	Sejauh mana wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan?	12	50,00	95,00	70,17
11.	Sejauh mana aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan?	9	58,00	98,00	79,56

Tabel 27. 4. Kebebasan Media Alternatif

Kebebasan Media Alternatif		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga?	12	31,00	95,00	74,75
13.	Sejauh mana jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers?	12	56,00	95,00	79,08

Tabel 27. 5. Keragaman Pandangan

Keragaman Pandangan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
14.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini?	12	31,00	100,00	72,75
15.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media?	8	56,00	100,00	81,75
16.	Sejauh mana pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya?	10	58,00	98,00	82,90

Tabel 27. 6. Akurat dan Berimbang

Akurat dan Berimbang		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	10	56,00	100,00	79,20
18.	Sejauh mana wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	12	55,00	95,00	77,25
19.	Seberapa seringkah pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan?	8	50,00	98,00	77,00

Tabel 27. 7. Akses atas Informasi Publik

Akses atas Informasi Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
20.	Sejauh mana terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini?	12	31,00	100,00	82,08
21.	Sejauh mana pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya?	12	56,00	100,00	76,50
22.	Sejauh mana hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers?	9	30,00	98,00	76,56
23.	Sejauh mana wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini?	11	69,00	95,00	83,91

Tabel 27. 8. Pendidikan Insan Pers

Pendidikan Insan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
24.	Sejauh mana di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi?	11	56,00	95,00	77,18

Tabel 27. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
25.	Sejauh mana media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas?	10	31,00	100,00	81,60
26.	Sejauh mana pers menyediakan informasi ramah dan layak anak,	11	56,00	95,00	71,09
27.	Sejauhmana pers menyediakan informasi berperspektif gender,	12	56,00	95,00	80,92
28.	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	11	60,00	95,00	79,00
29.	Sejauh mana pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	10	32,00	95,00	71,60
30.	Sejauh mana media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)?	12	10,00	69,00	47,83

Tabel 27. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers?	9	56,00	100,00	79,67
2.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran?	10	32,00	100,00	76,80
3.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak?	9	57,00	98,00	79,11
4.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak?	8	57,00	98,00	79,00
5.	Sejauh mana alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi?	9	57,00	98,00	77,56
6.	Seberapa besar pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui "berita berbayar"?	9	57,00	98,00	73,56
7.	Sejauh mana alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi?	9	56,00	98,00	71,78
8.	Sejauh mana kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata?	11	69,00	95,00	81,09
9.	Sejauh mana kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu?	10	65,00	95,00	82,20
10.	Sejauh mana konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan?	10	70,00	95,00	86,10

Tabel 27. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
11.	Sejauh mana perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya?	12	69,00	98,00	87,08
12.	Sejauh mana wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi	9	57,00	95,00	77,78
13.	Sejauh mana pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media?	9	57,00	95,00	78,33
14.	Sejauh mana pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers?	12	56,00	100,00	81,75
15.	Sejauh mana situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan?	9	50,00	95,00	75,56
16.	Sejauh mana terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)?	11	56,00	90,00	72,36

Tabel 27. 12. Keragaman Kepemilikan

Keragaman Kepemilikan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)?	10	69,00	98,00	81,00

Tabel 27. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik. Yang dimaksud sebagai perusahaan pers adalah, badan usaha yang dikelola sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.	11	70,00	90,00	79,45
19.	Sejauh mana publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	7	30,00	95,00	65,00
20.	Sejauh mana wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers?	10	55,00	95,00	69,20

Tabel 27. 14. Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
21.	Sejauh mana lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik?	12	70,00	98,00	84,17
22.	Sejauh mana pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik?	12	56,00	95,00	79,67
23.	Sejauh mana perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan?	8	70,00	95,00	83,00
24.	Sejauh mana fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini?	12	56,00	98,00	77,67
25.	Sejauh mana Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini?	10	56,00	98,00	82,20
26.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat?	11	31,00	95,00	75,45
27.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik?	11	31,00	98,00	70,91

Tabel 27. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)?	10	56,00	100,00	77,50
2.	Sejauh mana lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers?	10	32,00	95,00	72,70
3.	Sejauh mana peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	11	55,00	95,00	72,73
4.	Sejauh mana aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	12	31,00	95,00	64,50

Tabel 27. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya?	11	56,00	95,00	75,00

Tabel 27. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
6.	Sejauh mana peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya?	6	70,00	90,00	80,67
7.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik?	9	56,00	95,00	78,22
8.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers? Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan.	9	70,00	100,00	85,22
9.	Sejauh mana pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers?	10	56,00	100,00	80,20

Tabel 27. 18. Etika Pers

Etika Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
10.	Sejauh mana pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers?	10	56,00	95,00	78,50
11.	Sejauh mana wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik?	8	56,00	90,00	76,88

Tabel 27. 19. Mekanisme Pemulihan

Mekanisme Pemulihan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen?	7	74,00	95,00	88,86
13.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen?	8	56,00	95,00	80,63
14.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen?	8	58,00	95,00	79,00
15.	Sejauh mana aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan?	10	56,00	100,00	81,30
16.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan	8	56,00	100,00	79,13
17.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana?	7	50,00	100,00	81,14

Tabel 27. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra?	8	5,00	70,00	41,88

28. Provinsi Sulawesi Tenggara

Tabel 28. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini?	12	70,00	100,00	91,08
2.	Sejauh mana wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	11	56,00	100,00	91,36
3.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya?	12	55,00	100,00	83,75
4.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kemerdekaan pers? Dapat dijelaskan dengan memberikan contoh kongkret program yang dijalankan dalam pemajuan kemerdekaan pers. (Meliputi freedom from dan freedom for)	12	56,00	100,00	86,25

Tabel 28. 2. Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini?	11	50,00	100,00	92,73
6.	Sejauh mana pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers?	12	69,00	100,00	90,33
7.	Sejauh mana independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa?	12	50,00	100,00	77,33
8.	Sejauh mana pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan terganggu oleh kepentingan politik, ekonomi, kepentingan pemilik?	12	56,00	100,00	77,50

Tabel 28. 3. Kebebasan dari Kekerasan

Kebebasan dari Kekerasan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
9.	Sejauh mana tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan ?	12	55,00	100,00	81,58
10.	Sejauh mana wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan?	12	55,00	100,00	83,00
11.	Sejauh mana aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan?	12	69,00	100,00	88,33

Tabel 28. 4. Kebebasan Media Alternatif

Kebebasan Media Alternatif		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga?	10	30,00	100,00	77,10
13.	Sejauh mana jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers?	11	56,00	100,00	85,82

Tabel 28. 5. Keragaman Pandangan

Keragaman Pandangan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
14.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini?	12	55,00	100,00	85,25
15.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media?	12	69,00	100,00	84,33
16.	Sejauh mana pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya?	12	80,00	100,00	91,42

Tabel 28. 6. Akurat dan Berimbang

Akurat dan Berimbang		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	12	60,00	100,00	87,67
18.	Sejauh mana wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	12	56,00	100,00	88,42
19.	Seberapa seringkah pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan?	10	60,00	100,00	89,00

Tabel 28. 7. Akses atas Informasi Publik

Akses atas Informasi Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
20.	Sejauh mana terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini?	12	60,00	100,00	92,67
21.	Sejauh mana pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya?	11	56,00	100,00	76,64
22.	Sejauh mana hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers?	8	69,00	95,00	80,13
23.	Sejauh mana wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini?	11	30,00	100,00	87,00

Tabel 28. 8. Pendidikan Insan Pers

Pendidikan Insan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
24.	Sejauh mana di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi?	11	55,00	100,00	75,82

Tabel 28. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
25.	Sejauh mana media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas?	12	31,00	100,00	82,42
26.	Sejauh mana pers menyediakan informasi ramah dan layak anak,	12	30,00	100,00	79,00
27.	Sejauhmana pers menyediakan informasi berperspektif gender,	12	30,00	100,00	81,50
28.	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	12	30,00	100,00	82,67
29.	Sejauh mana pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	11	31,00	100,00	79,64
30.	Sejauh mana media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)?	12	30,00	98,00	72,17

Tabel 28. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers?	12	60,00	100,00	92,00
2.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran?	11	89,00	100,00	94,00
3.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak?	11	89,00	100,00	95,27
4.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak?	12	80,00	100,00	94,42
5.	Sejauh mana alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi?	12	56,00	100,00	79,67
6.	Seberapa besar pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui "berita berbayar"?	12	56,00	100,00	84,50
7.	Sejauh mana alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi?	7	80,00	100,00	88,43
8.	Sejauh mana kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata?	11	55,00	100,00	84,73
9.	Sejauh mana kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu?	12	55,00	100,00	84,67
10.	Sejauh mana konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan?	12	56,00	100,00	81,67

Tabel 28. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
11.	Sejauh mana perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya?	12	70,00	100,00	87,75
12.	Sejauh mana wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi	11	30,00	100,00	82,64
13.	Sejauh mana pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media?	11	30,00	100,00	80,00
14.	Sejauh mana pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers?	12	69,00	95,00	83,42
15.	Sejauh mana situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan?	12	69,00	100,00	82,08
16.	Sejauh mana terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)?	12	60,00	100,00	85,67

Tabel 28. 12. Keragaman Kepemilikan

Keragaman Kepemilikan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)?	12	70,00	100,00	85,75

Tabel 28. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik. Yang dimaksud sebagai perusahaan pers adalah, badan usaha yang dikelola sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.	12	55,00	100,00	82,33
19.	Sejauh mana publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	12	55,00	95,00	66,50
20.	Sejauh mana wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers?	9	55,00	100,00	76,67

Tabel 28. 14. Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
21.	Sejauh mana lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik?	12	58,00	100,00	90,00
22.	Sejauh mana pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik?	12	55,00	100,00	81,33
23.	Sejauh mana perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan?	9	80,00	100,00	90,89
24.	Sejauh mana fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini?	12	55,00	100,00	80,17
25.	Sejauh mana Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini?	12	55,00	100,00	78,92
26.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat?	10	31,00	100,00	76,00
27.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik?	8	55,00	100,00	78,63

Tabel 28. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)?	9	56,00	100,00	82,78
2.	Sejauh mana lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers?	10	31,00	100,00	81,60
3.	Sejauh mana peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	12	60,00	100,00	83,92
4.	Sejauh mana aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	12	69,00	100,00	88,17

Tabel 28. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya?	11	79,00	100,00	91,73

Tabel 28. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
6.	Sejauh mana peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya?	12	69,00	100,00	91,83
7.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik?	11	80,00	100,00	94,82
8.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers? Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan.	11	80,00	100,00	94,09
9.	Sejauh mana pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers?	11	70,00	100,00	91,36

Tabel 28. 18. Etika Pers

Etika Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
10.	Sejauh mana pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers?	12	60,00	100,00	89,67
11.	Sejauh mana wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik?	12	55,00	100,00	86,25

Tabel 28. 19. Mekanisme Pemulihan

Mekanisme Pemulihan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen?	10	55,00	100,00	88,90
13.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen?	9	55,00	100,00	87,56
14.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen?	8	75,00	95,00	86,00
15.	Sejauh mana aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan?	11	59,00	100,00	87,00
16.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan	11	55,00	100,00	82,18
17.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana?	8	55,00	100,00	80,50

Tabel 28. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra?	12	56,00	100,00	82,17

29. Provinsi Sulawesi Utara

Tabel 29. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini?	12	70,00	100,00	80,42
2.	Sejauh mana wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	11	60,00	100,00	83,55
3.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya?	12	56,00	96,00	71,08
4.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kemerdekaan pers? Dapat dijelaskan dengan memberikan contoh kongkret program yang dijalankan dalam pemajuan kemerdekaan pers. (Meliputi freedom from dan freedom for)	11	67,00	100,00	84,27

Tabel 29. 2. Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini?	9	53,00	90,00	77,11
6.	Sejauh mana pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers?	10	31,00	90,00	74,10
7.	Sejauh mana independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa?	12	56,00	92,00	71,83
8.	Sejauh mana pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan terganggu oleh kepentingan politik, ekonomi, kepentingan pemilik?	11	56,00	95,00	72,82

Tabel 29. 3. Kebebasan dari Kekerasan

Kebebasan dari Kekerasan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
9.	Sejauh mana tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan ?	11	56,00	100,00	80,73
10.	Sejauh mana wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan?	10	67,00	100,00	77,60
11.	Sejauh mana aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan?	11	60,00	90,00	79,27

Tabel 29. 4. Kebebasan Media Alternatif

Kebebasan Media Alternatif		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga?	11	56,00	90,00	74,73
13.	Sejauh mana jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers?	10	56,00	95,00	78,60

Tabel 29. 5. Keragaman Pandangan

Keragaman Pandangan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
14.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini?	10	30,00	90,00	73,50
15.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media?	9	31,00	90,00	74,00
16.	Sejauh mana pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya?	7	70,00	100,00	85,71

Tabel 29. 6. Akurat dan Berimbang

Akurat dan Berimbang		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	12	31,00	95,00	73,00
18.	Sejauh mana wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	9	31,00	100,00	73,89
19.	Seberapa seringkah pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan?	8	56,00	95,00	69,00

Tabel 29. 7. Akses atas Informasi Publik

Akses atas Informasi Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
20.	Sejauh mana terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini?	12	65,00	90,00	81,25
21.	Sejauh mana pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya?	11	70,00	96,00	81,00
22.	Sejauh mana hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers?	10	56,00	96,00	79,10
23.	Sejauh mana wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini?	7	70,00	95,00	82,86

Tabel 29. 8. Pendidikan Insan Pers

Pendidikan Insan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
24.	Sejauh mana di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi?	12	56,00	95,00	77,42

Tabel 29. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
25.	Sejauh mana media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas?	12	56,00	95,00	80,00
26.	Sejauh mana pers menyediakan informasi ramah dan layak anak,	11	56,00	97,00	81,91
27.	Sejauhmana pers menyediakan informasi berperspektif gender,	12	70,00	95,00	82,00
28.	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	10	56,00	95,00	80,50
29.	Sejauh mana pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	10	60,00	90,00	76,90
30.	Sejauh mana media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)?	10	31,00	85,00	63,30

Tabel 29. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers?	11	56,00	100,00	78,64
2.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran?	9	56,00	95,00	75,11
3.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak?	9	56,00	90,00	74,89
4.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak?	6	70,00	90,00	79,83
5.	Sejauh mana alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi?	10	31,00	90,00	67,30
6.	Seberapa besar pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui "berita berbayar"?	12	31,00	90,00	67,75
7.	Sejauh mana alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi?	11	56,00	86,00	66,36
8.	Sejauh mana kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata?	12	31,00	95,00	62,08
9.	Sejauh mana kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu?	11	31,00	86,00	63,18
10.	Sejauh mana konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan?	11	31,00	95,00	67,64

Tabel 29. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
11.	Sejauh mana perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya?	12	31,00	95,00	70,58
12.	Sejauh mana wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi	10	31,00	85,00	63,20
13.	Sejauh mana pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media?	10	56,00	85,00	63,40
14.	Sejauh mana pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers?	11	60,00	95,00	82,18
15.	Sejauh mana situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan?	11	30,00	90,00	69,55
16.	Sejauh mana terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)?	10	31,00	90,00	67,20

Tabel 29. 12. Keragaman Kepemilikan

Keragaman Kepemilikan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)?	12	60,00	95,00	81,25

Tabel 29. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik. Yang dimaksud sebagai perusahaan pers adalah, badan usaha yang dikelola sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.	12	30,00	95,00	69,08
19.	Sejauh mana publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	10	30,00	90,00	67,70
20.	Sejauh mana wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers?	11	31,00	98,00	63,09

Tabel 29. 14. Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
21.	Sejauh mana lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik?	12	40,00	95,00	76,08
22.	Sejauh mana pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik?	10	56,00	95,00	75,10
23.	Sejauh mana perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan?	10	65,00	95,00	79,50
24.	Sejauh mana fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini?	11	50,00	95,00	76,82
25.	Sejauh mana Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini?	11	70,00	100,00	86,36
26.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat?	9	70,00	95,00	83,22
27.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik?	10	70,00	95,00	83,90

Tabel 29. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)?	10	69,00	95,00	78,70
2.	Sejauh mana lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers?	11	56,00	95,00	71,36
3.	Sejauh mana peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	10	56,00	95,00	78,30
4.	Sejauh mana aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	12	69,00	95,00	77,25

Tabel 29. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya?	10	7,00	95,00	70,60

Tabel 29. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
6.	Sejauh mana peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya?	7	56,00	90,00	71,86
7.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik?	8	60,00	90,00	73,50
8.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers? Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan.	7	60,00	85,00	72,71
9.	Sejauh mana pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers?	10	56,00	95,00	72,10

Tabel 29. 18. Etika Pers

Etika Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
10	Sejauh mana pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers?	11	31,00	95,00	77,18
11.	Sejauh mana wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik?	11	56,00	90,00	77,18

Tabel 29. 19. Mekanisme Pemulihan

Mekanisme Pemulihan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen?	8	70,00	90,00	83,75
13.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen?	10	70,00	90,00	77,00
14.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen?	10	70,00	90,00	79,90
15.	Sejauh mana aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan?	9	56,00	90,00	71,89
16.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan	9	56,00	95,00	75,22
17.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana?	5	56,00	95,00	76,00

Tabel 29. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra?	9	15,00	90,00	55,22

30. Provinsi Gorontalo

Tabel 30. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini?	12	70,00	95,00	82,08
2.	Sejauh mana wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	12	60,00	95,00	79,92
3.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya?	12	40,00	90,00	74,92
4.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kemerdekaan pers? Dapat dijelaskan dengan memberikan contoh kongkret program yang dijalankan dalam pemajuan kemerdekaan pers. (Meliputi freedom from dan freedom for)	12	55,00	95,00	79,17

Tabel 30. 2. Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini?	11	60,00	95,00	81,36
6.	Sejauh mana pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers?	10	56,00	95,00	78,10
7.	Sejauh mana independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa?	11	33,00	90,00	70,36
8.	Sejauh mana pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan terganggu oleh kepentingan politik, ekonomi, kepentingan pemilik?	12	40,00	90,00	72,58

Tabel 30. 3. Kebebasan dari Kekerasan

Kebebasan dari Kekerasan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
9.	Sejauh mana tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan ?	12	50,00	95,00	79,42
10.	Sejauh mana wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan?	12	50,00	90,00	75,92
11.	Sejauh mana aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan?	12	56,00	90,00	78,83

Tabel 30. 4. Kebebasan Media Alternatif

Kebebasan Media Alternatif		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga?	11	30,00	95,00	65,09
13.	Sejauh mana jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers?	12	30,00	95,00	68,33

Tabel 30. 5. Keragaman Pandangan

Keragaman Pandangan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
14.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini?	12	55,00	90,00	75,17
15.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media?	11	60,00	90,00	79,09
16.	Sejauh mana pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya?	11	70,00	100,00	83,18

Tabel 30. 6. Akurat dan Berimbang

Akurat dan Berimbang		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	12	55,00	95,00	80,83
18.	Sejauh mana wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	12	57,00	95,00	79,67
19.	Seberapa seringkah pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan?	10	60,00	90,00	77,00

Tabel 30. 7. Akses atas Informasi Publik

Akses atas Informasi Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
20.	Sejauh mana terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini?	12	56,00	95,00	82,50
21.	Sejauh mana pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya?	12	70,00	93,00	83,58
22.	Sejauh mana hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers?	10	31,00	90,00	64,60
23.	Sejauh mana wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini?	11	56,00	93,00	81,55

Tabel 30. 8. Pendidikan Insan Pers

Pendidikan Insan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
24.	Sejauh mana di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi?	12	55,00	90,00	74,25

Tabel 30. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
25.	Sejauh mana media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas?	12	55,00	90,00	77,00
26.	Sejauh mana pers menyediakan informasi ramah dan layak anak,	12	60,00	90,00	76,42
27.	Sejauhmana pers menyediakan informasi berperspektif gender,	11	69,00	90,00	79,00
28.	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	11	20,00	90,00	70,00
29.	Sejauh mana pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	12	50,00	90,00	71,75
30.	Sejauh mana media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)?	11	20,00	70,00	49,45

Tabel 30. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers?	12	60,00	95,00	79,58
2.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran?	11	58,00	97,00	81,36
3.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak?	9	60,00	90,00	78,11
4.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak?	10	60,00	90,00	78,80
5.	Sejauh mana alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi?	11	56,00	90,00	77,36
6.	Seberapa besar pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui "berita berbayar"?	11	56,00	90,00	80,09
7.	Sejauh mana alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi?	9	60,00	90,00	75,44
8.	Sejauh mana kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata?	10	65,00	90,00	77,90
9.	Sejauh mana kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu?	7	56,00	90,00	76,14
10.	Sejauh mana konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan?	7	50,00	90,00	72,57

Tabel 30. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
11.	Sejauh mana perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya?	12	45,00	90,00	76,25
12.	Sejauh mana wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi	12	50,00	80,00	66,75
13.	Sejauh mana pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media?	11	50,00	90,00	73,64
14.	Sejauh mana pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers?	12	55,00	100,00	80,42
15.	Sejauh mana situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan?	10	50,00	90,00	74,00
16.	Sejauh mana terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)?	10	55,00	90,00	75,30

Tabel 30. 12. Keragaman Kepemilikan

Keragaman Kepemilikan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)?	11	56,00	95,00	79,18

Tabel 30. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik. Yang dimaksud sebagai perusahaan pers adalah, badan usaha yang dikelola sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.	11	57,00	80,00	72,36
19.	Sejauh mana publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	10	55,00	90,00	73,50
20.	Sejauh mana wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers?	9	31,00	90,00	74,44

Tabel 30. 14. Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
21.	Sejauh mana lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik?	11	58,00	90,00	79,82
22.	Sejauh mana pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik?	10	31,00	90,00	75,10
23.	Sejauh mana perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan?	10	50,00	90,00	70,50
24.	Sejauh mana fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini?	11	69,00	85,00	78,55
25.	Sejauh mana Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini?	9	69,00	90,00	79,22
26.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat?	10	50,00	80,00	65,60
27.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik?	8	30,00	80,00	54,88

Tabel 30. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)?	10	50,00	90,00	72,60
2.	Sejauh mana lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers?	10	55,00	90,00	72,70
3.	Sejauh mana peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	11	55,00	90,00	75,45
4.	Sejauh mana aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	11	56,00	90,00	75,55

Tabel 30. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya?	11	57,00	90,00	77,45

Tabel 30. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
6.	Sejauh mana peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya?	11	50,00	95,00	74,91
7.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik?	11	56,00	97,00	77,27
8.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers? Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan.	11	70,00	97,00	82,82
9.	Sejauh mana pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers?	11	65,00	90,00	76,45

Tabel 30. 18. Etika Pers

Etika Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
10.	Sejauh mana pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers?	11	56,00	95,00	74,09
11.	Sejauh mana wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik?	11	33,00	95,00	69,82

Tabel 30. 19. Mekanisme Pemulihan

Mekanisme Pemulihan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen?	8	30,00	95,00	64,63
13.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen?	7	30,00	100,00	72,29
14.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen?	6	30,00	89,00	56,50
15.	Sejauh mana aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan?	11	58,00	90,00	73,18
16.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan	11	56,00	95,00	71,09
17.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana?	11	60,00	90,00	74,91

Tabel 30. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra?	9	30,00	90,00	54,67

31. Provinsi Maluku

Tabel 31. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini?	12	56,00	100,00	86,58
2.	Sejauh mana wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	10	55,00	95,00	78,00
3.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya?	12	40,00	96,00	77,42
4.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kemerdekaan pers? Dapat dijelaskan dengan memberikan contoh kongkret program yang dijalankan dalam pemajuan kemerdekaan pers. (Meliputi freedom from dan freedom for)	12	80,00	95,00	85,00

Tabel 31. 2. Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini?	11	70,00	100,00	89,91
6.	Sejauh mana pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers?	10	80,00	100,00	90,80
7.	Sejauh mana independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa?	12	30,00	85,00	64,67
8.	Sejauh mana pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan terganggu oleh kepentingan politik, ekonomi, kepentingan pemilik?	12	55,00	89,00	69,33

Tabel 31. 3. Kebebasan dari Kekerasan

Kebebasan dari Kekerasan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
9.	Sejauh mana tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan ?	12	30,00	95,00	72,92
10.	Sejauh mana wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan?	12	30,00	95,00	72,50
11.	Sejauh mana aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan?	12	40,00	95,00	80,58

Tabel 31. 4. Kebebasan Media Alternatif

Kebebasan Media Alternatif		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga?	11	35,00	95,00	69,55
13.	Sejauh mana jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers?	11	50,00	95,00	74,09

Tabel 31. 5. Keragaman Pandangan

Keragaman Pandangan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
14.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini?	12	31,00	95,00	57,67
15.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media?	11	30,00	95,00	70,00
16.	Sejauh mana pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya?	12	70,00	100,00	88,92

Tabel 31. 6. Akurat dan Berimbang

Akurat dan Berimbang		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	12	50,00	95,00	72,75
18.	Sejauh mana wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	11	50,00	95,00	74,91
19.	Seberapa seringkah pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan?	12	50,00	99,00	68,25

Tabel 31. 7 Akses atas Informasi Publik

Akses atas Informasi Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
20.	Sejauh mana terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini?	12	69,00	99,00	86,67
21.	Sejauh mana pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya?	9	50,00	90,00	71,56
22.	Sejauh mana hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers?	8	20,00	99,00	74,88
23.	Sejauh mana wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini?	6	69,00	99,00	84,67

Tabel 31. 8. Pendidikan Insan Pers

Pendidikan Insan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
24.	Sejauh mana di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi?	11	31,00	95,00	67,82

Tabel 31. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
25.	Sejauh mana media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas?	11	35,00	95,00	72,82
26.	Sejauh mana pers menyediakan informasi ramah dan layak anak,	12	30,00	99,00	67,92
27.	Sejauhmana pers menyediakan informasi berperspektif gender,	12	55,00	95,00	68,42
28.	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	11	50,00	89,00	69,36
29.	Sejauh mana pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	10	31,00	75,00	51,30
30.	Sejauh mana media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)?	9	20,00	90,00	55,56

Tabel 31. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers?	12	69,00	95,00	80,83
2.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran?	10	69,00	99,00	86,20
3.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak?	11	75,00	99,00	85,82
4.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak?	9	80,00	99,00	87,67
5.	Sejauh mana alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi?	12	40,00	92,00	73,83
6.	Seberapa besar pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui "berita berbayar"?	10	55,00	99,00	80,80
7.	Sejauh mana alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi?	8	58,00	99,00	80,88
8.	Sejauh mana kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata?	11	55,00	99,00	75,36
9.	Sejauh mana kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu?	10	31,00	90,00	68,70
10.	Sejauh mana konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan?	11	55,00	99,00	73,18

Tabel 31. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
11.	Sejauh mana perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya?	11	55,00	99,00	78,00
12.	Sejauh mana wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi	11	20,00	80,00	57,82
13.	Sejauh mana pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media?	11	30,00	90,00	60,00
14.	Sejauh mana pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers?	12	30,00	95,00	70,83
15.	Sejauh mana situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan?	11	35,00	99,00	69,91
16.	Sejauh mana terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)?	12	50,00	80,00	65,92

Tabel 31. 12. Keragaman Kepemilikan

Keragaman Kepemilikan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)?	11	50,00	99,00	74,45

Tabel 31. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik. Yang dimaksud sebagai perusahaan pers adalah, badan usaha yang dikelola sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.	11	56,00	85,00	71,27
19.	Sejauh mana publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	9	60,00	89,00	76,56
20.	Sejauh mana wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers?	12	25,00	85,00	47,50

Tabel 31. 14. Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
21.	Sejauh mana lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik?	8	69,00	99,00	81,50
22.	Sejauh mana pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik?	9	31,00	90,00	69,11
23.	Sejauh mana perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan?	8	56,00	100,00	83,00
24.	Sejauh mana fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini?	9	30,00	80,00	49,22
25.	Sejauh mana Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini?	8	70,00	95,00	83,50
26.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat?	8	30,00	95,00	72,00
27.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik?	8	30,00	97,00	62,75

Tabel 31. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)?	9	69,00	90,00	76,56
2.	Sejauh mana lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers?	9	65,00	90,00	74,89
3.	Sejauh mana peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	10	30,00	90,00	62,80
4.	Sejauh mana aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	11	40,00	89,00	71,00

Tabel 31. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya?	10	30,00	99,00	75,40

Tabel 31. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
6.	Sejauh mana peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya?	11	30,00	90,00	74,45
7.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik?	10	60,00	99,00	80,40
8.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers? Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan.	10	50,00	99,00	81,40
9.	Sejauh mana pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers?	11	56,00	99,00	80,45

Tabel 31. 18. Etika Pers

Etika Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
10.	Sejauh mana pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers?	8	30,00	90,00	61,88
11.	Sejauh mana wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik?	11	56,00	95,00	71,18

Tabel 31. 19. Mekanisme Pemulihan

Mekanisme Pemulihan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen?	11	80,00	100,00	87,00
13.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen?	9	50,00	95,00	81,00
14.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen?	8	50,00	100,00	80,50
15.	Sejauh mana aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan?	10	58,00	90,00	78,70
16.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan	8	69,00	90,00	79,88
17.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana?	7	56,00	90,00	74,43

Tabel 31. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra?	9	5,00	69,00	39,44

32. Provinsi Maluku Utara

Tabel 32. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini?	12	70,00	100,00	83,75
2.	Sejauh mana wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	11	56,00	90,00	78,73
3.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya?	12	60,00	95,00	79,92
4.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kemerdekaan pers? Dapat dijelaskan dengan memberikan contoh kongkret program yang dijalankan dalam pemajuan kemerdekaan pers. (Meliputi freedom from dan freedom for)	12	69,00	90,00	78,58

Tabel 32. 2. Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini?	11	70,00	100,00	81,82
6.	Sejauh mana pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers?	12	56,00	100,00	77,67
7.	Sejauh mana independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa?	12	50,00	100,00	72,50
8.	Sejauh mana pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan terganggu oleh kepentingan politik, ekonomi, kepentingan pemilik?	12	50,00	100,00	68,00

Tabel 32. 3. Kebebasan dari Kekerasan

Kebebasan dari Kekerasan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
9.	Sejauh mana tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan ?	12	50,00	90,00	66,67
10.	Sejauh mana wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan?	12	50,00	80,00	64,08
11.	Sejauh mana aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan?	12	31,00	95,00	72,17

Tabel 32. 4. Kebebasan Media Alternatif

Kebebasan Media Alternatif		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga?	12	40,00	100,00	78,08
13.	Sejauh mana jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers?	12	56,00	100,00	77,17

Tabel 32. 5. Keragaman Pandangan

Keragaman Pandangan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
14.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini?	11	56,00	100,00	78,18
15.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media?	11	40,00	100,00	73,73
16.	Sejauh mana pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya?	11	50,00	100,00	73,55

Tabel 32. 6. Akurat dan Berimbang

Akurat dan Berimbang		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	12	50,00	95,00	79,25
18.	Sejauh mana wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	12	56,00	100,00	75,92
19.	Seberapa seringkah pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan?	11	40,00	100,00	74,00

Tabel 32. 7. Akses atas Informasi Publik

Akses atas Informasi Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
20.	Sejauh mana terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini?	12	58,00	100,00	81,42
21.	Sejauh mana pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya?	12	56,00	100,00	79,00
22.	Sejauh mana hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers?	0	0,00	0,00	
23.	Sejauh mana wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini?	12	60,00	100,00	84,42

Tabel 32. 8. Pendidikan Insan Pers

Pendidikan Insan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
24.	Sejauh mana di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi?	12	55,00	100,00	80,25

Tabel 32. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
25.	Sejauh mana media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas?	12	69,00	100,00	82,25
26.	Sejauh mana pers menyediakan informasi ramah dan layak anak,	12	56,00	100,00	75,08
27.	Sejauhmana pers menyediakan informasi berperspektif gender,	12	56,00	90,00	71,75
28.	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	12	56,00	90,00	77,00
29.	Sejauh mana pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	11	56,00	90,00	71,27
30.	Sejauh mana media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)?	9	30,00	69,00	50,11

Tabel 32. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers?	12	56,00	90,00	76,75
2.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran?	12	65,00	95,00	80,00
3.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak?	11	70,00	90,00	80,91
4.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak?	11	70,00	90,00	81,82
5.	Sejauh mana alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi?	12	56,00	90,00	76,58
6.	Seberapa besar pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui "berita berbayar"?	12	60,00	100,00	77,50
7.	Sejauh mana alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi?	8	50,00	89,00	73,00
8.	Sejauh mana kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata?	12	50,00	90,00	76,58
9.	Sejauh mana kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu?	12	50,00	100,00	75,33
10.	Sejauh mana konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan?	11	50,00	90,00	76,09

Tabel 32. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
11.	Sejauh mana perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya?	12	60,00	100,00	83,75
12.	Sejauh mana wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi	12	40,00	100,00	68,67
13.	Sejauh mana pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media?	12	55,00	100,00	73,00
14.	Sejauh mana pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers?	12	56,00	100,00	79,42
15.	Sejauh mana situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan?	12	60,00	100,00	76,17
16.	Sejauh mana terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)?	10	60,00	100,00	73,20

Tabel 32. 12. Keragaman Kepemilikan

Keragaman Kepemilikan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)?	12	60,00	99,00	80,67

Tabel 32. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik. Yang dimaksud sebagai perusahaan pers adalah, badan usaha yang dikelola sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.	11	60,00	100,00	81,00
19.	Sejauh mana publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	11	50,00	100,00	71,64
20.	Sejauh mana wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers?	10	50,00	100,00	73,70

Tabel 32. 14. Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
21.	Sejauh mana lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik?	12	56,00	100,00	79,75
22.	Sejauh mana pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik?	12	50,00	100,00	75,92
23.	Sejauh mana perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan?	11	60,00	100,00	81,82
24.	Sejauh mana fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini?	12	56,00	100,00	78,42
25.	Sejauh mana Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini?	12	56,00	100,00	82,17
26.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat?	12	56,00	100,00	76,00
27.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik?	NA	NA	NA	NA

Tabel 32. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)?	9	50,00	100,00	78,22
2.	Sejauh mana lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers?	11	50,00	100,00	79,55
3.	Sejauh mana peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	11	50,00	100,00	76,82
4.	Sejauh mana aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	12	56,00	100,00	76,83

Tabel 32. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya?	11	56,00	100,00	76,91

Tabel 32. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
6.	Sejauh mana peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya?	7	60,00	100,00	77,14
7.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik?	8	60,00	100,00	76,25
8.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers? Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan.	7	60,00	100,00	81,43
9.	Sejauh mana pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers?	9	60,00	100,00	78,89

Tabel 32. 18. Etika Pers

Etika Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
10	Sejauh mana pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers?	10	60,00	100,00	79,50
11	Sejauh mana wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik?	10	55,00	100,00	71,90

Tabel 32. 19. Mekanisme Pemulihan

Mekanisme Pemulihan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12	Sejauh mana kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen?	10	60,00	90,00	81,00
13	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen?	11	60,00	100,00	78,36
14	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen?	1	70,00	70,00	70,00
15	Sejauh mana aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan?	11	50,00	100,00	72,82
16	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan	11	40,00	90,00	73,18
17	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana?	9	70,00	89,00	74,89

Tabel 32. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18	Sejauh mana peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra?	9	31,00	70,00	52,33

33. Provinsi Papua

Tabel 33. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini?	11	60,00	100,00	81,73
2.	Sejauh mana wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	10	60,00	100,00	78,50
3.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya?	11	56,00	80,00	69,18
4.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kemerdekaan pers? Dapat dijelaskan dengan memberikan contoh kongkret program yang dijalankan dalam pemajuan kemerdekaan pers. (Meliputi freedom from dan freedom for)	11	30,00	90,00	70,36

Tabel 33. 2. Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini?	10	30,00	95,00	71,50
6.	Sejauh mana pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers?	10	31,00	95,00	69,60
7.	Sejauh mana independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa?	9	50,00	80,00	67,78
8.	Sejauh mana pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan terganggu oleh kepentingan politik, ekonomi, kepentingan pemilik?	11	40,00	85,00	66,36

Tabel 33. 3. Kebebasan dari Kekerasan

Kebebasan dari Kekerasan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
9.	Sejauh mana tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan ?	11	30,00	90,00	66,73
10.	Sejauh mana wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan?	11	30,00	90,00	66,27
11.	Sejauh mana aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan?	11	6,00	100,00	66,91

Tabel 33. 4. Kebebasan Media Alternatif

Kebebasan Media Alternatif	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12. Se jauh mana pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga?	11	30,00	90,00	72,27
13. Se jauh mana jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers?	11	30,00	90,00	68,64

Tabel 33. 5. Keragaman Pandangan

Keragaman Pandangan	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
14. Se jauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini?	6	70,00	90,00	80,83
15. Se jauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media?	10	30,00	90,00	64,00
16. Se jauh mana pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya?	11	50,00	90,00	77,27

Tabel 33. 6. Akurat dan Berimbang

Akurat dan Berimbang	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17. Se jauh mana publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	11	50,00	90,00	69,91
18. Se jauh mana wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	11	50,00	90,00	74,45
19. Se berapa seringkah pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan?	11	30,00	90,00	73,64

Tabel 33. 7. Akses atas Informasi Publik

Akses atas Informasi Publik	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
20. Se jauh mana terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini?	10	30,00	90,00	68,00
21. Se jauh mana pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya?	10	50,00	90,00	74,40
22. Se jauh mana hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers?	7	30,00	75,00	58,57
23. Se jauh mana wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini?	9	30,00	90,00	63,89

Tabel 33. 8. Pendidikan Insan Pers

Pendidikan Insan Pers	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
24. Se jauh mana di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi?	10	50,00	90,00	62,50

Tabel 33. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
25.	Sejauh mana media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas?	10	20,00	90,00	71,50
26.	Sejauh mana pers menyediakan informasi ramah dan layak anak,	10	50,00	80,00	64,90
27.	Sejauhmana pers menyediakan informasi berperspektif gender,	10	40,00	80,00	68,40
28.	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	10	30,00	90,00	71,00
29.	Sejauh mana pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	10	50,00	80,00	61,10
30.	Sejauh mana media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)?	10	15,00	65,00	42,70

Tabel 33. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers?	10	50,00	90,00	69,20
2.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran?	9	50,00	85,00	67,44
3.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak?	9	55,00	90,00	71,67
4.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak?	9	55,00	90,00	72,78
5.	Sejauh mana alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi?	9	60,00	90,00	77,22
6.	Seberapa besar pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui "berita berbayar"?	10	50,00	90,00	74,00
7.	Sejauh mana alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi?	10	50,00	85,00	60,60
8.	Sejauh mana kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata?	10	50,00	85,00	67,00
9.	Sejauh mana kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu?	10	40,00	90,00	67,90
10.	Sejauh mana konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan?	10	50,00	90,00	71,40

Tabel 33. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
11.	Sejauh mana perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya?	10	50,00	80,00	68,00
12.	Sejauh mana wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi	10	10,00	80,00	62,80
13.	Sejauh mana pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media?	10	50,00	75,00	67,30
14.	Sejauh mana pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers?	10	40,00	90,00	70,00
15.	Sejauh mana situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan?	10	20,00	95,00	71,50
16.	Sejauh mana terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)?	9	50,00	90,00	67,22

Tabel 33. 12. Keragaman Kepemilikan

Keragaman Kepemilikan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)?	10	50,00	85,00	73,90

Tabel 33. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik. Yang dimaksud sebagai perusahaan pers adalah, badan usaha yang dikelola sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.	10	50,00	80,00	66,40
19.	Sejauh mana publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	10	50,00	90,00	68,40
20.	Sejauh mana wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers?	9	30,00	70,00	55,56

Tabel 33. 14. Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
21.	Sejauh mana lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik?	10	60,00	80,00	71,50
22.	Sejauh mana pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik?	10	10,00	80,00	60,00
23.	Sejauh mana perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan?	10	30,00	90,00	73,00
24.	Sejauh mana fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini?	10	30,00	80,00	65,50
25.	Sejauh mana Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini?	10	50,00	85,00	69,50
26.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat?	9	40,00	75,00	58,89
27.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik?	9	30,00	75,00	60,67

Tabel 33. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)?	8	40,00	90,00	74,25
2.	Sejauh mana lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers?	8	60,00	75,00	68,50
3.	Sejauh mana peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	8	50,00	75,00	64,38
4.	Sejauh mana aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	9	30,00	75,00	59,56

Tabel 33. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya?	9	35,00	75,00	62,22

Tabel 33. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
6.	Sejauh mana peraturan di daerah ini dapat mempidanakan wartawan karena pemberitaannya?	7	35,00	80,00	62,14
7.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik?	7	35,00	90,00	66,43
8.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers? Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan.	5	50,00	80,00	70,00
9.	Sejauh mana pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers?	8	50,00	70,00	61,25

Tabel 33. 18. Etika Pers

Etika Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
10.	Sejauh mana pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers?	10	35,00	90,00	65,00
11.	Sejauh mana wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik?	10	20,00	89,00	62,40

Tabel 33. 19. Mekanisme Pemulihan

Mekanisme Pemulihan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen?	7	40,00	80,00	69,29
13.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen?	10	35,00	85,00	62,60
14.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen?	8	30,00	85,00	64,50
15.	Sejauh mana aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan?	9	40,00	80,00	63,78
16.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan	8	50,00	75,00	70,00
17.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana?	6	20,00	75,00	53,33

Tabel 33. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra?	7	10,00	75,00	46,43

34. Provinsi Papua Barat

Tabel 34. 1. Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Kebebasan Berserikat bagi Wartawan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani, termasuk kebebasan untuk tidak bergabung dalam organisasi wartawan di daerah ini?	11	65,00	95,00	82,82
2.	Sejauh mana wartawan bebas bergabung serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya, termasuk tidak bergabung dalam serikat pekerja wartawan	9	10,00	94,00	68,44
3.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan bebas dari ancaman dalam bersikap dan menjalankan fungsinya?	10	5,00	90,00	74,70
4.	Sejauh mana organisasi profesi wartawan di daerah ini memajukan kemerdekaan pers? Dapat dijelaskan dengan memberikan contoh kongkret program yang dijalankan dalam pemajuan kemerdekaan pers. (Meliputi freedom from dan freedom for)	10	50,00	90,00	75,20

Tabel 34. 2. Kebebasan dari Intervensi

Kebebasan dari Intervensi		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana terjadi pencabutan lisensi, pencabutan izin usaha, pembredelan, dan sensor oleh pemerintah daerah dan/atau partai politik karena isi berita di daerah ini?	9	10,00	100,00	74,89
6.	Sejauh mana pemerintah daerah dan/atau partai politik menekan dalam bentuk seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers?	10	30,00	100,00	75,70
7.	Sejauh mana independensi redaksi dari campur tangan pemilik media massa?	9	56,00	90,00	73,89
8.	Sejauh mana pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan terganggu oleh kepentingan politik, ekonomi, kepentingan pemilik?	11	50,00	87,00	69,91

Tabel 34. 3. Kebebasan dari Kekerasan

Kebebasan dari Kekerasan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
9.	Sejauh mana tindakan oleh aparat negara berupa penganiayaan, pembunuhan, penculikan terhadap wartawan atau tindakan untuk mempengaruhi atau menghalangi pemberitaan ?	9	10,00	100,00	72,56
10.	Sejauh mana wartawan atau perusahaan pers menjadi sasaran intimidasi, tekanan dalam berbagai bentuknya oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk mempengaruhi isi pemberitaan?	10	50,00	100,00	74,10
11.	Sejauh mana aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuknya oleh kekuatan-kekuatan non-negara untuk mempengaruhi atau karena isi pemberitaan?	11	30,00	100,00	74,45

Tabel 34. 4. Kebebasan Media Alternatif

Kebebasan Media Alternatif		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana pemerintah daerah mengakui dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga?	11	30,00	100,00	71,27
13.	Sejauh mana jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers?	11	30,00	97,00	76,82

Tabel 34. 5. Keragaman Pandangan

Keragaman Pandangan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
14.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini?	9	20,00	90,00	59,56
15.	Sejauh mana pemerintah daerah mendorong keragaman kepemilikan media?	9	20,00	90,00	60,44
16.	Sejauh mana pemerintah daerah membiarkan atau melakukan praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya?	9	50,00	100,00	82,56

Tabel 34. 6. Akurat dan Berimbang

Akurat dan Berimbang		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini?	11	40,00	100,00	76,00
18.	Sejauh mana wartawan (jajaran redaksi) memberlakukan sensor diri (self censorship), karena intervensi dari eksternal?	8	69,00	89,00	76,75
19.	Seberapa seringkah pemilik perusahaan pers mengatur dan atau melarang isi pemberitaan?	8	69,00	95,00	81,13

Tabel 34. 7. Akses atas Informasi Publik

Akses atas Informasi Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
20.	Sejauh mana terdapat kebebasan mencari, meliput atau memperoleh informasi publik di daerah ini?	12	50,00	100,00	78,33
21.	Sejauh mana pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya?	9	50,00	97,00	74,44
22.	Sejauh mana hasil penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) di daerah ini mendukung kemerdekaan pers?	6	20,00	85,00	55,00
23.	Sejauh mana wartawan luar negeri diizinkan meliput pemberitaan di provinsi ini?	9	60,00	97,00	77,33

Tabel 34. 8. Pendidikan Insan Pers

Pendidikan Insan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
24.	Sejauh mana di daerah ini tersedia pelatihan wartawan untuk meningkatkan kompetensi profesi?	8	50,00	90,00	75,50

Tabel 34. 9. Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
25.	Sejauh mana media di daerah memberi ruang pemberitaan terkait masalah kelompok rentan seperti ketidakadilan gender, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran HAM masa lalu, dan kelompok minoritas?	11	57,00	100,00	79,00
26.	Sejauh mana pers menyediakan informasi ramah dan layak anak,	12	30,00	100,00	66,25
27.	Sejauhmana pers menyediakan informasi berperspektif gender,	9	50,00	90,00	72,11
28.	Sejauhmana pers menyediakan informasi menyangkut pemberdayaan masyarakat adat, sesuai perspektif HAM.	11	50,00	90,00	70,00
29.	Sejauh mana pemerintah daerah melakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan persoalan kelompok rentan seperti ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, kelompok minoritas menjadi bagian dari pemberitaan?	10	50,00	88,00	67,40
30.	Sejauh mana media menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas (misalnya, penyandang tuna-rungu, tuna netra)?	10	20,00	80,00	40,60

Tabel 34. 10. Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan pers cetak dan siber, sesuai ketentuan peraturan tentang pers?	8	30,00	98,00	69,13
2.	Sejauh mana individu atau entitas/kelompok bisnis dapat mendirikan dan menjalankan lembaga penyiaran seperti radio dan tv swasta, serta radio dan tv komunitas, sesuai ketentuan peraturan tentang penyiaran?	10	50,00	98,00	75,80
3.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada perusahaan pers cetak dan siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi dan pajak?	8	60,00	95,00	77,13
4.	Sejauh mana pemerintah daerah memungut biaya sesuai regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak?	8	60,00	100,00	79,13
5.	Sejauh mana alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah mengendalikan kebijakan redaksi?	9	50,00	90,00	65,67
6.	Seberapa besar pengaruh pemerintah daerah dalam mengendalikan kebijakan redaksi melalui "berita berbayar"?	8	50,00	90,00	71,88
7.	Sejauh mana alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah, dari pemerintah daerah mempengaruhi kebijakan redaksi?	8	31,00	90,00	63,25
8.	Sejauh mana kepentingan publik dalam pemberitaan media, berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata?	9	50,00	100,00	77,33
9.	Sejauh mana kepemilikan perusahaan pers di daerah ini terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu?	8	50,00	89,00	73,13
10.	Sejauh mana konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini mempengaruhi keragaman pemberitaan?	10	50,00	89,00	75,70

Tabel 34. 11. Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
11.	Sejauh mana perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya?	10	60,00	100,00	75,40
12.	Sejauh mana wartawan/media di daerah ini menolerir pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan mempengaruhi isi	10	40,00	100,00	70,90
13.	Sejauh mana pengaruh pemberian uang dan atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial, terhadap isi media?	10	30,00	100,00	68,00
14.	Sejauh mana pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers?	12	55,00	100,00	78,83
15.	Sejauh mana situasi ekonomi di daerah ini menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan?	10	30,00	85,00	67,60
16.	Sejauh mana terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom)?	8	56,00	90,00	71,63

Tabel 34. 12. Keragaman Kepemilikan

Keragaman Kepemilikan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
17.	Sejauh mana di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan pers cetak, penyiaran, dan media siber (media online)?	10	60,00	95,00	82,00

Tabel 34. 13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik. Yang dimaksud sebagai perusahaan pers adalah, badan usaha yang dikelola sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.	9	40,00	95,00	72,44
19.	Sejauh mana publik dapat mengetahui afiliasi politik, afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	9	50,00	85,00	69,11
20.	Sejauh mana wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun, jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers?	9	25,00	95,00	74,78

Tabel 34. 14. Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
21.	Sejauh mana lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik?	11	60,00	90,00	81,45
22.	Sejauh mana pemerintah di daerah mendorong dan memperkuat hadirnya lembaga penyiaran di daerah berorientasi pada kepentingan publik?	8	30,00	95,00	73,25
23.	Sejauh mana perizinan frekuensi radio dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan?	10	10,00	93,00	65,40
24.	Sejauh mana fungsi komunikasi dan informasi dari instansi di daerah mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat di daerah ini?	11	50,00	90,00	66,91
25.	Sejauh mana Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini?	10	60,00	100,00	82,00
26.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat?	10	40,00	100,00	64,00
27.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik?	7	10,00	90,00	50,00

Tabel 34. 15. Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
1.	Sejauh mana lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen, mandiri dan tidak berpihak (imparsial)?	8	30,00	80,00	69,25
2.	Sejauh mana lembaga peradilan mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain yang membatasi kemerdekaan pers?	9	50,00	90,00	76,56
3.	Sejauh mana peraturan atau kebijakan di daerah mendorong aparat pemerintah daerah patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	10	50,00	95,00	72,70
4.	Sejauh mana aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers?	10	50,00	95,00	70,20

Tabel 34. 16. Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
5.	Sejauh mana peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya?	9	30,00	93,00	62,11

Tabel 34. 17. Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Kriminalisasi dan Intimidasi Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
6.	Sejauh mana peraturan di daerah ini dapat memidanakan wartawan karena pemberitaannya?	8	30,00	90,00	66,63
7.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberi penghukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik?	9	50,00	95,00	70,67
8.	Sejauh mana peraturan di daerah ini memberlakukan sensor terhadap pers? Sensor adalah intervensi terhadap isi berita sebelum diterbitkan/disiarkan.	9	50,00	97,00	69,78
9.	Sejauh mana pemerintah daerah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers?	9	31,00	95,00	69,00

Tabel 34. 18. Etika Pers

Etika Pers		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
10.	Sejauh mana pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan menaati kode etik pers dan standar perusahaan pers?	6	45,00	90,00	68,33
11.	Sejauh mana wartawan di daerah ini menaati UU Pers, Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik dan kaidah jurnalistik?	11	55,00	100,00	76,00

Tabel 34. 19. Mekanisme Pemulihan

Mekanisme Pemulihan		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
12.	Sejauh mana kasus pers di daerah ini, ditangani oleh Dewan Pers secara independen?	8	30,00	99,00	75,50
13.	Sejauh mana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan Independen?	7	20,00	90,00	61,57
14.	Sejauh mana Komisi Informasi (KI) di propinsi ini bekerja secara bebas dan independen?	7	10,00	70,00	41,71
15.	Sejauh mana aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman) secara adil atas kekerasan-kekerasan terhadap wartawan?	10	30,00	100,00	69,70
16.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan mekanisme menurut UU Pers (Dewan Pers) dibandingkan peradilan	7	30,00	89,00	65,71
17.	Sejauh mana penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana?	7	30,00	85,00	57,29

Tabel 34. 20. Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas		N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai Rata-rata
18.	Sejauh mana peraturan di daerah ini mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas seperti penderita tuna-rungu dan tuna netra?	7	20,00	60,00	45,14